

**ANALISIS KOMPARASI DAMPAK TATA KELOLA
PERTANIAN KELAPA TERHADAP
PENDAPATAN PETANI KELAPA
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR-RIAU**

DISERTASI

**UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MENCAIPI GELAR DOKTOR**



**OLEH :
GULAM MUHAMMAD
117020103111008**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

DISERTASI

ANALISIS KOMPARASI DAMPAK TATA KELOLA PERTANIAN KELAPA TERHADAP PENDAPATAN PETANI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR - RIAU


Oleh :

GULAM MUHAMMAD
117020103111008

Dipertahankan didepan penguji dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan
Pada tanggal : **24 Agustus 2016**

Komisi Promotor,


Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., MA
Promotor


Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D
Ko – Promotor 1


Prof. Candra Fajri A., SE., M.Sc., Ph.D
Ko – Promotor 2

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi


Dr. Susilo, SE., MS
NIP. 19601 030 198601 1001

LEMBAR IDENTITAS PROMOTOR DAN PENGUJI

Judul : ANALISIS KOMPARASI DAMPAK TATA KELOLA
PERTANIAN KELAPA TERHADAP PENDAPATAN
PETANI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI
HILIR - RIAU

Nama Mahasiswa : GULAM MUHAMMAD
Program Studi : ILMU EKONOMI

KOMISI PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Khusnul Ashar, SE., MA
Promotor 1 : Dwi Budi Santoso, SE., MS., Ph.D
Promotor 2 : Prof. Candra Fajri A, SE., M.Sc., Ph.D

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. Maryunani, SE., MS
Dosen Penguji 2 : Prof. Munawar Ismail, SE., DEA., Ph.D
Dosen Penguji 3 : Prof. Dr. Pudjihardjo, SE., MS
Dosen Penguji Luar : Prof. Dr. H. Harlea, SE., MM

Tanggal Ujian : 24 Agustus 2016

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi



Dr. Susilo, SE., MS

NIP. 19601 030 198601 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah DISERTASI dengan judul:

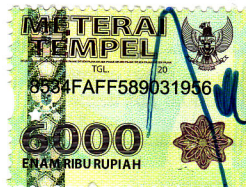
"ANALISIS KOMPARASI DAMPAK TATA KELOLA PERTANIAN KELAPA TERHADAP PENDAPATAN PETANI KELAPA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR - RIAU"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah DISERTASI ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia DISERTASI ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (DOKTOR) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 24 Agustus 2016

Mahasiswa,



Nama	: GULAM MUHAMMAD
NIM	: 117020103111008
PS	: DOKTOR ILMU EKONOMI PPS FEB UB

RIWAYAT HIDUP

Gulam Muhammad, lahir di Jakarta, 11 Februari 1965 anak dari 7 (tujuh) bersaudara dari Ayah H. Saleh Marichan dan Ibu Hj. Asmah. Saat ini penulis bekerja di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indragiri Tembilahan-Riau.

Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar Negeri No. 6 Tembilahan, SMP Muhammadiyah Tembilahan dan SMA Negeri 1 di Tembilahan Inhil, Riau.

Selanjutnya meneruskan studi Strata Satu (S1) Pada Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, Jawa Tengah dan menyelesaikan studi pada Tahun 1991 dan melanjutkan Studi Magister Manajemen pada Pascasarjana Universitas Budi Luhur Jakarta dan menyelesaikannya pada tahun 2002. Dan pada tahun 2012 sampai sekarang sedang mengikuti Pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi, Minat Ekonomi Kelembagaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.

Sebelumnya pernah bekerja di PT. Geotama Bumi Servindo, Tangerang, STIE Bhakti Pembangunan Jakarta, Global Fund ATM DIU Banyumas-Jateng, dan terakhir tahun 2008, bekerja sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Islam Indragiri, Tembilahan, Riau sampai dengan sekarang

Malang, 24 Agustus 2016
Penulis,

Gulam Muhammad

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya yang telah memberikan petunjuk, kesehatan dan kekuatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan sampai terselesaikannya disertasi ini. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan dari lubuk hati yang paling dalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu pada Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya
2. Pembina dan Pengurus Yayasan Tasik Gemilang, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melanjutkan pada Program Doktor di Universitas Brawijaya Malang. Juga memberikan contoh dan motivasi langsung untuk terus menimba ilmu ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Rektor Universitas Islam Indragiri yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di kampus Universitas Riau
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prof. Candra Fajri Ananda., S.E., M.Sc. yang dalam kesempatan ini juga sekaligus sebagai Ko-Promotor, dimana telah memberikan kesempatan dan kemudahan serta bimbingannya di dalam menempuh pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya
5. Dr. Susilo, S.E., MS. selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dan selaku penguji yang telah dengan cermat memberikan arahan, masukan masukan, motivasi, kesempatan, kebijakan dan kemudahan dalam proses penyelesaian studi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Harlen, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Pasca Sarjana Universitas Riau sekaligus sebagai Penguji Tamu, yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan banyak membantu serta mengarahkan agar studi program doktor ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya, kebijakan dan kearifannya telah memberikan dan motivasi membuat saya tetap semangat untuk menyelesaikan disertasi ini.
7. Prof. Dr. Khusnul Ashar, S.E., M.A. selaku Promotor yang dengan tulus, arif, bijaksana dan penuh pengertian serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan motivasi yang luar biasa serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini.
8. Dr. Dwi Budi Santoso, selaku Ko-Promotor yang dengan bijaksana dan penuh pengertian dan kesabaran, atas bimbingan dan diskusi, masukan-masukan, arahan di dalam proses penyelesaian disertasi ini.
9. Prof. Dr. Munawar Ismail, S.E., DEA, Ph.D. selaku penguji yang dengan tulus berbagi ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kesabaran dalam mengarahkan dan membedah disertasi ini sehingga semakin tajam dan lebih sempurna.
10. Prof. Dr. M. Pudjihadjo, S.E., M.S. selaku penguji yang dengan kearifan, sabar dan penuh perhatian telah mengarahkan penulis di dalam memperbaiki disertasi ini.
11. Prof. Dr. Maryunani, S.E., M.S selaku penguji yang telah cermat dalam memberikan arahan, masukan, dan motivasi untuk terus menyelesaikan agar Disertasi ini semakin sempurna.



12. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indragiri, dimana telah memberikan kesempatan dan kemudahan di dalam menempuh pendidikan Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang
13. Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Si. Ph.D. yang pernah sempat juga memberikan landasan dan teori pada disertasi saya ini, semoga keterlibatan beliau pada disertasi saya ini menjadi lebih baik dan sempurna
14. Dr. Asfi Manzilati, S.E., M.S., sebagai dosen sekaligus teman tempat berdiskusi dan dengan kesabaran serta kearifannya senantiasa memberikan motivasi agar disertasi ini dapat selesai tepat waktu
15. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya atas segala Bimbingan dalam proses belajar dan mengajar selama penulis menjalani perkuliahan
16. Bapak Bupati Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan data-data yang penulis perlukan sehingga dapat membantu di dalam penyelesaian disertasi ini.
17. General Manager Mr Tay Ciatung Selaku Pimpinan pada Perusahaan PT.Riau Sakti United Plantations Perkebunan yang telah banyak membantu, baik data, kebijakan dan Fasilitas dan teman diskusi yang menarik selama penulis melakukan riset lapangan di PT. RSUP-Perkebunan.
18. Vice General Manager Bapak Ramdas, dan Management Representatif Bapak Kamaruddin yang telah dengan sabar dan memberikan banyak informasi dan diskusi yang panjang, yang sangat berharga bagi penulis berupa seluk beluk perkebunan kelapa khususnya di RSUP-Perkebunan dan Kecamatan Pulau Burung
19. Semua Teman-teman di PT. RSUP-Perkebunan, Pengurus beserta Seluruh Petani pada Perkebunan Inti Rakyat di Kecamatan Pulau Burung, dan seluruh Petani Kelapa di Kecamatan Pulau Burung, yang telah banyak memberikan informasi dan bantuan serta kemudahan untuk mengakses data, sehingga disertasi ini dapat selesai sesuai dengan yang penulis harapkan
20. Ayahnda tercinta H. Saleh Maricar (Almarhum) dan Ibunda Hj. Asmah (almarhum), yang penuh kesabaran, dan tulus ikhlas, serta pengorbanan yang tidak berakhir. Mendidik serta menanamkan nilai-nilai kejujuran, keuletan, keberanian, pendidikan, dan memotivasi untuk senantiasa menuntut ilmu sampai pada jenjang yang tertinggi. Dan atas bimbingan Ayahnda Ibunda tercinta, sembah sujud sehingga ananda dapat seperti ini, namun belum banyak berbuat banyak untuk ayah dan bunda, hanya doa yang selalu terkirimkan agar senantiasa diberikan balasan yang berlipatganda, kelapangan, oleh Allah SWT di alam kuburnya.
21. Ayah Mertua H.Hasbullah (almarhum) dan Hj. Sri Hendriani yang penuh kesabaran, keiklasan, kejujuran, keuletan, contoh yang nyata, serta doa yang terpancar disetiap sujud dan rukunya untuk ananda sehingga beban yang berat ini terasa menjadi ringan, dan akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini pada waktunya.
22. Kakak-Kakakku dan adik-adikku. Hasyim Saleh Marichan dan keluarga, Khalid Khan (Almarhum) dan Keluarga, Mardiansyah dan Keluarga, Zakaria (Alm) dan Keluarga Ahmad Khan (Alm) dan Keluarga, Didi Suryadinata dan Keluarga, Malik Khan dan Keluarga, Rudi Suryadinata dan Keluarga, Budi dan Keluarga, Muhammad Muadz dan Keluarga, Mono dan Keluarga, beserta keluarga lainnya serta ponakan tercinta yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, beliau adalah inspirasi, motivasi, dan penyemangat saya di dalam kehidupan serta di dalam menyelesaikan disertasi ini, telah memberikan doa dan restu serta pengorbanan yang tidak ternilai selama penulis menempuh studi.

23. Khusus buat istriku tercinta Dra. Hasriani, dan Putriku Sarah Azizah, yang penuh setia mendampingiku disaat suka dan duka, penuh pengertian, siang dan malam memanjatkan doa untukku, berbagi serta menghiburku dikala susah serta memberikan dukungan dan inspirasi untuk menyelesaikan studi. Terima kasih untuk mendampingi penulis dengan setia dan sabar, sehingga dari kesabaran itu dapat terselesaikan disertasi ini dengan baik.

24. Kepada Rekan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Rekan-rekan di Fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indragiri, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas kerja sama, motivasi, teman berdiskusi, dan bertukarpikiran, semoga persahabatan yang terjalin dapat terus kita pupuk dan bina dan terus kita jalin, dan tidak luntur walaupun jarak waktu memisahkan kita.

Semoga amal dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus mendapatkan pahala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Dan akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran bagi penyempurnaan disertasi ini, dan harapan penulis disertasi ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Amin

Malang, 24 Agustus 2016
Penulis,

Gulam Muhammad



ABSTRAK

Gulam, Muhammad, Program Doktor Ilmu Ekonomi, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2011, Analisis Komparasi Dampak Tata Kelola Pertanian Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Promotor : Khusnus Ashar, Dwi Budi Santoso, Candra Fajri Ananda.

Permasalahan pertanian kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah rendahnya pendapatan petani kelapa, yang disebabkan harga kelapa yang cenderung terus menurun sehingga banyak petani kelapa yang meninggalkan pertaniannya, dan sebahagian lainnya ada yang beralih menanam komoditas lainnya seperti kelapa sawit, dll. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu dengan adanya program revitalisasi pertanian yang salah satu tujuannya adalah peningkatan kesejahteraan petani.

Agar pendapatan petani kelapa kembali membaik, salah satu jalan keluarnya adalah dengan menata kembali bentuk tata kelola petani kelapa. Bentuk Tata Kelola Petani kelapa: Petani Mandiri (*Spot Market*), Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*), dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tata kelola perkebunan kelapa mana yang berdampak terbesar terhadap peningkatan pendapatan petani serta faktor utama apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan besaran dampak dari kedua bentuk tata kelola terhadap pendapatan petani.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, dimana penelitian ini bersifat Kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan cara sampel berstrata (*Stratified Sampling*), lalu membagi dalam 2 kelompok, Petani Mandiri dan Non-Mandiri, setelah itu dilakukan penarikan sampel dengan strata tak proporsional (*Disproportional Stratified Sampling*), dimana sampel disamakan untuk setiap strata. dengan proporsi 50 Petani Mandiri dan 50 Petani Non Mandiri. Desain penelitian menggunakan metode survei, yaitu penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada responden.

Penelitian ini tidak menggunakan metode simultan dikarenakan salah satu persamaan bersifat binomial, maka harus diselesaikan dengan menggunakan probit atau logit. Maka persamaan ini disebut persamaan *treatment effect model*. Dari hasil penelitian Tata Kelola perkebunan kelapa yang berdampak terbesar terhadap peningkatan pendapatan petani adalah Tata Kelola Petani Mandiri. Petani yang memilih untuk mengelola kebunnya secara mandiri secara rata-rata menerima proporsi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan secara Non-Mandiri. Hal ini disebabkan rata-rata biaya produksi yang dihadapi oleh petani Non-Mandiri proporsinya mencapai 50% dari Total Pendapatan yang diterima, sedangkan rata-rata biaya produksi yang dihadapi petani mandiri hanya sekitar 15-18% dari pendapatannya, sehingga proporsi pendapatan bersih Petani Mandiri secara umum lebih tinggi.

Key Word : Biaya Produksi, Biaya Transaksi, Kontrak Pertanian, dan Pendapatan Petani Kelapa

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang proses penelitian dan penulisan disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, dengan judul : “Analisis Komparasi Dampak Tata Kelola Pertanian Kelapa Terhadap Pendapatan Petani Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Disertasi ini merupakan refleksi dari pengamatan penulis atas fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian, dilandasi dengan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan literatur serta temuan-temuan terdahulu. Dalam disertasi ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi Kontrak Pertanian (*Contract Farming*) bagi Petanain Non-Mandiri dalam hal ini petani Inti Rakyat (PIR-Trans), Petani Mandiri (*Spot Market*), Biaya Transaksi (*Transaction Cost*) Biaya Produski, Tata Kelola Pertanian Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

Seharusnya di era pasar bebas ini, petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sudah memiliki kehidupan yang layak atau sejahtera dari hasil perkebunan kelapanya tersebut. Namun kenyataannya kehidupan petani kelapa di Indragiri Hilir masih jauh dari kata sejahtera, penelitian ini mencoba mencari faktor-faktor yang penyebabnya dan yang mempengaruhinya.

“*Tiada gading yang tidak retak*”, Disertasi ini sangat disadari masih jauh dari sempurna, hal ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun penulis sudah mengerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangcermatan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 24 Agustus 2016
Penulis,

Gulam Muhammad

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN IDENTITAS PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kesenjangan Penelitian	14
1.3. Rumusan Masalah	20
1.4. Tujuan Penelitian	22
1.5. Manfaat Penelitian	22
1.6. Keluaran Penelitian	23
BAB II	24
KAJIAN PUSTAKA	24
2.1. Usaha Kelapa	24
2.1.1. Teori Produksi	30
2.1.2. Fungsi Produksi	31
2.1.3. Biaya Produksi	42
2.1.4. Biaya Transaksi	46
2.1.4.1 Market Transaction Cost	51

2.1.4.2	Managerial Transaction Cost	54
2.1.4.3	Political Transasction Cost	55
2.1.3.	Biaya Transaksi dalam Pasar Input Output	58
2.1.4.	Biaya Risiko Usaha	59
2.2.	Bentuk Tata Kelola Sektor Pertanian	61
2.2.1.	Keuntungan Pertanian Kontrak bagi Petani	68
2.2.2	Keuntungan Pertanian Kontrak bagi Pengontrak	70
2.2.3	Kerugian Pertanian Kontrak	72
2.3	Penelitian Terdahulu	74
BAB III	85
KERANGKA KONSEPTUAL	85
3.1.	Kerangka Pikir	85
BAB IV	95
METODE PENELITIAN	95
4.1.	Pendekatan Penelitian	95
4.2.	Ruang Lingkup Penelitian	95
4.2.1.	Jenis dan Sumber Data	95
4.2.2.	Lokasi	95
4.2.3.	Waktu Penelitian	97
4.3.	Metode Pengolahan Data	97
4.3.1.	Populasi	97
4.3.2.	Penarikan Sampel	97
4.4.	Instrumen Penelitian	100
4.5.	Teknik Analisis	102
BAB V	104
HASIL DAN PEMBAHASAN	104
5.1.	Profil Petani Kelapa Indragiri Hilir	104
5.1.1.	Karakter Petani Kelapa	104
5.1.2.	Upaya yang dilakukaj oleh Pemkab Inhil	114
5.1.3.	Profil Petani Kelapa	115
5.1.4.	Klasifikasi Pendapatan Petani Sampel	120

5.2.	Pembahasan Hasil Statistik	122
5.3.	Pembahasan Hasil	124
5.3.1.	Dampak Pengelolaan Usaha Kelapa Non Mandiri	124
5.3.2.	Faktor Utama Perbedaan Pendapatan	126
5.4.	Saluran Distribusi	131
5.4.1.	Saluran Distribusi Pada Petani Mandiri	132
5.4.2.	Penjelasan Pada Petani Non Mandiri	138
5.5.	Sumbangan Teoritis dan Praktis	139
5.5.1.	Kontribusi Penelitian	139
5.5.2.	Kontribusi Teoritis	139
5.5.3.	Kontribusi Praktis	140
5.5.4.	Keterbatasan Penelitian	141
BAB VI	142
PENUTUP	142
6.1.	Kesimpulan	142
6.2.	Saran	142
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 :	Luas Areal, Jumlah Pekebun (RT), dan Hasil	3
	Produksi Perkebunan di Kabupaten Inhil Tahun 2012	
1.2 :	Peluang Investasi Pemanfaatan Hasil Perkebunan Kelapa	
	2013	7
1.3 :	Pergerakan Harga Turunan Hasil Kelapa 2008-2012	9
2.1 :	Klasifikasi Tata Kelola Usaha kelapa	63
3.1 :	Perbedaan Tata Kelola Kelapa Mandiri dan Non Mandiri ...	86
4.1 :	Sebaran Responden Petani Kelapa di Kec. Pulau Burung	99
	Kabupaten Indragiri Hilir	
5.1 :	Gambaran Umum Petani Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir	104
5.2 :	Profil Petani Sampel	116
5.3 :	Perbedaan Petani Mandiri dan Non Mandiri	118
5.4 :	Klasifikasi Pendapatan Petani	124
5.4 :	Estimasi Parameter model <i>Treatment Effect</i> Usaha Kelapa	123



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 :	Daerah Sentral Produksi Kelapa di Indonesia 2010-2014.....	3
1.2 :	Perbandingan Luas Areal Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir....	6
1.3 :	Perkembangan PDRB Kota/Kabupaten di Provinsi Riau(dalam Juta Rupiah)	16
2.1 :	Sistem Pertanian	27
2.2. :	Skala Pertambahan Hasil yang Konstan	34
2.3. :	Skala Pertambahan Hasil yang Menurun.....	35
2.4. :	Skala Pertambahan Hasil yang Naik	36
2.5. :	Pengaruh Kemajuan Teknologi	39
2.6 :	Kenaikan Hasil Bertambah dan Semakin Berkurang	41
2.7 :	Proses Koordinasi Transaksi	47
2.8 :	Pengembangan Kelembagaan Dalam Perdagangan	59
3.1 :	Kerangka Pikir Penelitian	85
3.2 :	Saluran Distribusi Petani Kelapa Mandiri	88
3.3 :	Saluran Distribusi Petani Kelapa Non Mandiri	78
4.1 :	<i>Treatment Effect</i> pada Pendapatan Petani	102
5.1 :	Dampak keputusan kontrak pertanian terhadap perbedaan pendapatan petani	127
5.2. :	Saluran Distribusi I Petani Kelapa Mandiri	131
5.3. :	Saluran Distribusi II Petani Kelapa Mandiri	134
	Saluran Distribusi III Petani Kelapa Mandiri	135
	Saluran Distribusi IV Petani Kelapa Mandiri	136
	Saluran Distribusi V Petani Kelapa Mandiri	137
	Saluran Distribusi Petani Kelapa Non Mandiri	138

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 : Tabulasi Data
- 2 : Kuesioner
- 3 : Hasil Estimasi



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dapat dikategorikan negara pertanian, dimana sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan oleh masyarakatnya untuk bercocok tanam. Salah satu di daya perkebunan yang terus dikembangkan sampai saat ini adalah budidaya kelapa. Dimana budidaya kelapa ini masuk dalam kategori sektor perkebunan.

Dimana kelapa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat dan hampir semua bagian dari kelapa dapat dimanfaatkan, terutama produk buahnya dapat diolah menjadi bahan baku produk strategis dalam induatri makanan seperti : minyak kelapa, Virgin oil, Natadecoco, Briket dari tempurung kelapa dll, disamping limbahnya dapat digunakan untuk pakan ternak dan keperluan lainnya.

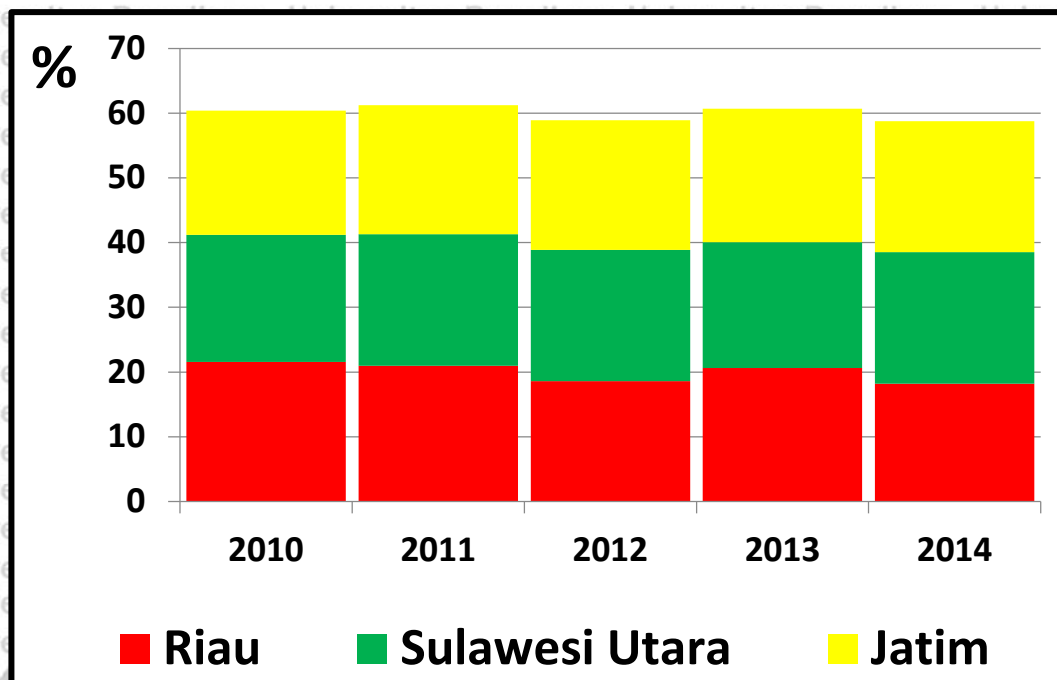
Sebagaimana diketahui kelapa juga merupakan jenis tanaman mudah ditanam dan tidak teralu sulit di dalam perawatannya mudah dan dapat tumbuh hampir di semua iklim di Indonesia atau tahan terhadap berbagai kondisi cuaca.

Karena keunggulan geografis, iklim, kesuburan tanah, dll sampai saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil kelapa terbesar di dunia dengan luas areal produksi 3,78 juta hektar serta jumlah produksi 2,58 juta ton

Taufikkurahman, (1988). Menurut Akuba (1990), dimana hampir 90% areal kelapa di Indonesia merupakan dari usaha perkebunan rakyat. Dari hasil sektor perkebunan kelapa, Kontribusi tanaman kelapa di Indonesia terhadap perkebunan nasional lainnya, seperti Kelapa Sawit, Karet, dll sekitar 26%, sedangkan kontribusinya terhadap dunia dan negara-negara anggota APCC Indonesia ,emnyumbang masing-masing sekitar 27% dan 33%, (Arancon, 1999).

Di Indonesia yang mempunyai garis pantai yang luas, merupakan lahan yang cocok untuk tumbuh dan kembangnya komoditi kelapa, Banyak daerah di Indonesia yang mengandalkan kelapa sebagai salah satu komoditas unggulannya, Seperti Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Utara, dan Riau. Di Provinsi Riau letak perkebunan kelapa yang paling luas adalah di Kabupaten Indragiri Hilir (INHIL). Nuryanti (2011) menerangkan bahwa Provinsi Riau memiliki areal perkebunan kelapa yang cukup luas, dan kurang lebih 579.399 hektar, atau sekitar 75% perkebunan kelapa di Provinsi Riau berada di Kabupaten Indragiri Hilir. Saat ini, jumlah total luas lahan perkebunan kelapa di Provinsi Riau menyusut menjadi 516.895 hektar dengan 85% dari lahan tersebut berada di Kabupaten Indragiri Hilir (BPS, 2015). Hal tersebut dikarenakan Petani kelapa banyak yang mengkonversikan lahan kelapanya menjadi perkebunan sawit. Hal tersebut dikarenakan karena iklim yang cocok untuk pohon kelapa sawit, juga kemudahan di dalam memasarkan hasilnya. Kondisi ini membuat Provinsi Riau turun di urutan ketiga sebagai sentra daerah unggulan penghasil kelapa setelah Provinsi Sulawesi Utara dan Jawa Timur di Indonesia.

Gambar 1.1. Daerah Sentral Produksi Kelapa di Indonesia 2010-2014 (%)



Sumber : Dirjen Perkebunan, 2015

Indragiri Hilir yang dikenal sebagai daerah hamparan kelapa dunia, dimana masyarakatnya sebagian besar hidup dari berusaha di sektor pertanian dan perkebunan, salah satunya adalah Kelapa. Sampai saat ini, sektor perkebunan kelapa adalah yang paling banyak di usahakan oleh petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, jenis kelapa yang banyak ditanam adalah kelapa dalam maupun kelapa hibrida Aris, (2003). Dari data Sensus Kabupaten Inhil tahun 2010, merupakan wilayah nomor dua terpadat setelah Kota Pekanbaru, yang jumlah penduduk Indragiri Hilir sampai saat sebanyak 670.499 jiwa. Dari jumlah tersebut diketahui pada tahun 2012 sebanyak 147.510 jiwa atau sekitar 22% bekerja pada sektor perkebunan dan sebanyak 422.414 jiwa atau sekitar 63% darinya bekerja di perkebunan kelapa.

Di Kabupaten Indragiri Hilir juga banyak ditanam tanaman perkebunan lainnya, seperti Kelapa Sawit, Kakao, Pinang, Sagu dan lainnya. Akan tetapi

kelapa adalah penyumbang hasil produksi terbesar dari perkebunan, baik itu dari jenis kelapa Sawit, Kelapa Hibrida dan Kelapa Dalam. Diketahui pada akhir tahun 2012 total hasil produksi kelapa di Indragiri Hilir mampu mencapai 95% dari total produksi perkebunannya. Dan bila kita rinci dapat gambarkan sebagai berikut : 48% adalah berasal dari produk Kelapa Dalam yang ditanam oleh penatani mandiri (Tradisional), dan 8% adalah hasil kelapa yang ditanam oleh perkebunan kelapa dengan jenis kelapa hibrida, dan produk yang menonjol lainnya adalah Kelapa Sawit sebesar 39 %. Sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Luas Areal, Jumlah Pekebun (RT), dan Hasil Produksi Perkebunan di Kabupaten Inhil Tahun 2012

No	Komoditi	Luas Areal (Ha)	Jumlah Pekebun (RT)	Hasil Produksi (Kg)
1	Kelapa Dalam	392.191	80.039	299,690,529
2	Kelapa Hibrida	37.578	15.031	47,560,553
3	Kelapa Sawit	108.487	36.162	245,586,122
4	Kopi	1.275	1.159	391,027
5	Kakao	2.005	409	320,866
6	Pinang	16.245	12.496	7,636,076
7	Sagu	17.585	1.794	7,460,716
8	Nipah	13.310	1.479	11,666,945
9	Karet	5.242	1.638	3,410,783
Jumlah		593.918	150.208	623,726,496

Sumber: Disbun Kabupaten Inhil, 2012

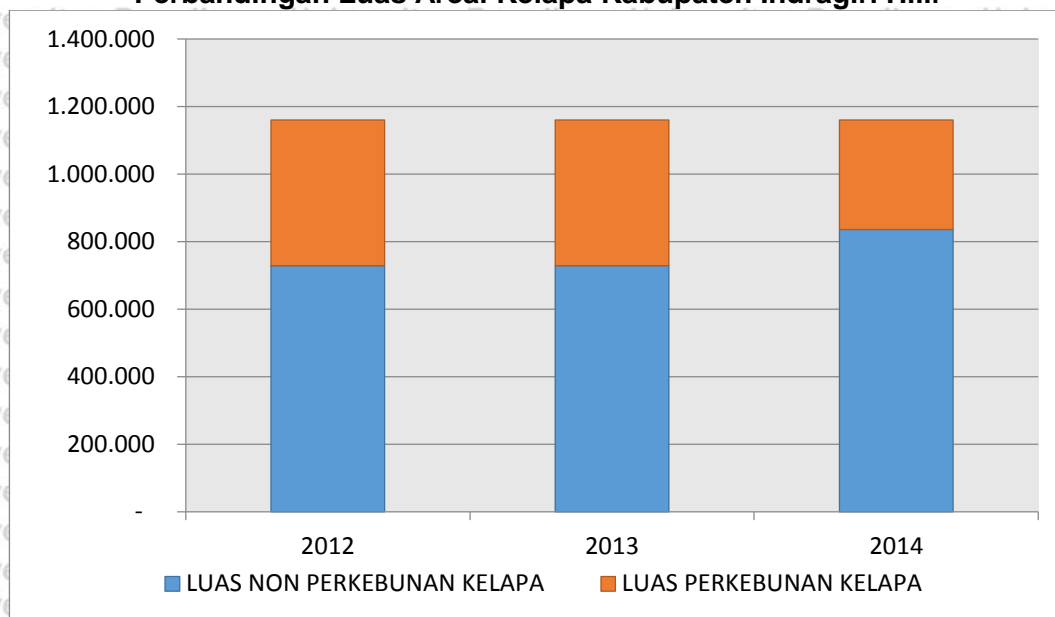
Dari Tabel : 1.1. Pada table ini jelas tergambar bahwa Komoditas Kelapa dalam yang merupakan jenis kelapa yang ditanam oleh Petani Mandiri tersebar mencapai 392.191 hektar atau 66,2% dari luas areal perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, dan jumlah petani kelapa yang terlibat langsung di dalamnya sekitar 80.039 jiwa atau 53,3 % dari jumlah seluruh petani di Kabupaten Indragiri Hilir, dan kemampuan produksi yang dihasilkan oleh petani mandiri mampu mencapai 299.690.529 kilo atau 48% dari seluruh hasil produksi Petani Mandiri di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa, di Kabupaten Indragiri Hilir hampir 53,3% dari jumlah penduduknya adalah petani yang bekerja di sektor pertanian kelapa. Artinya hampir setengah dari penduduknya adalah bekerja disektor pertanian kelapa mandiri, dan dapat juga diartikan, bahwa perkebunan kelapa adalah jenis perkebunan yang strategis di Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tahun 2012 jenis perkebunan kelapa di Indragiri Hilir terdiri dari jenis Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida. Namun luas lahan kelapa yang diusahakan oleh Petani Kelapa Mandiri turun dari 37% tahun 2012 menjadi 27% tahun 2014, turun sekitar 10%. Penurunan ini dikhawatirkan akan mengganggu produksi kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, karena luas lahan perkebunan kelapa terus menurun . Hal ini disebabkan banyaknya petani kelapa Mandiri beralih (konversi) untuk menanam kelapa Sawit, dimana harga kelapa sawit saat ini harganya lebih baik. Penurunan luas lahan ini dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan perkebunan kelapa di masa mendatang di Indragiri Hilir.

Seperti pada gambar 1.2.

Gambar 1.2 :
Perbandingan Luas Areal Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: Disbun Kab. Inhil, data diolah (2015)

Dari data tersebut di atas dapat digambarkan, bahwa permasalahan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir adalah : hampir 66,03 persen perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jenis kelapa rakyat atau jenis kelapa dalam. Dan melibatkan 53,3 persen petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diartikan hampir setengah penduduk Kabupaten Indragiri Hilir adalah bertani kelapa, namun sampai saat ini petani kelapa di Indragiri Hilir Jauh dari kata sejahtera.

Artinya kesejahteraan petani kelapa di Indragiri Hilir tergantung dari pendapatannya dari bertani kelapa, sementara saat ini harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum membaik dan berpihak kepada petani kelapa. Dimana Petani kelapa belum dapat menikmati keuntungan dari usaha bertani kelapanya. Padahal kelapa merupakan jenis produk yang dapat diolah menjadi berbagai macam prosuk olahan, baik makanan dan produk turunan kelapa lainnya. Seperti Minyak Kelapa, Gula Kelapa, Arang Kelapa, Nata de coco dan produk olahan kelapa lainnya yang berasal dari batang dan lidi kelapa.

Namun disadari sampai saat ini, petani kelapa belum mampu mengolah hasil kelapa hasil produksinya, dan hampir seluruhnya petani kelapa menjual kelapanya dalam bentuk kelapa bulat (kelapa utuh), Gula Merah dan dalam bentuk bungkil (Kopra). Selebihnya petani belum mampu membuat produk turunan kelapa lainnya seperti : dari Tempurung Kelapa (Briket Kelapa), Air (Nata de Coco), dll. Dimana petani belum mampu mengolah hasil produksinya secara maksimal yang disebabkan oleh kemampuan dan keahlian dari petani itu sendiri. Ini merupak pekerjaan rumah dari pemangku kepentingan untuk membenahinya, agar petani mendapatkan keahlian tepat guna untuk mengolah hasil produksinya, sehingga diharapkan akan mampu mendongkrak pendapatannya. Dimana selama ini keuntungan lebih banyak dinikmati oleh tengkulak dan perusahaan.

Asri (2003), saat ini kelapa sudah dapat dimanfaatkan menjadi olahan kelapa menjadi beragam macam produk seperti *Dessicated Coconut*, firgin oil, *Nata De Coco*, *Serat Serabut*, dan Arang Aktif. Dan dibidang kesehatan, khasiat dari kelapa semakin banyak digemari dan diakui khasiatnya. Dan jika ditinjau dari sisi lain seperti investasi pemanfaatan hasil perkebunan kelapa, semakin terbuka lebar, dimana dari hasil olahan kelapa tersebut dapat di ekspor keluar negeri berupa minyak kelapa, firgin oil dan produk lainnya semakin meningkat permintaannya. Seperti disajikan pada pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Peluang Investasi Pemanfaatan Hasil Perkebunan Kelapa 2013

No	Usaha	Peluang
1	Kelapa Butir	1.918.120 Butir
2	Kopra	479.530 Ton
3	Kelapa Batang	2.314.152 M ³
4	Arang Tempurung Kelapa	79.921.666 Ton
5	Air Kelapa	767.248 M ³
6	Sabut Kelapa	191.812 ton
7	Lidi Kelapa	123.812 ton
8	Gula Kelapa	3.438 Ton

Sumber: Disbun Kab. Inhil Tahun, 2013

Nuryanti (2011) melihat dari sisi lain, dimana komoditas dari produk kelapa dari Kabupaten Indragiri Hilir tersebut mempunyai banyak manfaat dan dapat diturunkan menjadi beberapa produk turunan kelapa yang berasal dari daging kelapa, tempurung kelapa, air kelapa yang hasil olahannya tersebut jika dipasarkan di dalam dan luar negeri, merupakan produk yang sangat digemari oleh konsumennya. Namun sayangnya sampai saat ini para petani kelapa mandiri (tradisional) belum dapat memanfaatkannya peluang turunan kelapa tersebut, dimana petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak menjual hasil produknya berupa kelapa utuh (kelapa jambul), bungkil kelapa (kopra), dan Gula Merah. Sementara tempurung, air dan sabut kelapanya masih belum dapat dimanfaatkan oleh petani kelapa tersebut, sehingga petani kelapa hanya menikmati hasil margin yang kecil dari hasil budi daya produksi kelapanya tersebut.

Akibatnya, pendapatan petani kelapa belum seperti yang diharapkan dan jauh dari kata sejahtera. Dan dalam jangka panjang banyak petani kelapa yang mengkonversikan lahannya menjadi pahan perkebunan kelapa sawit, atau meninggalkan perkebunannya dan beralih ke profesi lain seperti menjadi buruh dan tukang, dikarenakan profesi sebagai petani kelapa pendapatannya sudah tidak menjanjikan lagi. Hal tersebut dikarenakan harga kelapa yang cenderung turun dari waktu ke waktu. Seperti terlihat pada tabel 1.3.

Tabel : 1.3.
Pergerakan Harga Kelapa Dalam
DI Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 s.d 2015

Tahun	Kelapa Dalam
2009	704
2010	1.099
2011	1.718
2012	895
2013	1.162
2014	1.984
2015	1.664

Sumber : (Database Harga Komoditi Perkebunan Disbun Kab. Inhil 2015)

Dari table 1.3 di atas, terlihat harga komoditi kelapa dari tahun ketahun harganya berfluktuasi, dan kisaran harganya masih di bawah harga ideal sesuai dengan yang diharapkan oleh petani kelapa. Ini perlu dicarikan jalan keluarnya oleh pemangku kepentingan.

Pertanian kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, jika dilihat dari permasalahan di dalam Tata Kelola pertanian kelapa bermacam-macam, antara lain :

1. Masih Rendah dan berfluktuasinya harga kelapa yang dihasilkan oleh petani di Kabupaten Indragiri Hilir, bahkan harga komoditi kelapa tersebut cenderung terus menurun.
2. Kecendrungan Petani Kelapa menjual hasil produksinya dalam bentuk kelapa utuh, tidak diolah terlebih dahulu dikarenakan minimnya pengetahuan dan teknologi tepat guna yang dimiliki oleh petani, sehingga petani hanya mendapatkan margin keuntungan yang sangat kecil.
3. Ketidak tahuan tentang informasi pasar yang diperoleh oleh petani

4. Masih rendahnya pengetahuan Petani Kelapa di dalam Sistem Produksi dan Tata Kelola Pertanian yang masih dikelola secara tradisional, baik jika ditinjau dari segi penanaman kelapa, pemupukan kelapa dan pada saat panen hasil produksi dan lainnya
5. Petani Kelapa yang masih tradisional dan belum tergabung dalam kelompok tani atau koperasi, sehingga cenderung tidak memiliki daya tawar terhadap pasar.
6. Petani yang masih tradisional dimana kepemilikan lahan produksinya sangat sempit
7. Kesempatan Akses Modal Usaha yang dimiliki oleh petani yang masih lemah, mengakibatkan memberikan peluang praktik tengkulak yang menyebabkan banyak petani yang terbeli oleh hutang, dll.

Akibat harga kelapa yang cenderung terus menurun, tentu ini akan merugikan petani kelapa, dimana tentu pendapatan petani kelapa juga akan terus menurun, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya. Hal lainnya dapat saja pendapatan petani kelapa yang cenderung terus menurun dikarenakan kemampuan petani kelapa itu sendiri yang masih rendah di dalam Tata Kelola Kelapa, sehingga perlu dicarikan jalan keluarnya, agar petani mempunyai kemampuan di dalam Tata Kelola Kelapa, agar produksi kelapanya terus meningkat. Petani perlu diberi kesadaran bahwa apabila petani mempunyai kemampuan Tata Kelola Kelapa yang baik, maka akan mengakibatkan produktivitas kelapanya akan bertambah, dan ini akhirnya akan meningkat pendapatan petani kelapa itu sendiri.

Dimana perlu diberikan pemahaman, pengetahuan yang benar tentang Tata Kelola Kelapa yang baik, yaitu bagaimana melakukan pengelolaan perkebunan kelapa yang baik dan benar, mulai dari menanam, merawat, sampai memanen hasil produksi kelapa. Diberikan pengetahuan yang baik agar dapat mengelola perkebunan kelapa dengan biaya produksi, biaya transaksi dan biaya lainnya yang rendah. Dengan demikian maka petani akan dapat menghilangkan biaya-biaya yang tidak penting dan dapat dialihkan untuk kegiatan produksi lainnya, seperti untuk pemberian pupuk tepat dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, sehingga ini secara langsung akan meningkatkan produktivitas kelapa petani. Jadi Petani diberikan kesadaran bahwa dalam Tata kelola Kelapa yang baik, ada biaya yang tidak perlu dan dapat dihilangkan dan dialihkan ke giatan produksi lainnya, namun disamping itu juga ada juga biaya yang harus tetap ada agar menjamin produksi kelapa tetap meningkat.

Dikalangan petani kelapa, Kelembagaan Tata Kelola Kelapa terus ada sampai saat ini adalah berupa system kontrak tradisional, dimana nilai-nilai kekeluargaan dan kekerabatan dan saling percaya masih dipegang teguh oleh para petani dengan mitranya, seperti tengkulak (tokeh). Dimana biasanya petani menjual hasil perkebunannya kelapa kepada tengkulak, dan tengkulak sebagai agen dari perusahaan akan meneruskannya hasil kelapa yang dibeli dari petani kelapa untuk menjualnya kembali ke perusahaan dengan sistem yang disepakati. Jadi dapat dipastikan, bahwa hampir semua petani kelapa cenderung menjual hasil produksinya langsung kepada tengkulak. Hal tersebut biasanya dikarenakan :

1. Apabila petani kelapa menjual hasil produksinya kepada Tengkulak (Tokeh), maka petani diberi kemudahan oleh tengkulak berupa

kemudahan meminjam uang pada saat petani kelapa memerlukan dana untuk keperluan yang mendesak, Seperti : Biaya produksi, Biaya Sekolah Anak, Biaya Sarana Produksi berupa bibit kelapa, pupuk, racun insektisida, dll;

2. Bagi Petani yang berada lingkungan perusahaan dan sudah membuat kontrak dengan Perusahaan, maka penetapan harga cenderung sudah ditetapkan oleh perusahaan melalui mekanisme pasar. Sementara petani kelapa dalam hal ini tidak mempunyai kekuatan di dalam menetapkan harga, dan petani tidak memiliki daya tawar (*bargaining power = price taker*) dan sehingga akhirnya para petani pada akhirnya cenderung mengikuti harga pasar yang sudah ditetapkan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat 3 (tiga) macam Tata Kelola Pertanian Kelapa yang sampai saat ini masih berlangsung, yaitu :

1. Petani Mandiri, sering juga kita kenal dengan istilah petani *Sport Market*, dimana di dalam bertani kelapa, modal, produksi dan pemasaran, diusahakan secara mandiri oleh petani tersebut.
2. Petani yang sistem pengelolaannya dengan Non Mandiri atau *Marketing Contract*, dalam hal ini Pertanian Inti Rakyat Trans (PIR-Trans), pada sistem pertanian seperti ini, petani telah terikat kontrak oleh perusahaan, Petani PIR-Trans harus menjual hasil produksinya ke perusahaan, sesuai dengan kontrak yang disepakati.
3. dan dengan sistem kontrak lainnya berupa Integrasi Pertikal (*Integration Vertical*), dimana perusahaan yang melakukan kegiatan perkebunan kelapa, petani di sini hanya sebatas karyawan perusahaan, yang bekerja sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Menurut Kismantoroadji (1996) *Contract Farming* adalah suatu bentuk hubungan kerjasama bisnis antara petani dengan perusahaan, baik perusahaan Swasta ataupun BUMN, dimana hubungan tersebut diikat oleh suatu kontrak yang disepakati kedua belah pihak dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu yang berhubungan dengan produksi, manajemen, dan komoditas tertentu.

Saat ini sudah berkembang di berbagai sentra produksi perkebunan upaya kemitraan antara petani kelapa dengan pelaku bisnis kelapa, yang dibentuk secara swadaya dan otonom oleh masyarakat sesuai dengan kepentingan petani dan lembaga mitra petani yang mengakomodir kebutuhan petani yang tertuang di dalam aturan yang informal berdsarkan prinsip kepercayaan dan kejujuran, inilah yang disebut dengan sistem kemitraan local. (Pranadji, 1997; Hastuti dan Bambang, 2004). Model kerjasama tradisional antara petani dengan perusahaan perkebunana dapat di katakan sebagai kemitraan yang bersifat *Non-contract Farming (Spot Market)*. Dimana di dalam kemitraan *Non-contract Farming (Spot Market)*, kemitraan dijalankan dengan aturan-aturan informal dimana di dalam menjalankan aturan tersebut tidak dinyatakan secara tertulis.

Di Kabupaten Indragiri Hilir bentuk perkebunan tata kelola kelapa yang berkembang yaitu:

- Petani Mandiri (*Spot Market*) yang dikenal juga petani tradisional, yaitu mereka yang memiliki lahan perkebunan sendiri dan bebas dalam melakukan proses produksi dan penjualan tanpa campur tangan perusahaan. Umumnya setelah masa panen, Petani Mandiri akan menjual hasil panennya langsung ke pasar maupun ke pengepul/Tokeh (*spot market*), dengan mengikuti mekanisme pasar.
- Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*), yaitu petani Transmigrasi yang tergabung dalam kontrak Petani Inti Rakyat Trans (PIR-Trans) yang pada

awalnya menerima bantuan lahan dari pemerintah sebagai sarana mencari penghidupan di tanah transmigrasi. Bantuan dari pemerintah/perusahaan termasuk sarana produksi berupa : bibit, pupuk, dan sarana penunjang produksi lainnya, yang akan dihentikan jika para pekebun ini sudah mandiri.

Proses pembukaan lahan Pekebun PIR-trans dibantu oleh PT Riau Sakti United Platanation Perkebunan (RSUP-Perkebunan) dengan kontrak perjanjian bahwa hasil panen pekebun akan dipasarkan langsung ke PT. RSUP Industri

- Selain kedua bentuk di atas, ada bentuk usaha lain yaitu Pekebun PT. RSUP Perkebunan, yaitu pekebun yang bekerja di lahan milik pemerintah yang kemudian disewa oleh perusahaan dalam kurun waktu 25 tahun dan dapat diperpanjang kembali setelahnya. Pekebun ini tidak memiliki lahan sendiri dan diberi imbalan berupa upah. Perusahaan menanggung semua biaya perkebunan termasuk pembukaan lahan, pemberian sarana produksi berupa : bibit, pupuk, alat, dan lain sebagainya. Hasil dari perkebunan ini tidak di jual kepada pengepul/Tokeh melainkan langsung disetorkan kepada PT RSUP Industri untuk diolah.

1.2 Kesenjangan Penelitian

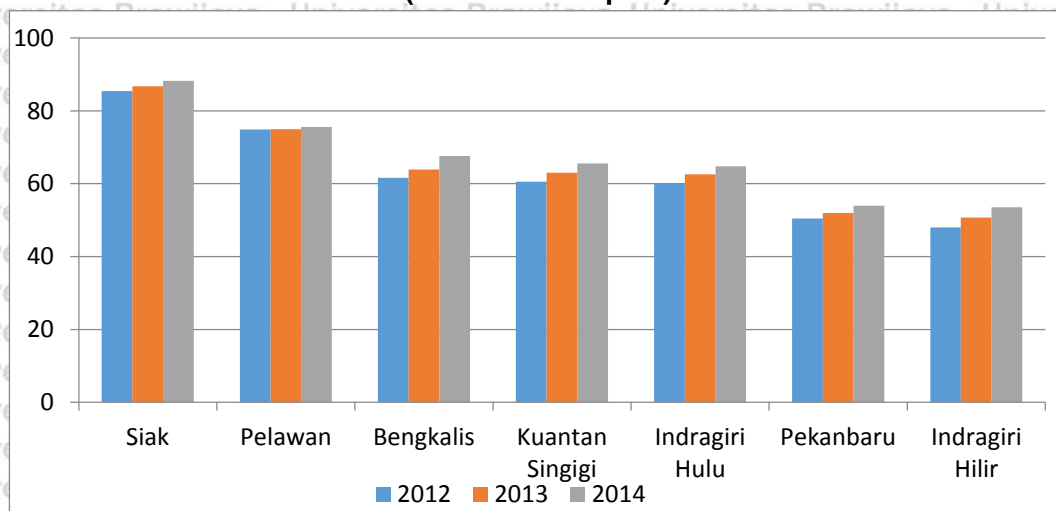
Saat ini pergerakan kelapa harga di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum menggembirakan, masih di bawah harga kelapa yang diinginkan oleh petani kelapa, dimana ini juga mengakibatkan PDRB Kabupaten Indragiri Hilir juga tidak begitu bagus. Perkiraan pendapatan petani saat ini (Oktober 2012 dengan harga kopra Rp. 5.500/kg) berkisar antara: Rp. 4.120.000,- s.d. Rp. 4.700.000,- juta per tahun. Pendapatan ini setara dengan Rp 882 kg beras, bila harga beras Rp 5.000 kg, dan setiap keluarga petani kelapa memiliki rata-rata tiga jiwa, artinya keperluan pokok 73,5 kg beras per keluarga perbulan. Jika terdapat tiga jiwa disetiap petani kelapa, maka sektor pertanian kelapa ini berkontribusi Rp. 122.500/orang/bulan. Bila dipakai patokan garis kemiskinan Rp.

212.000/orang/bulan (BPS), maka industri hulu (petani kelapa) dapat dikatakan bahwa petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan.

Dikabupaten Indragiri Hilir, Pendapatan petani kelapa masih belum menggembirakan. Dimana harga kelapa masih sering berfluktuatif, hal tersebut tergantung pada harga produk primer, yaitu tergantung pada harga kelapa butiran dan kopra yang berlaku di pasaran. Disamping itu, petani cenderung tidak memiliki daya tawar, dimana di dalam menghadapi permasalahan akses pasar untuk menjual produk kelapanya. Dimana bagi petani yang mempunyai akses pasar yang jauh dari perusahaan, petani terpaksa harus menjual hasil produksinya ke Pengepul (Tokeh). Oleh karena itu petani kelapa yang jauh dari lokasi industri pengolahan, juga berusaha untuk memperluas akses pasarnya. Tujuannya adalah agar harga produk kelapa sedikit lebih membaik, hal ini dipengaruhi oleh peranan perantara, pengepul berasal dari Kabupaten, Provinsi, (antar pulau), Malaysia dan Thailand. Dalam kenyataannya seringkali tingkat informasi pasar yang dimiliki oleh perantara lebih baik dibandingkan dengan petani.

Petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, masih cenderung bertani kelapa secara tradisional, dimana sering kali menghadapi kesulitan dalam melakukan pemupukan, perawatan dan peremajaan kebun kelapanya dikarenakan minimnya pembiayaan. Oleh karena itu, peranserta atau bantuan dari pihak pemerintah dan sektor swasta masih sangat diperlukan. Usaha tersebut dapat berupa Kontrak Perkebunan (*Contract Farming*). Peran serta dan ikut campur tangan pemerintah dalam bentuk-bentuk kontrak, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari hasil berkebun kelapa petani kelapa, yang akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Gambar 1.3
Perkembangan PDRB Kota/Kabupaten di Provinsi Riau
(dalam Juta Rupiah)



Sumber: PDRB Per Kapita Kota/Kabupaten se-Provinsi Riau 2012-2014, diolah (2015)

Di Provinsi Riau terdapat 12 Kabupaten/Kota, bandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir menduduki peringkat yang ketujuh dalam perekonomiannya. Dimana PDRB Per Kapita Kabupaten Indragiri Hilir berada di bawah rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Riau yang sebesar 56,14 Juta Rupiah. Karena PDRB Kabupaten Indragiri Hilir sebagian besar masih di dukung oleh sektor pertanian kelapa. Artinya PDRB Kabupaten Indragiri Hilir masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani kelapa. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kemampuan produksi kelapa petani yang masih rendah atau hal-hal lain seperti biaya transaksi, akses pasar, dan lainnya.

Disamping Biaya Produksi yang belum meminimalkan cost, biaya lain yang menyertainya adalah Biaya Transaksi Petani di dalam Tata Kelola perkebunan kelapa terjadi di pasar input dan pasar output. Biaya transaksi yang terjadi di pasar input, dimana terjadi interaksi antara petani dengan penjual input produksi. Di dalam pembelian input produksi seperti obat-obatan, Pupuk, karena akses pasar yang jauh (letak geografis) harga beli petani seringkali lebih tinggi

dari harga pengecer resmi obat-obatan. Demikian juga untuk membeli pupuk, terjadi perbedaan harga yaitu harga beli melebihi harga yang ditetapkan pemerintah. Bahkan terkadang Pupuk yang tersedia masih jauh dari yang diharapkan petani. Ini akan mengakibatkan penurunan secara langsung produksi kelapa petani.

Dalam Biaya transaksi di pasar output akan terjadi interaksi secara langsung antara petani dengan pembeli hasil produksi (Tokeh). Dikarenakan posisi tawar petani dan kondisi lainnya, biasanya harga jual kelapa petani masih sangat memprihatinkan, dimana petani dihadapkan dengan harga penjualan produksi kelapanya yang masih di bawah harga pemerintah. Posisi tawar petani yang lemah tersebut dikarenakan, minimnya informasi dan permodalan yang diperoleh oleh petani, atau juga dikarenakan petani tidak banya memiliki akses pasar dimana selama ini petani hanya menjual produksi kelapanya langsung kepada pengepul terdekat (Tokeh). Petani dalam hal ini tiPetani kesulitan ak mempunyai posisi tawar, hal ini sangat memprihatinkan, hal tersebu dikarenakan petani tidak mempunyai jalur pemasaran sendiri, dimana akibatnya petani menggunakan sistem tebang jual. Dengan sistem tebang jual ini petani dapat merugi sekitar 40% dari hasil panen dan beralih menjadi milik tengkulak (Sesbany, 2012). Selisih harga yang terjadi pada pembelian input dan pada penjualan hasil produksi, inilah yang disebut dengan biaya transaksi bagi petani.

Di dalam memasarkan hasil produksinya, disamping biaya produksi, petani juga mengeluarkan biaya sendiri berupa biaya transaksi, seperti biaya biaya pengangkutan produksi kelapanya sampai kepada pengepul atau pembeli, biaya pengangkutan ini juga merupakan biaya transaksi bagi petani. Biaya transaksi yang harus ditanggung oleh petani akan secara langsung mempengaruhi pendapatan petani. Dimana semakin besar Biaya Produksi dan

Biaya transaksi akan mengakibatkan menurunnya pendapatan petani secara langsung.

Dalam (Anggraini, 2007) bahwa disamping biaya produksi yang tinggi, biaya transaksi yang tinggi juga dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan bersih yang di terima oleh petani secara langsung. Hal ini dikarenakan sebagian besar biaya transaksi tersebut diserap pihak lain dalam hal ini pengul (tokeh) dan lain-lain. Jika dilakukan pendekatan perbandingan rasio biaya transaksi penerimaan, antara petani dengan nelayan, hasilnya walaupun secara nominal biaya transaksi yang ditanggung oleh petani jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya transaksi yang ditanggung oleh nelayan, namun secara riil, rasio biaya transaksi penerimaan (*transaction cost-benefit rasio*) relatif setara dengan nelayan kincang. Demikian juga halnya ratio biaya transaksi yang ditanggung terhadap penerimaan petani adalah 0,19. Ini berarti setiap penerimaan petani kelapa Rp 100,00 petani kelapa harus mengeluarkan biaya transaksi sebesar Rp 19,00. Dan Jika dibandingkan dengan Rasio biaya transaksi penerimaan petani penggarap sedikit lebih rendah dibandingkan petani pemilik yaitu 0,18, artinya dalam setiap penerimaan petani Rp 100,00 maka petani penggarap menanggung biaya transaksi sebesar Rp 18,00.

Sebagai mana diketahui biaya yang tinggi akan mengakibatkan penurunan pendapatan petani langsung. (Faradila, 2009), Artinya bila terjadi kenaikan pada biaya transaksi maka akan secara langsung mengakibatkan penurunan secara nyata pendapatan petani. Dilain sisi menurut (Eskola, 2005) bahwa ada hubungan yang negative antara biaya transaksi dengan kesejahteraan, dimana apabila biaya transaksi meningkat, maka akan mengakibatkan pula penurunan kesejahteraan. (Bhattari, Sakthivadivel dan Hussain, 2002) bahwa biaya transaksi terjadi hampir disemua sector bisnis dan mendasari struktur kelembagaan, dimana berkorelasi yang signifikan di dalam

mempengaruhi pertumbuhan pendapatan petani, baik itu petani dalam skala besar atau skala kecil.

(Verawati, 2013) Dalam penelitiannya memaparkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan bersih antara petani kelapa sawit mandiri dengan Petani Pola Petani Inti Rakyat (PIR), dimana pendapatan bersih petani Mandiri mampu mendapatkan penghasilan Rp 4.523.000 perbulan sementara petani dengan Pola PIR Rp 3.630.000,- hal ini dikarenakan adanya perbedaan yang lebih disebabkan karena petani mandiri lebih berusaha memaksimalkan ketersediaan lahannya, status kepemilikan lahan, sarana dan prasarana (saprodi), dan pasar serta harga jual yang relative stabil.

Dari penelitian terdahulu ternyata dapat ditarik kesimpulan yang dapat mempengaruhi pendapatan petani secara langsung adalah :

- ketersediaan lahan,
- Status kepemilikan lahan,
- Sarana dan prasarana,
- Biaya Produksi,
- Biaya Transaksi,
- Pasar,
- Harga jual yang relative stabil,

Dari penelitian di atas, dirasakan masih sedikit penelitian yang membahas penelitian tentang kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir, terutama masih belum pernah adanya penelitian yang berkaitan dengan Tata Kelola Kelapa dan dikaitkannya dengan menganalisis komparasi pendapatan kelapa antara dua petani kelapa yang berbeda, tentu hal ini sangat perlu untuk dilakukan penelitian yang mendalam karena ini akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan

petani kelapa dan kesejahteraannya, hal tersebut menjadi sangat menarik dan penting, untuk mengetahui lebih mendalam tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua jenis tata kelola kelapa yang berbeda tersebut, dan kaitannya dengan pendapatan mana yang lebih efisien dan memberikan margin yang lebih besar antara kedua jenis tata kelola kelapa tersebut, sehingga dapat diketahui faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan tersebut, untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam.

Sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan, karena dengan dilakukan penelitian tentang Tata Kelola kelapa dengan kaitannya diketahuinya jenis Tata Kelola yang mana yang pendapatannya yang lebih memberikan margin yang lebih besar kepada petani, maka untuk kebijakan pertanian kelapa kedepan, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan bagi pemangku kebijakan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti berminat untuk mendalami dampak perbedaan tata kelola usaha kelapa terhadap pendapatan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu bentuk tata kelola perkebunan kelapa dan pendapatan petani kelapa dengan cara pengukuran biaya transaksi, biaya input dan luas lahan. Penelitian ini juga mengkombinasikan pendekatan produksi dan biaya transaksi yang merupakan pendekatan non produksi untuk memecahkan permasalahan petani khususnya petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir-Riau.

1.3 Rumusan Masalah

Permasalahan pertanian kelapa telah menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan diusahakannya pembentukan program revitalisasi pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana diketahui berdasarkan data nilai tukar petani di Kabupaten Indragiri Hilir, petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir

mengalami penurunan pendapatan. Dimana Nilai tukar petani yang menurun menggambarkan keadaan kesejahteraan petani, hal ini dapat dianalogkan bahwa terjadi penurunan dalam pendapatan petani. Dari permasalahan inilah, sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari hasil penelitian terdahulu variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan petani secara langsung, ditemukan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian awal lapangan, ditemukan bahwa variabel produksi yang penting dan langsung berhubungan dengan pendapatan petani adalah permasalahan biaya input, dimana selama ini telah terjadi kenaikan harga input produksi dan adanya kesulitan dalam memperoleh input produksi tersebut. Biaya-biaya input yang penting adalah : Pupuk, Obat-obatan, Bibit dan Tenaga kerja, Transportasi.

Dan dari beberapa penelitian terdahulu, Variabel lain yang tidak kalah pentingnya dan termasuk dalam variabel produksi adalah variabel biaya transaksi. Dalam penelitian awal lapangan, ditemukan data disamping biaya produksi bahwa terdapat biaya transaksi baik dalam pasar input maupun dalam pasar output. variabel biaya transaksi ini berada di luar model variabel-variabel yang mempengaruhi pendapatan petani.

Sebagaimana diketahui Pendapatan petani diperoleh dari Pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya, dengan demikian Idealnya bahwa biaya transaksi itu nol. Dalam fungsi produksi menurut Neo Klasik hanya dikenai adanya biaya input, sehingga pendapatan petani sepenuhnya diperoleh dari hasil penjualan dikurangi biaya input, namun dalam kenyataannya petani harus mengeluarkan biaya transaksi dan akibatnya penerimaan petani menjadi lebih sedikit setelah dikurangi dengan biaya produksi, dimana petani juga harus mengeluarkan

biaya-biaya lain yang tidak ada kaitannya dengan produksi, yang ini juga nyata menyedot banyak sekali penerimaan yang semestinya diterima oleh petani.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Tingkat pendapatan petani mana yang lebih besar antara kedua bentuk tata kelola mandiri atau non mandiri ?
2. Faktor utama apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pendapatan tersebut ?

1.4 Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, tercapai beberapa hal yaitu:

1. Terestimasi besarnya pendapatan petani dari dua bentuk tata kelola perkebunan Mandiri dan Non Mandiri
2. Teridentifikasinya faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat pendapatan dari bentuk tata kelola perkebunan kelapa Mandiri dan Non Mandiri.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai:

1. Sumbangan mengaplikasikan teori ilmu kelembagaan khususnya kontrak pertanian di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dalam menetapkan kebijakan pembangunan sektor industri perkebunan kelapa di Indragiri Hilir.
3. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang melakukan studi yang terkait dengan industri perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dari permasalahan tersebut di atas maka sangat menarik dan layak untuk di angkat dalam suatu penelitian yang bersifat ilmiah agar dapat diketahui permasalahan dan jalan keluarnya.

1.6 Keluaran Penelitian

Penelitian ini tidak bermaksud untuk menerapkan atau menguji teori ke dalam realita/empiris, akan tetapi penelitian ini diharapkan dapat mengetahui model praktis Tata Kelola Petani kelapa yang berbasis Biaya Transaksi, Biaya Produksi, dan Risiko Usaha terhadap pendapatan petani kelapa di Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini, penulis akan berusaha menjelaskan beberapa teori maupun analisis yang terkait dengan penelitian. Sub-bab 2.1 Menjelaskan tentang Usaha Kelapa yang memiliki tiga komponen biaya yaitu : Biaya Produksi, Biaya Transaksi dan Biaya Resiko (ketidakpastian ekonomi) yang dihadapi petani baik dalam pasar input dan output. Selanjutnya, Sub-bab 2.2 menjelaskan tentang bentuk Tata Kelola sektor pertanian yang akan mempengaruhi pendapatan petani. Sub-bab 2.3 Menjelaskan tentang Hubungan antar Variabel yang diteliti dan Sub-bab 2.4 merupakan Kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan penelitian ini.

2.1 Usaha kelapa

Menurut Mosher (1968) dalam Shinta (2011) Pertanian berasal dari kata (*Farm*), dimana usaha kelapa merupakan bentuk pertanian rakyat dari kata *farm*. *Farm* adalah suatu tempat atau lahan untuk petani bercocok tanam, dimana atas hasil kegiatannya tersebut, petani akan mendapatkan upah dari pemilik lahan (manajer), Sementara manajer adalah pemilik lahan sekaligus sebagai pemilik Faktor Produksi, dimana pemilik lahan berupaya mengkombinasikan Sumber Daya Alam berupa Tanah, Air, dengan Sumber Daya lainnya berupa : Tenaga Kerja, Sarana Produksi, Bangunan dan lain-lain, dimana dari hasil mengkombinasikan kedua sumber daya tersebut dapat menghasilkan produksi yang optimal.

Untuk itu Manajer yang baik juga perlu pengetahuan ilmu manajemen yang baik. mengelola Sumber Daya yang ada berupa *Planning* (Perencanaan), *Organising* (pengorganisasian), *Actuating* (Mengarahkan), dan *Controlling*

(Mengevaluasi), dimana diharapkan manajer mampu mengelola untuk dapat dapat menggunakan factor-faktor produksi secara efisien dan efektif, sehingga menghasilkan produksi yang maksimal dengan biaya yang rendah. (Suratiyah, 2006. Soeharjo dan Patong, 1977). Demikian pula halnya dengan Tata Kelola kelapa dimana manajer berupaya untuk mengorganisir sumber daya dan factor produksi yang ada, berupa sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan manajemen yang sepenuhnya diupayakan untuk dapat menghasilkan produksi pertanian yang maksimal. Namun demikian sebagai mana yang kita ketahui, pada umumnya organisasi petani kelapa lebih banyak dikelola oleh perorangan (Petani Mandiri), atau bisa juga terdiri dari sekumpulan orang yang terikat dalam kesamaan status sosial, letak geologis, kesepahaman politik dan teritorial sebagai pengelolanya. Dan pada umumnya bercirikan : mereka memiliki modal yang relative kecil, Minimnya pengetahuan bercocok tanam yang baik, kepemilikan lahan yang sempit (luas lahan rata-rata 2 hektar), yang pada akhirnya berdampak pada hasil produksi dan penghasilan petani kelapa itu sendiri (Soekartawi, *et al*, 1986).

Petani Mandiri mempunyai beberapa keterbatasan dan dari keterbatasan tersebut mengakibatkan keterbatasan dalam kepemilikan modal, yang mengakibatkan petani termarginalkan, dimana petani tidak mampu bergerak terlalu leluasa di dalam mengusahakan pertaniannya, dimana petani tidak mampu secara langsung untuk membeli bibit yang baik, membeli pupuk, teknologi, tenaga kerja, dll.

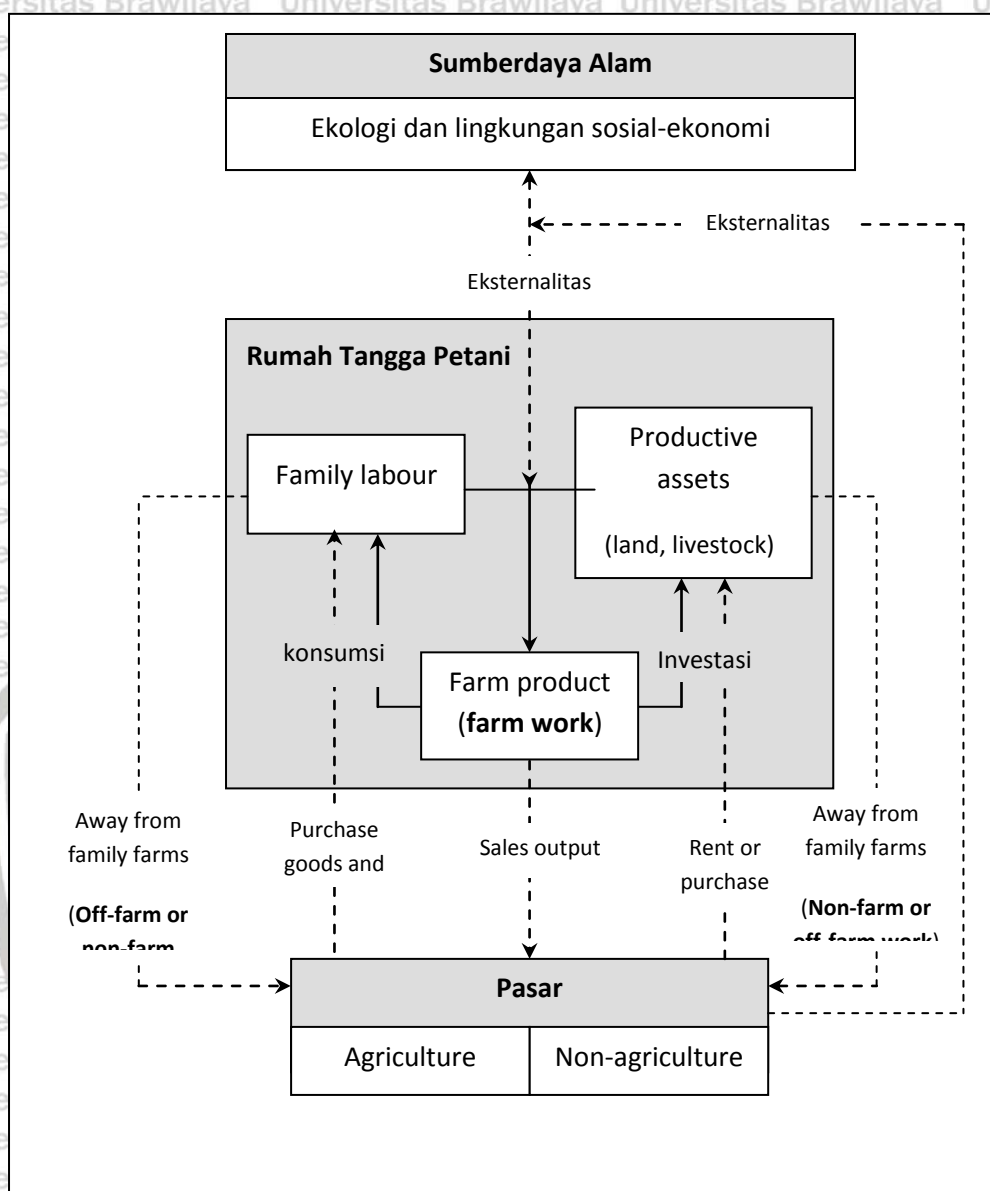
Pada pola sistem Pertanian Mandiri, dimana petani mengusahakan segala sesuatunya pertaniannya sendiri (Soeharjo dan Patong, 1977). Mulai dari lahan, Pupuk, Sarana Produksi, Teknologi, dll semua berasal dari sumber daya petani sendiri. Dan saat setelah panen dan mendapatkan hasil dari pertanian kelapanya biasanya digunakan untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan keluarga

sendiri, baik melalui atau tanpa peredaran uang. Maka Sistem Tata Kelola Kelapa seperti ini dikenal dengan usaha kelapa untuk mencukupi kebutuhan keluarga (*subsistence farm*).

Gambar 2.1 menjelaskan keterkaitan antara sistem pertanian yang meliputi pasar input, proses, dan output pertanian. Input di dalam sistem pertanian adalah Faktor Sumber Daya Alam (SDA), yang semua itu sangat bergantung pada ekologi dan lingkungan sosial-ekonomi. Dalam pasar input, akan terjadi interaksi antara petani dengan penjual input produksi, dimana petani mempersiapkan lahan, tenaga dll. Pemberian input produksi dapat berupa obat-obatan, pupuk, dan sarana penunjang produksi. Dalam bidang pertanian, produksi fisik dihasilkan oleh bekerjanya beberapa faktor produksi sekaligus, antara lain tanah, bibit, pupuk, obat hama dan tenaga kerja. Artinya Petani Mandiri, akan mengelola semua sumber inputnya sendiri. Dan bagi seorang produsen yang rasional tentunya dia akan berusaha mengkombinasikan faktor-faktor produksi sedemikian rupa secara optimal dalam rangka untuk mencapai hasil usaha kelapa yang efisien (Mubyarto, 1977), dan diharapkan tidak akan menambah input kalau tambahan output yang dihasilkan tidak menguntungkan (Endaryati, *et al.* 2000).

Sementara menurut (Soekartawi, 2003) juga berpendapat menyatakan bahwa fungsi produksi adalah hubungan variabel (Y) yang dijelaskan dengan variabel (X) yang menjelaskan. Yaitu berupaya dengan mengkombinasikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal (Soekarwi, 2006) dan didapatkan pendapatan usaha kelapa petani, yaitu selisih antara seluruh penerimaan yang diterima oleh petani setelah dikurangi semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh petani.

Gambar 2.1: Sistem Pertanian



Sumber: Upton (1987, p.6), dimodifikasi oleh penulis 2016

Bagi petani Input di proses dan dalam rangka digunakan untuk kebutuhan rumah tangga petani di dalam menghidupi kebutuhannya sehari hari (subsisten), dengan mengkombinasikan luas lahan dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sarana Produksi, dan lainnya untuk menghasilkan produksi pertanian. Dimana Luas lahan yang dimiliki petani akan secara berpengaruh signifikan terhadap hasil produksi yang dihasilkan pertanian. Dimana apabila semakin luas lahan yang diupayakan oleh petani kelapa tersebut, maka akan

berdampak secara langsung terhadap pendapatan yang diperoleh oleh petani secara langsung. Dimana hasil dari pendapatan petani tersebut, dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani dan keluarganya berupa kebutuhan pangan dan non pangan. Disamping itu Petani juga merupakan salah satu merupakan sumber ekonomi bagi masyarakat desa yang ditempatinya, dimana kepemilikan luas lahan yang dimilikinya sebagai lahan pertanian sangat ditentukan oleh hasil produksi yang akan digunakan sebagai pendapatan rumah tangga petani (Mardikanto, 1994).

Disamping Pasar Input, Petani juga dihadapkan pada permasalahan pasar output, dimana petani dalam hal ini akan memasarkan hasil produksi dari perkebunannya ke pasar dan hasil produksi petani tersebut dapat berupa hasil pertanian maupun non pertanian. Di dalam pasar output, petani akan dihadapkan pada permasalahan mekanisme pasar, dimana akan terjadinya interaksi antara petani sebagai penjual produksinya dengan pembeli hasil produksi. Dimana permasalahan yang timbul pada petani adalah : Harga Jual yang kurang menguntungkan, hal tersebut dikarenakan karena lemahnya posisi tawar petani dan petani itu sendiri disisi lain kurangnya baik informasi pasar yang lengkap berupa besaran biaya yang dihadapi petani baik dalam pasar input, proses-proses maupun pasar output. Menurut (Soekartawi, 2006),

Dilain pihak, dalam Tata Kelola Kelapa petani dihadapkan pada biaya-biaya yang selalu dikeluarkan di dalam berproduksi, ada tiga biaya yang sering dihadapi petani, yaitu meliputi Penerimaan Total Revenue), Biaya-biaya (Total Cost) dan Pendapatan atau Keuntungan dari usaha kelapa petani tersebut.

Analisis tiga biaya tersebut di atas lebih dikenal dengan analisis anggaran arus uang tunai (*cash flow analysis*).

Dalam Tata Kelola Kelapa dikenal juga pendapatan atau penerimaan, dimana Penerimaan (*Total Revenue*) diperoleh petani dari menjual hasil produksi

kelapanya dikalikan harga jual kelapanya. Bila di masukkan ke dalam teori, maka persamaanya sebagai berikut :

$$TR = Y.P \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

TR = Total penerimaan

Y = Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha kelapa

P_y = Harga Y

Dan di dalam Tata Usaha Kelapa dikenal juga biaya-biaya, biaya yang dikenal adalah Biaya Tetap (*fixed cost*) dan Biaya Variabel (*variabel cost*).

- Biaya Tetap (*fixed cost*) dapat didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh petani, tetapi besarnya relatif tetap, baik dari jumlahnya, dan biaya ini terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh sedikit atau banyak. Contoh : Depresiasi tanah (sewa tanah) dan alat pertanian.
- Biaya Variabel (*Variable Cost*) didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dimana besarnya selalu berubah, dimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh besar atau kecilnya produksi yang dihasilkan oleh petani. Contohnya biaya yang dipergunakan untuk mempersiapkan Sarana Produksi. Jika petani mengharapkan produksi yang tinggi, maka tentu juga diperlukan tambahan Tenaga Kerja, Penambahan Pemakaian Pupuk, dan penambahan sarana produksi lainnya, dan biaya ini selalu berubah-ubah tergantung kepada besar-kecilnya produksi yang dihasilkan. Untuk menghitung total biaya usaha kelapa digunakan rumus:

$$TC = FC + VC \dots\dots\dots (2.2)$$

Dimana :

TC = Total biaya

FC = Biaya tetap

VC = Biaya variabel

Dari kegiatan usaha Tata Kelola Petani kelapa tersebut, diharapkan Petani mendapatkan Keuntungan atau Laba, dan Laba tersebut di hitung dari Selisih dari Pendapatan setelah dikurang segala Biaya-biaya yang dikeluarkan.

Sehingga dapat dirumuskan :

$$Pd = TR - TC \dots\dots\dots (2.3)$$

Dimana:

Pd = Pendapatan usaha kelapa

TR = Total penerimaan

TC = Total biaya

2.1.1. Teori Produksi

Produksi dapat didefinisikan yaitu mengubah Faktor Produksi yang tersedia menjadi barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah (value added), dimana di dalam mengubah Faktor Produksi tersebut diperlukan Fungsi Manajemen dari seorang Manajer, agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh konsumen.

Sebagai mana diketahui Faktor Produksi dikenal dengan 6 M, terdiri dari :

Man, Money, Material, Machines, Methode, Market. untuk mengubah dari sumber daya tersebut menjadi barang dan jasa, yang semuanya ini dipergunakan untuk membuat barang dan jasa mempunyai nilai tambah. Dimana

di dalam memproduksi semua harus terukur (*flow concept*), bagaimana penggunaan Faktor Produksi tersebut dan dimana dilokasikan, agar terjadi produksi maksimal dengan biaya yang seminim mungkin. Sementara itu output (hasil) sendiri diasumsikan konstan kualitasnya (Miller dan Meiners, 2000), dimana setiap penambahan satu satuan input akan menambah dua kali dari output yang dihasilkannya.

Sedangkan (Salvator, 2006) mendefinisikan fungsi produksi adalah setiap unit produksi yang dihasilkan dan dituangkan dalam suatu tabel atau grafik, dimana pada grafik tersebut menunjukkan jumlah komoditi maksimum yang dapat dihasilkan per unit/waktu, dari setiap kombinasi input (Tenaga Kerja, Modal, Bahan, Baku, dll) alternatif bila menggunakan teknik produksi terbaik, sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimum.

2.1.2. Fungsi Produksi

Tugas Manajer adalah agar perusahaan mampu memproduksi dengan lancar, dengan mengelola masukan (input) menjadi output yang baik dan naik secara terus menerus jika ditinjau dari jumlah dan kualitasnya, inilah yang disebut dengan Kegiatan ekonomi. Dimana pada kegiatan Ekonomi ini diharapkan perusahaan mampu mengelola Faktor Produksi secara maksimal. Baik dalam hal penggunaan sumber daya manusia, modal, bahan baku, metode, mesin. Para ahli teori pertumbuhan neoklasik menggunakan konsep produksi (Demberg, 1992, Dornbusch dan Fischer, 1997). Menurut (Nicholson, 1995), Perusahaan di dalam melakukan produksi dengan merubah masukan (input) dan dirubah menjadi keluaran (output), dengan memanfaatkan secara maksimal faktor produksi yang tersedia. Hal tersebut dapat diformulasikan dalam fungsi produksi sebagai berikut :

$$Q = f(K, L, M) \dots \dots \dots (2.4)$$

Dimana :

Q = keluaran suatu barang tertentu selama satu periode

K=mesin (modal) yang digunakan selama periode itu

L= jam kerja masukan tenaga kerja

M= bahan baku yang digunakan

Di sektor pertanian, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, petani dihadapkan banyak variabel yang terkait dan saling mempengaruhi, yang tujuannya adalah agar petani dapat menghasilkan produksi yang maksimal.

Variabel-variabel tersebut dapat berupa : tanah, bibit, pupuk, obat hama dan tenaga kerja, sarana produksi lainnya. Disini diharapkan petani mampu mengkombinasikan dengan baik faktor produksi tersebut, dalam rangka mendapatkan hasil produksi yang maksimal, efisien dan efektif.

(Mubyanto, 1977), berpendapat bahwa petani tidak akan menambah satuan input jika dianggap nantinya tidak ada tambahan output yang dihasilkan jika tidak sebanding dengan keuntungan yang diinginkannya, (Endaryati, Soetrisno, Susilo, Sri, 2000). Sementara (Soekartawi, 2003) berpendapat bahwa fungsi produksi adalah hubungan antara dua variable, yaitu variabel Y dan variabel yang menjelaskan X, sehingga dapat diformulasikan sebagai:

$$Q=f(X_1, X_2, X_3, \dots, X_n) \dots \dots \dots (2.5)$$

Dimana :

Q = jumlah produksi

X_1, \dots, X_n = faktor-faktor produksi

(Dernberg, 1992) berpendapat, cirri-ciri dari fungsi produksi adalah sebagai berikut :

a. Produksi mengikuti pendapatan pada skala yang konstan (*Constant Return to Scale*) mengartikan setiap tambahan satu unit input maka akan mampu menambah atau menggandakan output yang dihasilkan perkelipatannya, atau setiap tambahan satu unit input maka akan mampu menaikkan output berlipat dua kali.

b. Dalam jangka panjang setiap tambahan satu unit masukan (input) sementara faktor lainnya tidak bertambah (tetap), maka ini akan dapat berakibat menurunnya tingkat produksi, sesuai dengan pada hukum hasil yang semakin berkurang (*The Law of Diminishing Return*).

Hukum kenaikan hasil yang semakin menurun (*The Law of Diminishing Return*) dapat dilihat pada gambar hubungan antar kurva TPP (*Total Physical Product*) atau kurva TP (Total Produk), kurva MPP (*Marginal Physical Product*) atau Marjinal Produk (MP), dan kurva APP (*Average Physical Product*) atau kurva TP (Total Produk), kurva MPP (*Marginal Physical Product*) atau Marjinal Produk (MP), dan kurva APP (*Average Physical Product*) atau produk rata-rata dalam grafik fungsi produksi (Miller dan Meiners, 2000).

(Soekartawi, 2003) Untuk meningkatkan hasil produksi dapat dilakukan dengan mengurangi atau menambah input atau output, dengan cara :

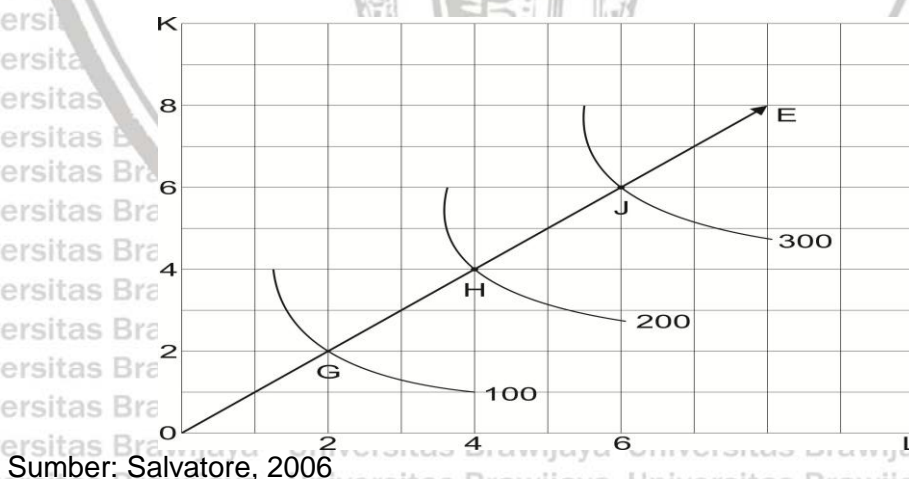
- Menambah jumlah salah satu dari input yang digunakan
- Menambah beberapa input (lebih dari input yang digunakan).

Sebagaimana yang diketahui, produktivitas yang dihasilkan adalah menggambarkan dari mengkombinasikan penggunaan faktor-faktor produksi dan ini tergambar pada hasil produk marginalnya. Untuk mendapatkan produk marginal dengan cara tambahan atas produksi yang dihasilkan sebagai akibat dari adanya penambahan kuantitas faktor produksi yang dipergunakan. Namun

demikian Produk marginal tidak selalu pada posisi *law of diminishing returns*, yaitu dimana setiap penambahan hasil dikarenakan adanya penambahan input variabel. *law of increasing returns*, yaitu hukum pertambahan hasil produksi yang semakin besar. Dimana semakin banyak tambahan factor produksi yang dipergunakan maka akan meningkatkan produksi yang dihasilkan, ini yang disebut dengan penambahan hasil yang konstan. Dapat diilustrasikan apabila penambahan variabel X akan meningkatkan produksi Y. (Sudarsono, 1984).

Skala pertambahan hasil yang konstan (*Constant return to scale*) atau CRS adalah berkenaan dimana setiap penambahan faktor produksi dalam jumlah tertentu, maka akan meningkatkan jumlah produksi lebih besar dalam jumlah yang tertentu pula. Artinya apabila penggunaan faktor produksi X dinaikkan sebesar 10% baik berupa tenaga kerja, bibit, pupuk, dll, maka produksi akan ikut naik lebih dari 10%, (Salvatore, 2006). Kondisi CRS tersebut dapat dilukiskan dengan gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.2:
Skala Pertambahan Hasil Yang Konstan



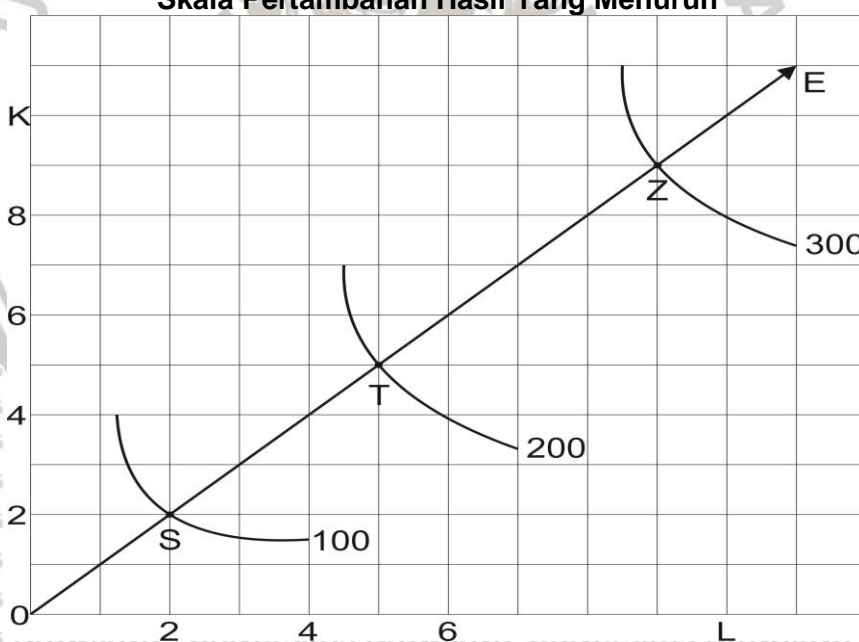
Sumber: Salvatore, 2006

Berdasarkan Gambar 2.2, dapat dijelaskan terdapat hasil yang konstan atas skala produksi. Dimana bila produksi sebesar OG yaitu dengan memakai 2L

dan 2K lalu apa bila kita akan menaikkan produksi dua kali lipatya sebesar OH, maka kita dapat menambah faktor produksi sebesar 4L dan 4 K. Jadi jelas bahwa jika kedua input dilipatgandakan maka akan menaikkan produksi dua kali lipatya. Demikian seterusnya untuk produksi OJ.

Skala pertambahan hasil yang menurun (*Decreasing returns to scale*) atau DRS adalah apabila input (factor produksi) ditambah dengan porsi yang lebih kecil maka output bertambah dengan proporsi yang lebih kecil pula, seperti ditunjukkan dalam gambar 2.3. yang menggambarkan hasil skala produksi yang menurun. Di mana pada kasus ini, bila perusahaan ingin melipatgandakan output per unit waktu, maka perusahaan harus mau melipatgandakan penggunaan inputnya per unit waktu dengan lebih dari dua kali lipat. Jadi, $OS < ST < TZ$.

Gambar 2.3:
Skala Pertambahan Hasil Yang Menurun



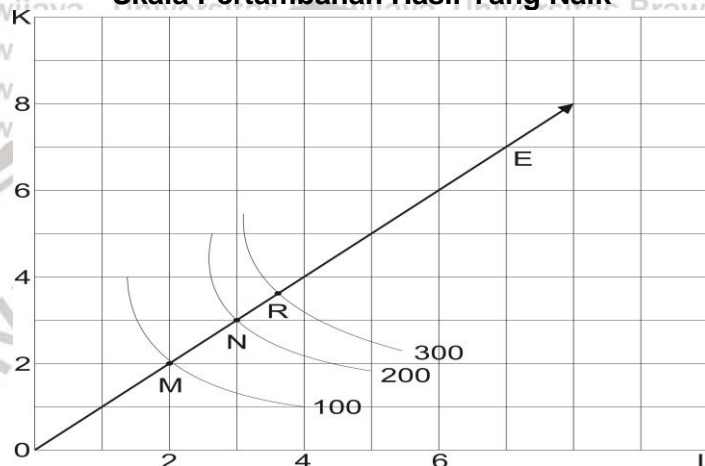
Sumber: Salvatore, 2006

Salvatore, (2006) berpendapat hukum pertambahan hasil yang selalu naik atau IRS (*Increasing returns to scale*) adalah suatu kegiatan yang apabila semua

faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lainnya dinaikkan dengan proporsi 10 %, maka akan menghasilkan produksi (output) meningkat lebih dari 10%. Artinya jika suatu kegiatan faktor produksi dilipatgandakan, maka hasil produksi yang dihasilkan akan bertambah lebih dari dua kali lipatnya.

Kondisi IRS tersebut dapat dilukiskan dengan gambar 2.3 berikut.

Gambar 2.4:
Skala Pertambahan Hasil Yang Naik



Sumber: Salvator, 2006

Berdasarkan gambar 2.4 terlihat bahwa bila faktor produksi (input) dinaikkan dengan porsi tertentu maka produksi (output) akan menghasilkan kenaikan produksi dengan proporsi (jumlah) yang lebih besar pula. Jadi $OM > MN > RN$. Namun terjadi suatu situasi dimana harga faktor produksi relatif tidak berubah (tetap) maka produksi (output) meningkat sepanjang garis OE.

Dalam Tata Kelola Pertanian, Tingkat produktifitas juga dipengaruhi oleh faktor produksi, seperti pemakaian teknologi untuk pemupukan, dimana pemupukan harus digunakan dengan baik dan benar, dengan teknologi maka kegiatan pemupukan akan terukur dengan baik. Dimana satuan pemupukan yang benar telah diatur oleh dinas pertanian yang memberikan arahan agar menggunakan pupuk dengan pemakaian yang tepat ukurannya. Karena dengan

pemakaian pupuk yang salah (tidak mengikuti teknologi yang dianjurkan), ini akan berakibat pada produktivitas per satuan lahan dapat menjadi berkurang.

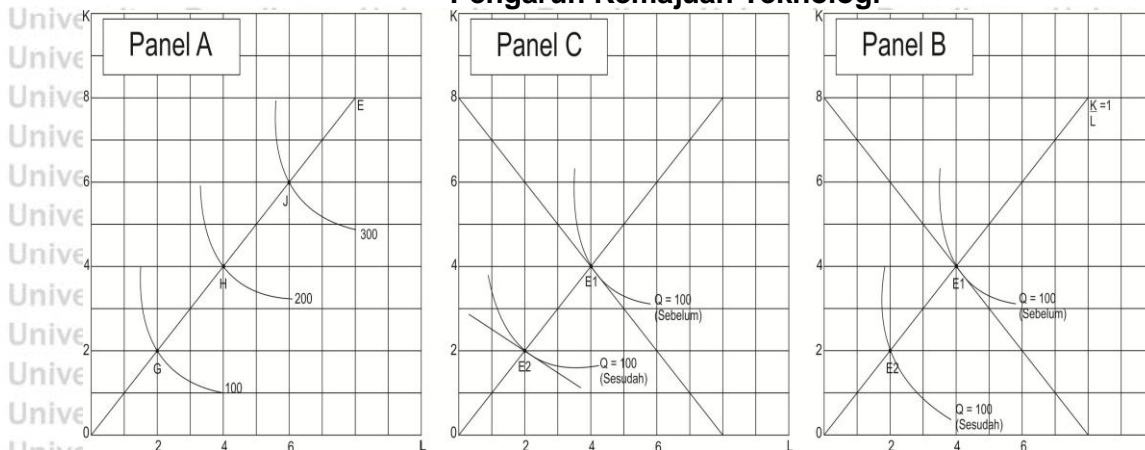
Dengan penggunaan pupuk yang tidak sesuai dosis tersebut maka dapat berakibat produksi akan berkurang. Oleh karena itu perlu diketahui kapan dan bagaimana faktor produksi tersebut dapat digunakan, sehingga dapat menghasilkan produksi yang maksimal. Anggapan ini adalah untuk menggambarkan semua diputuskan bahwa produsen berusaha menginginkan hasil dan keuntungan yang maksimal (Budiono, 2002). Perbaikan teknologi mengakibatkan kenaikan produktivitas.

Kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap tingkat kenaikan produktivitas, dimana input digambarkan bergerak menuju titik nol dari isokuan yang mengaju pada setiap produksi. Ini menggambarkan bahwa setiap produksi juga dapat dilakukan dengan pemakaian input yang lebih sedikit. Atau juga produksi dapat dilakukan dengan tingkat pemakaian faktor produksi yang sama. Jadi disini dapat digambarkan bahwa bahwa setiap tingkat produksi yang dihasilkan dan dapat diproduksi dengan menggunakan pemakaian input yang lebih sedikit, Atau produksi yang dihasilkan dapat dengan cara pemakaian faktor produksi yang sama. Artinya sudah tergambar jelas bahwa teknologi manaju akan berada pada posisi netral, atau sebaliknya pemakaian padat modal dan padat karya (*labor-using*) tergantung pada besarnya MP_K meningkat dalam proporsi yang sama, proporsi yang lebih besar, atau proporsi yang lebih kecil daripada MP_L . Gambar 2.4 menggambarkan penggunaan teknologi maju yang bersifat netral dalam panel A, padat modal dalam panel B, dan padat tenaga kerja dalam panel C. Karena kemajuan teknologi yang sama netral menaikkan MP_K dan MP_L dalam proporsi yang sama, $MRTS_{LK} = MP_L / MP_K$ kemiringan isokuan tetap konstan pada titik E_1 dan titik E_2 , menuju titik nol sepanjang garis

$K/L = 1$ seperti ditunjukkan dalam panel A. $Q = 100$, sekarang dapat diproduksi dengan 2L dan 2K, bukan 4L dan 4K. Disamping itu karena kemajuan teknologi pada modal meningkat MP_K secara proporsional lebih dari MP_L , sehingga kemiringan absolute isokuan akan menurun bila isokuan bergeser menuju titik nol sepanjang garis $K/L = 1$, seperti ditunjukkan dalam panel B, (Salvatore, 2006).

Selanjutnya, disamping pemakaian teknologi maju, Tata Kelola Pertanian dapat juga menggunakan sistem yaitu Padat Karya (padat tenaga kerja), dimana padat tenaga kerja ini sistemnya bertolak belakang dari pemakaian sistem kemajuan teknologi. padat Karya seperti ditunjukkan dalam panel C. Dimana teknologi maju pada modal kadang-kadang disebut sebagai penambahan modal (*K-deepening*) atau dan tentunya akan terjadi posisi penghematan tenaga kerja (*L saving*) karena dengan menggunakan teknologi maju, akan menyebabkan lebih banyak modal yang digunakan untuk membeli berbagai peralatan yang lebih maju. Dan nantinya di dalam produksi tenaga kerja banyak yang tidak digunakan dan digantikan dengan tenaga mesin yang lebih efisien. Disini digunakan lebih banyak modal untuk membeli teknologi tersebut. Demikian pula, kemajuan teknologi padat tenaga kerja (*L-using*) disebut sebagai penambahan tenaga kerja (*L-deepening*) atau penghematan modal (*K saving*).

Gambar 2.5:
Pengaruh Kemajuan Teknologi



Sumber: Salvatore, 2006

Ukuran kenaikan produktivitas dicari pada kenaikan produk rata-rata atau jumlah marginal. Perubahan teknologi dapat mengubah intensitas penggunaan faktor produksi yaitu menjadi lebih padat modal atau lebih padat karya tergantung dari perbandingan kenaikan produktivitas dari masing-masing input (Sudarsono, 1984).

Untuk memproduksi satu tingkat output tertentu, dapat digunakan berbagai kombinasi input. Kombinasi ini dilakukan sebagai kurva isokuan (*isoquant*) (Samsubar, 2000). Suatu isokuan menunjukkan kombinasi yang berbeda dari tenaga kerja (L) dan barang modal (K) yang memungkinkan. Untuk dapat menggambarkan fungsi produksi secara jelas dan menganalisis peranan masing-masing faktor produksi maka dari sejumlah faktor-faktor produksi tersebut satu faktor dianggap sebagai variabel dan faktor lainnya dianggap faktor tetap (Mubyarto, 1977). Misalnya untuk menganalisis hubungan produksi padi dengan tanah, maka faktor lain seperti tenaga kerja, bibit, modal dianggap konstan. Hubungan fungsional seperti digambarkan di atas berlaku pula untuk semua faktor produksi. Dari uraian di atas jelas bahwa hasil produksi (*output*), merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor produksi secara bersama-sama.

Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang optimal perlu mengkombinasikan faktor-faktor produksi tersebut secara tepat sehingga tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya baik secara fisik maupun secara ekonomi (Mubyanto, 1977).

Apabila ada persaingan sempurna dipasar faktor produksi dan hasil produksi, maka petani akan berbuat rasional dan mencapai efisiensi tertinggi bila faktor produksi itu sudah dikombinasikan sedemikian rupa sehingga rasio dari tambahan hasil fisik (*marginal physical product*) dari faktor produksi dengan harga faktor produksi sama untuk setiap faktor produksi yang dipergunakan. Dalam rumus matematik sederhana dituliskan (Mubyarto, 1977).

$$\frac{HsPPx_1}{Hrx_1} = \frac{HsPPx_2}{Hrx_2} = \frac{HsPPx_3}{Hrx_3} \dots \dots \dots (2.6)$$

Dimana $HsPPx_1$, $HsPPx_2$ dan $HsPPx_3$ adalah tambahan hasil produksi fisik karena tambahan satu satuan faktor produksi. Untuk mencapai keuntungan maksimal masing-masing harus dikalikan dengan harga hasil produksinya, sehingga akan diperoleh persamaan :

$$Hry \frac{HsPPx_1}{Hrx_1} = Hry \frac{HsPPx_2}{Hrx_2} = Hry \frac{HsPPx_3}{Hrx_3} \dots \dots \dots (2.7)$$

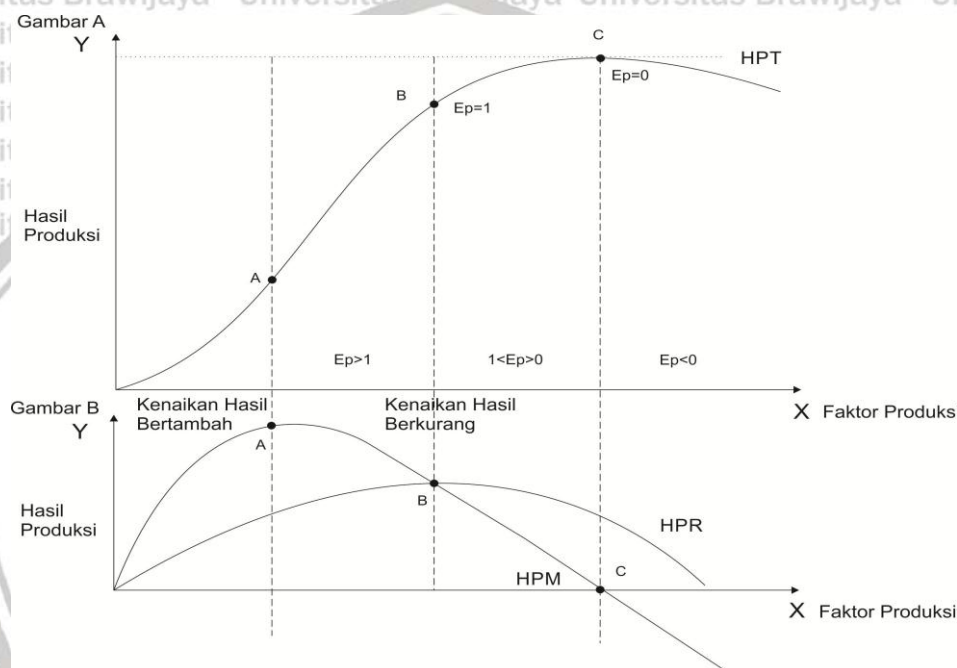
Dimana Hry adalah harga hasil produksi.

Penambahan faktor produksi tidak selalu memberikan hasil yang optimal, dan hukum alam tak dapat dielakkan, hakekatnya kenaikan hasil yang semakin berkurang, bagi semua faktor produksi. Pada gambar 2.5 dilukiskan tahapan kenaikan produksi yang berkaitan dengan hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Pada gambar A menunjukkan bahwa produksi total (HPT) bergerak pada titik 0 menuju titik A, B, C. Gambar B menunjukkan sifat-sifat dan gerakan kurva hasil produksi rata-rata (HPR) dan hasil produksi marginal (HPM).

Keduanya mempunyai hubungan yang erat, ketika kurva HPT mulai berubah

arah pada titik A, maka kurva HPM mencapai titik maksimum, dan batas ini mulai berlaku hukum kenaikan hasil yang semakin berkurang. Titik B adalah titik dimana kurva HPM mempunyai arah paling besar, yang menunjukkan hasil produksi rata-rata (HPR). Mencapai maksimum dimana kurva HPT memotong kurva HPR.

Gambar 2.6:
Kenaikan Hasil Bertambah dan Semakin Berkurang



Sumber: Mubyarto, 1977

Titik C adalah titik dimana kurva HPT mencapai maksimum, dimana kurva HPM memotong sumbu X yaitu pada saat HPM menjadi negatif. Elastisitas produksi merupakan persentase perubahan hasil produksi total dibagi dengan persentase perubahan faktor produksi, sehingga dapat ditulis sebagai :

$$Ep = \frac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X} \text{ atau } \left(\frac{X}{Y}\right) \left(\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right) \dots \dots \dots (2.8)$$

Dimana Y adalah hasil produksi (*output*) dan X adalah faktor produksi (*input*).

Karena $\frac{Y}{X}$ adalah HPR, dan $\frac{HY}{\Delta X}$ adalah HPM, maka $E_p = \frac{HPM}{HPR}$

Ketika $HPM = HPR$ yaitu ketika HPM memotong kurva HPR pada titik maksimum B maka $E_p = 1$. Disebelah kiri titik ini dimana $HPM > HPR$ maka $E_p > 1$, dan disebelah kanan dimana $HPM < HPR$, maka $E_p < 1$. Oleh karena itu selama E_p masih lebih besar dari satu maka masih ada kesempatan bagi petani untuk mengatur kembali kombinasi penggunaan faktor produksi sedemikian rupa sehingga diperoleh hasil yang optimal (Mubyarto, 1977).

2.1.3. Biaya Produksi

Menurut Koutsoyiannis (1976) dalam skala ekonomi dibedakan

- Ekonomi riil, dimana ekonomi riil adalah dimana suatu perusahaan dalam berproduksi harus dapat meminimalkan biaya produksi dengan cara menekan penggunaan faktor produksi yang tersedia, seperti jumlah input, bahan baku, tenaga kerja serta berbagai jenis modal (biaya tetap dan biaya variabel) dengan agar dapat menghasilkan produksi yang maksimal dengan lebih efektif dan efisien.
- Penghematan keuangan. Disini diharapkan dari departemen keuangan perusahaan lebih bijak di dalam menggunakan keuangannya, berupa penghematan keuangan dimana perusahaan di dalam memperoleh faktor produksi dapat mencari kombinasi harga yang lebih rendah, sehingga dapat menekan biaya produksi, seperti diskont bahan baku, dll. Hal lainnya berupa meluaskan pangsa pasar (pendistribusian produk) ke daerah yang lebih luas sehingga akan meningkatkan penjualan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan

Sementara itu Biaya Tetap (*Fixed Cost*) adalah Dimana semua biaya yang bersifat tetap dan tidak berubah dan tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya atas jumlah produksi yang dihasilkan (Cramer dan Jensen, 1991).

Sebaliknya Biaya Variabel (*Variable Cost*) adalah semua biaya yang terus berubah berubah sebanding dengan besar kecilnya produksi yang dihasilkan, dan ini akan berdampak pada operasi perusahaan di dalam memperoleh laba.

Menurut Koutsoyiannis (1979), Ekonomi Riil terbagi dalam beberapa tipe, yaitu :

- Ekonomi Produksi
- Ekonomi Pemasaran
- Ekonomi Manajemen
- dan Ekonomi transportasi dan penyimpanan.

Bila dilihat secara lebih mendalam Ekonomi Produksi muncul dari :

- 1). Faktor tenaga kerja,
- 2) Modal, dan
- 3) Kebutuhan investasi dari rumah tangga produksi.

Pertama, sebagaimana diketahui bahwa Tenaga Kerja diharapkan dapat melakukan efisiensi tenaga kerja agar tercapai output yang maksimal, adapun yang mempengaruhinya factor-faktor pendukung untuk terciptanya efisiensi tersebut adalah:

- Keahlian tenaga kerja, yaitu diharapkan tenaga kerja yang mempunyai keahlian yang tinggi (*Hight Skill*), sehingga akan dapat penghematan

waktu pengerjaan dan kualitas produk, dimana apa yang dikerjakan telah sesuai dengan yang direncanakan,

- Proses produksi yaitu proses produksi yang cepat dan tepat, dengan menggunakan sistem otomatis, sehingga akan meningkatkan volume kumulatif baik *input* maupun *output*.

Skala produksi yang berskala besar dikenal dengan (*continuous process*), dimana cirri-cirinya adalah sifat produksinya standar, diproduksi dalam jumlah yang besar (massa), menggunakan mesin yang khusus (*special machines*). Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan pembagian serta perencanaan tenaga kerja yang baik dan benar dan spesialisasi tenaga kerja dibidangnya masing-masing, yang pada akhirnya tenaga kerja akan dapat bekerja dengan tingkat produksi tinggi dan dalam jangka panjang akan dapat mencipta penurunan biaya produksi rata-rata.

Kedua, di dalam Ekonomi Produksi, faktor modal merupakan hal yang cukup penting, dimana modal yang ada dapat digunakan untuk membayar gaji karyawan, namun dapat juga digunakan untuk penggunaan yang berkaitan dengan modal (*fixed capital*), seperti digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan produksi. Pada Tata Kelola Petanian, Faktor Modal bagi petani adalah Lahan Pertanian itu sendiri yang dikombinasikan dengan peralatan sederhana (saprodi) yang dimilikinya.

Penghematan modal dapat tercapai melalui :

- Spesialisasi modal dan tidak terjadinya pembagian modal, dengan spesialisasi modal, maka modal hanya digunakan untuk keperluan yang semestinya, agar dapat menghasilkan produksi yang lebih tinggi.

- Biaya-biaya pengadaan bahan baku dan bahan pembantu
- Biaya-biaya tetap awal
- Volume teknis, dan
- Kebutuhan kapasitas cadangan.

Ketiga, investasi (*stochastic economies*). Dalam berproduksi perusahaan memerlukan investasi, dapat berwujud investasi dalam bentuk cash, yang digunakan untuk membayar gaji, membeli persediaan, dll. Perusahaan juga memerlukan Investasi dalam bentuk asset tetap seperti mesin, dan lainnya.

Asset tetap dapat berbentuk asset yang dapat bergerak (seperti mobil) dan yang tidak bergerak seperti Tanah dan Bangunan.

Perusahaan di dalam menjalankan aktivitasnya seperti memproduksi barang dan jasa selalu dihadapkan dalam hal ketidak pastian, apakah ketidak pastian itu datanganya dari persediaan bahan baku (jumlah dan pesanan datang tepat waktu), tenaga kerja, Pesanan Konsumen, dll. Dimana dari ketidak pastian produksi tersebut dapat berupa jumlah permintaan naik atau jumlah permintaan menurun. Oleh karena itu disini peran seorang mananjer sangat diharapkan, untuk mampu melakukan penyesuaian (bahan baku, tenaga kerja, dll) di dalam ra maksimal produksinya. Manajer di tuntutan mampu untuk melakukan skala prioritas, hal mana yang harus didahulukan dan hal mana yang bisa ditunda, agar kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar.

Dalam Proses Produksi, suatu perusahaan dihadapkan pada penggunaan Faktor Produksi (bahan baku, tenaga kerja, mesin, dll) dan kebijakan pimpinan perusahaan di dalam menggunakan teknologi, yang semuanya itu adalah dalam rangka meningkatkan produktivitas.

Menurut Varian, (1996), Perusahaan yang menggunakan kebijakan menggunakan teknologi dalam proses produksinya, dalam jangka panjang akan dapat meningkatkan (*increasing*) produksi, menurunkan (*decreasing*) produksi atau mempertahankan (*constan*) produksi *increasing return to scale*.

Perusahaan atau sektor rumah tangga yang melakukan kegiatan produksi menggunakan kebijakan peningkatan input sebesar satu satuan, maka diharapkan dengan kegiatan tersebut akan mampu menghasilkan output sebesar dua kali lipatnya. Perusahaan diharapkan dengan menggunakan teknologi yang tepat, akan mampu memproduksi dengan cepat dan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Jadi pada intinya dengan menggunakan teknologi, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan produksinya. Hal tersebut tentu tergantung kepada skala dari skala operasi perusahaan atau rumah tangga produksi pada berbagai level produksi. Bagaimana perusahaan dan sektor rumah tangga tersebut menggunakan Faktor Produksi (Tenaga Kerja, Modal, dll) akan dapat meningkat produksi pada level kurang cepat, cepat dan lebih cepat.

2.1.4 Biaya Transaksi

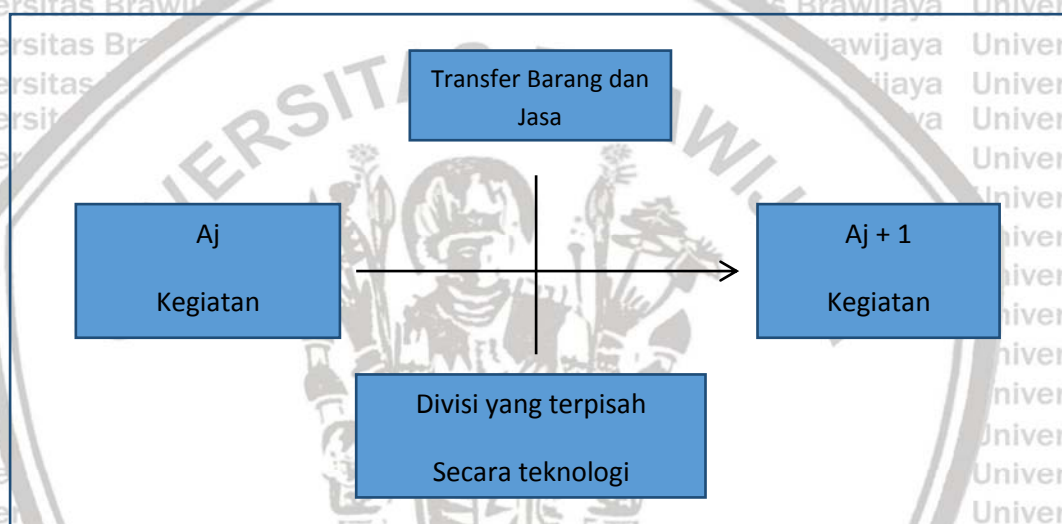
Biaya Transaksi dapat dijadikan sebagai salah satu alat analisis, beberapa definisi menurut para ahlinya, yaitu : (Williamson, 1981; Mc Cann dan Easter 2002; dan Furubothn dan Richter, 2000), transaksi dapat terjadi bila barang dan jasa di transfer dan dilakukan dengan menggunakan kemampuan teknologi secara terpisah. Dimana pada tiap tahapan proses saling mendukung, tahap aktivitas yang satu prosesnya berhenti dan proses pada tahap lain dimulai. Selanjutnya Coase (1988) mendefenisikan bahwa jika suatu pekerjaan pindah dari departemen A ke departemen B, dan sebab perpindahan tersebut bukan karena perubahan harga relative, tapi perpindahan tersebut memang harus dilakukan untuk hal yang lebih menguntungkan. Dan Commons

(1932) menyatakan bahwa suatu aktivitas kegiatan akan berakhir pada sebuah aktivitas lain yang setidaknya harus mengandung ketiga unsure, yaitu :

- Konflik (*conflict*),
- Saling menguntungkan (*mutually*),
- dan Keteraturan (*order*).

Dan unit itu tidak lain adalah transaksi (Beckman, 2000)

Gambar 2.7. :
Proses Koordinasi Transaksi.



Sumber: Backmann 2000 dalam Yustika 2012

Dalam banyak Literatur ilmu ekonomi, mendefinisikan beragam pula tentang biaya transaksi, dimana sebagian besar penulis, dimana para ahli tersebut lebih menggantungkan pada definisi-definisi yang sesuai dengan konseptualisasi teoritis atau yang konseptualisasi yang relevan dengan kasus empirisnya.

Pada masa-masa awal Coase mendefinisikan Biaya Transaksi sebagai biaya mengorganisasikan transaksi telah diuji dan dikonsep ulang untuk merefleksikan biaya-biaya yang terjadi dalam situasi yang spesifik. Misalnya Coase lebih menekankan biaya transaksi untuk menggambarkan conceptualisasi

kembali kemasaalah eksternalitas dan juga di dalamnya termasuk aspek koordinasi hubungan antar manusia (*coordinating human interaction*). Disamping itu beragam persoalan biaya transaksi, sehingga mengharuskan beberapa definisi yang diberikan juga digambarkan sangat umum sehingga ini akan menyulitkan untuk mengaplikasikan dalam kasu-kasus empiris (Yustika, 2012).

Seperti yang didefinisikan oleh Williamson, biaya transaksi adalah segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sistem ekonomi (*the costs of running the economic system*) dan segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan (*cost to a change in circumstances*), Definisi dari (Dorman, 1981; Challen, 2000) yang dikutip oleh (Mburu, 2002). Seterusnya North (1991) mendefinisikan biaya transaksi adalah segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menspesifikasikan dan memaksakan (*enforcing*) kontrak agar terjadinya, dengan demikian biaya transaksi sendirinya dapat mencakup semua biaya, baik itu biaya organisasi politik dan biaya ekonomi yang memungkinkan dari kegiatan kegiatan ekonomi tersebut akhirnya mendapatkan laba dari perdagangan (pertukaran).

Dari pendapat para ahli tersebut, Biaya Transaksi dapat disimpulkan adalah segala biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk serangkaian aktivitas, seperti kegiatan untuk melakukan negosiasi, kegiatan mengukur dan memaksakan pertukaran (*exchange*).

Namun demikian menurut Mburu (2002), Biaya Transaksi dapat juga diartikan adalah biaya-biaya yang tergolong dalam tiga kategori yang lebih luas seperti di bawah ini :

1. Biaya-biaya yang yang dikeluarkan dalam rangka pencarian dan informasi
2. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan negosiasi (*Bargaining*) dan keputusan untuk melakukan mengeksekusi kontrak

3. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk kegiatan pengawasan (*monitoring*), pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (*kompliance*).

Dilihat lebih dalam dan detail, proses negosiasi itu sendiri dapat sangat panjang dan memakan biaya yang besar. Dimana seluruh pelaku yang terlibat di dalam pertukaran terpaksa harus melakukan kegiatan tawar-menawar antara pihak yang satu dengan yang lainnya. Seperti halnya yang sering terjadi di dalam perusahaan, Serikat pekerja, dimana pihak manajemen yang mewakili perusahaan hendaknya secara periodik, terus melakukan proses negosiasi kepada pihak pekerja dan untuk seterusnya melakukan pengukuran (*measurement*) dalam rangka untuk mengukur biaya yang sangat mahal yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena ini akan menyangkut secara langsung kepada harga suatu barang dan jasa yang hendak diperjual-belikan. Dari akibat Kekurangan informasi inilah yang nantinya dapat menimbulkan tambahan biaya transaksi (biaya yang tidak diharapkan).

Terakhir, bila proses pertukaran yang akhirnya akan mengakibatkan timbulnya biaya transaksi. Bila dalam proses pertukaran itu memaksakan pertukaran dapat dilakukan jalan keluar baik yang bermuara pada kesepakatan bersama, maka untuk biaya transaksi dapat ditekan. Namun apabila yang terjadi sebaliknya tidak seperti yang diinginkan, dimana di dalam proses tersebut, masih harus dilakukan mekanisme pemaksaan agar menjamin proses pertukaran bisa berlangsung, tentu saja ini akan mengakibatkan biaya transaksi tetap harus dikeluarkan (Yustika, 2012).

(Furubotn dan Richter, 2002) dalam Yustika (2012) memaknai bahwa biaya transaksi adalah segala biaya dikeluarkan agar sistem ekonomi dapat berjalan dengan baik dan lancar (1969). Adapun Biaya transaksi dapat digolongkan seperti : biaya rutin dalam kegiatan sehari-hari, biaya pendirian

perusahaan, biaya pemeliharaan ataupun biaya perubahan mendesain suatu sistem dasar dari suatu model kelembagaan.

Selanjutnya tipe biaya transaksi adalah :

A. Biaya menggunakan pasar (*Market Transaction Cost*) adalah semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan/petani mandiri agar barang/jasa bisa

sampai ke pasar, mencakup:

a. Biaya-biaya mempersiapkan kontrak (biaya pencarian informasi dan biaya pengadaan atau mendapatkan informasi)

b. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk memutuskan kontrak pada pihak ketiga, seperti biaya negosiasi dan biaya pengambilan keputusan

B. Biaya Manajerial (*Managerial Transaction Cost*). Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan Pengawasan (*monitoring*) dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemaksaan kewajiban yang ada dalam kontrak biaya, agar dapat melakukan hak untuk melakukan pesanan (*order*) di dalam perusahaan.

C. *Political transaction cost*, Seluruh biaya yang terkait dalam rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan dalam suatu perusahaan

Dari ketiga tiga jenis biaya transaksi tersebut dapat digolongkan menurut dua tipe :

1. Biaya transaksi tetap (*fixed transaction costs*) yaitu investasi spesifik yang disusun dalam rangka mencapai kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangements*)

2. Biaya transaksi variabel (*variable transaction costs*), yaitu biaya transaksi yang dikeluarkan tergantung kepada besar jumlah dan volume transaksi yang terjadi.

Pada poin ini, jika dilihat sepintas lalu, sifat dari biaya transaksi sama dengan biaya produksi, dimana pada biaya transaksi juga mengenal dan mengenalisa biaya tetap dan biaya variabel, namun sifatnya analisisnya lebih mendalam. Dimana dalam biaya transaksi untuk mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel tidak semudah apabila membandingkannya dalam biaya produksi (Yustika, 2012).

2.1.4.1. Biaya Transaksi Pasar (*Market Transaction Cost*)

Secara spesifik, biaya transaksi pasar (*market transaction costs*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan transaksi pertukaran di pasar, bisa dikelompokkan secara lebih rinci sebagai:

1. Biaya mempersiapkan kontrak, dimana bila dilihat secara sempit, biaya ini dapat digolongkan sebagai biaya untuk pencarian informasi pasar.
2. Biaya mengeksekusi kontrak (*concluding contract*), yang termasuk didalam biaya mengeksekusi kontrak ini adalah biaya negosiasi dan biaya di dalam rangka pengambilan keputusan.
3. Biaya pengawasan (*monitoring*) dan biaya pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak (*enforcing the conceptual obligations*).

(Coase, 1937) mendefinisikan biaya transaksi sebagai biaya yang dipergunakan untuk terciptanya mekanisme harga, dimana di dalamnya terdiri dari biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menemukan harga relevan, dan biaya yang dikeluarkan untuk negosiasi kontrak” dan “biaya-biaya lainnya seperti biaya sumberdaya yang digunakan untuk penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan pertukaran institusi dan organisasi” di mana seluruh biaya tersebut meliputi biaya untuk mendefenisikan ukuran sumberdaya atau klaim, biaya untuk penggunaan dan untuk penegakan hak yang ditentukan, dan biaya informasi.

Menurut (Williamson, 1985) sebagai salah satu ahli ternama ekonomi kelembagaan berpendapat bahwa, transaksi adalah suatu proses transfer atau perpindahan barang dari satu proses ke proses lainnya, dimana untuk kegiatan tersebut menggunakan teknologi yang terpisah. Pada proses ini terjadi, dimana satu proses selesai dan proses berikutnya dimulai. Selanjutnya oleh (Williamson, 1985) berpendapat bahwa biaya transaksi dapat meliputi biaya *ex ante* yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk drafting, negosiasi, perlindungan dan perjanjian, dan biaya *ex post* meliputi biaya *governance*, yaitu biaya ikatan dalam rangka untuk mendapatkan komitmen.

Sementara (Alchian dan Woodward, 1986) mendefinisikan biaya transaksi adalah segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk terjadinya transaksi pertukaran yang di dalamnya melibatkan transfer hak properti dan kontrak transaksi yang di dalamnya melibatkan biaya negosiasi dan biaya penegakan janji. Sementara (Arrow, 1969) dalam (Williamson, 1985) menjelaskan biaya transaksi adalah sebagai suatu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk menjalankan sistem ekonomi.

Dilain sisi, banyak para ahli berpendapat dan mendefinisikan tentang biaya transaksi dari berbagai studi yang dilakukan, bahwa biaya transaksi adalah segala biaya dikeluarkan dalam rangka untuk pengolahan dan penyampaian informasi, koordinasi, pembelian, pemasaran, iklan, penjualan, penanganan masalah legal, pengiriman, dan manajemen dan pengawasan (Wallis dan North, 1986).

Sementara (Matthews, 1986), berpendapat bahwa biaya transaksi sebagai suatu kebalikan terhadap biaya produksi, dimana ia memandang sebagai biaya pelaksanaan sebuah kontrak, yang di dalam biaya transaksi tersebut terdapat biaya menyelenggarakan kontrak *ex ante* dan pemantauan *ex post*.

Oleh (Barzel 1997) mendefenisikan bahwa biaya transaksi adalah segala biaya yang dikeluarkan yang terkait dengan kegiatan transfer, dan dalam rangka mendapatkan serta melindungi hak. Selain itu (Eggertsson, 1990) juga memberikan definisi yang lain yaitu bahwa biaya transaksi adalah segala biaya yang muncul dari suatu kegiatan dimana ketika individual melakukan hak terhadap kepemilikan suatu aset ekonomi dan menegakkan segala bentuk hak eksklusif mereka. Dan menurut (Chandler dan Hikino, 1990) Biaya transaksi adalah biaya yang terlibat dalam mentransfer barang dan jasa dari satu operasi ke operasi lainnya, dimana di dalamnya juga melibatkan transfer hak transfer hak properti dan didefinisikan dalam bentuk kontraktual. Kemudian menurut (Milgrom dan Roberts, 1992) biaya lainnya adalah Biaya Menjalankan Sistem : yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melakukan koordinasi dan memotivasi. Sementara definisi biaya Biaya transaksi menurut (Eggertson, 1990). Adalah biaya yang timbul di dalam di pabrik dan biaya tersebut tidak mudah dipisahkan dari biaya produksi.

Segala biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penyelesaian pertukaran, dimana biaya tersebut yang berhubungan dengan transfer objek fisik dan informasi, dan dimana di dalamnya juga termasuk biaya pemesanan/invoicing Penyelesaian/clearing, transportasi, pergantian aktivitas misalnya Pendidikan dan Pelatihan, integrasi, dan hubungan manajemen, dan informasi dan fisik (penyelesaian, *clearing* dan sebagainya), demikian itu definisi Biaya Transaksi menurut (Suematsu dan Ikeda, 2006).

(North, 1991) mendefinisikan biaya transaksi sebagai : segala biaya yang dilakukan untuk menspesifikasikan dan memaksakan kontrak (*enforcing*) yang mendasari pertukaran, dimana didalamnya mencakup biaya-biaya organisasi dilihat dari segi politik dan ekonomi dimana kegiatan tersebut akhirnya perusahaan mendapatkan laba perdagangan (pertukaran).

Menurut (Mburu, 2002) dalam (Yustika, 2012) Biaya Transaksi dalam arti yang lebih luas dapat juga diartikan dengan memasukkan tiga kategori sebagai berikut, yaitu:

1. Biaya pencarian dan informasi, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencari informasi pasar, dll
2. Biaya negosiasi (*bargaining*) dan keputusan atau mengeksekusi kontrak, biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan negosiasi dan mengeksekusi kontrak.
3. Biaya pengawasan (*monitoring*), biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk pemaksaan, dan pemenuhan/pelaksanaan (*compliance*).

2.1.4.2 Biaya Transaksi Manajerial (*Managerial Transaction Cost*)

Biaya Transaksi Manajerial adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka menciptakan keterkaitan dan dengan upaya menciptakan keteraturan. Biaya Transaksi Manajerial (*Managerial Transaction Cost*) meliputi:

1. Biaya penyusunan (*setting up*), Biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk pemeliharaan (*maintenance*), atau biaya yang dikeluarkan untuk perubahan desain organisasi. Dimana ongkos ini juga dikaitkan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal dikategorikan masuk ke dalam *fixed transaction cost*
2. Biaya menjalankan organisasi, dimana biaya ini dapat dipilah dalam dua sub kategori :
 - a. biaya yang dikeluarkan untuk : biaya informasi dimana biaya ini digunakan untuk biaya membuat keputusan, Biaya pengawasan pelaksanaan, Biaya pengukuran kinerja pekerja, Biaya agensi, Biaya manajemen informasi, dan sebagainya.
 - b. Segala biaya yang diasosiasikan dengan mentransfer fisik barang dan jasa yang bagian-bagiannya terpisah (*across a separable interface*).

Sebagai contoh : Biaya waktu menganggur (*idle*) dalam proses produksi barang setengah jadi (*semi-finish*), biaya-biaya yang dikeluarkan untuk transport di dalam perusahaan dan sebagainya.

2.1.4.3 *Political Transaction Cost*

Secara umum biaya transaksi politik adalah biaya penawaran politik, dimana segala biaya yang dikeluarkan melalui tindakan kolektif (*collective action*) dan dapat dianalogikan dari biaya transaksi manajerial, Menurut (Furubothn dan Richter, 2000) dapat diartikan sebagai *Political Transaction Cost*

Disamping itu, ada juga serangkaian biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan (*political transaction cost*). Dimana *Political transaction cost* yaitu biaya yang dikeluarkan terkait untuk pembuatan tata aturan/kelembagaan (*public goods*) sehingga semua kegiatan transaksi pasar dan kegiatan manajerial bisa berlangsung dan berjalan dengan baik.

Meliputi :

1. Biaya penyusunan (*setting up*), adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan (*maintenance*), biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk melakukan perubahan organisasi politik formal dan informal, seperti: biaya penetapan kerangka hukum, struktur administrasi pemerintahan, militer, sistem pendidikan, pengadilan, dll.
2. Biaya menjalankan politik, yaitu dimana biaya yang dikeluarkan untuk masa sekarang yang berkaitan dalam hal-hal dengan tugas kekuasaan. Seperti: biaya legislasi, biaya pertahanan, biaya administrasi hukum, biaya pendidikan, dan termasuk juga biaya yang didalamnya dalam rangka untuk pencarian atau pengumpulan dan untuk seterusnya informasi tersebut diolah dalam rangka agar organisasi atau tata pemerintahan dapat berjalan. Seperti

biaya yang dikeluarkan untuk pelibatan masyarakat dalam proses politik termasuk ke dalam transaksi politik.

Dilain sisi (Kirchner and Picot, 1987) juga memberi definisi biaya transaksi adalah semua sumber daya yang harus dikeluarkan dalam rangka untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh semua pihak, yang semuanya itu dilakukan untuk pertukaran barang atau jasa antara dua atau lebih pihak. Untuk itu dikenal empat jenis biaya:

1. Biaya yang dikeluarkan dalam rangka mencari informasi: dimana biaya yang ditimbulkan atau dikeluarkan untuk memperoleh informasi mengenai barang dan jasa yang diinginkan dari pasar;
2. Biaya dalam rangka untuk membuat kontrak/negosiasi (*bargaining cost*): biaya yang diperlukan untuk menerima atau memaksa menerima suatu persetujuan/kontrak dengan pihak lain atas suatu transaksi;
3. Biaya monitoring: yaitu segala biaya pengawasan yang dikeluarkan dalam rangka mengawasi pihak ketiga di dalam melaksanakan suatu kontrak
4. Biaya adaptasi (selama pelaksanaan kesepakatan): biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya penyesuaian-penyesuaian kesepakatan akibat kesepakatan transaksi tersebut dilakukan

Biaya transaksi adalah cara lain dari (Black 2002) melihat dan menjelaskan pendekatan ekonomi kelembagaan dari sisi lain. Dimana biaya transaksi melakukan pertimbangan-pertimbangan manfaat di dalam melakukan transaksi dalam suatu organisasi dengan pelaku aktor (organisasi) yang berbeda dalam menggunakan mekanisme pasar. Dimana Biaya transaksi disini juga mempertimbangkan dari beberapa aspek penting lainnya dalam ekonomi yakni rasionalitas terbatas (*bounded rationality*), seperti : masalah informasi pasar, biaya negosiasi dalam melakukan kontrak dan *opportunism*.

(Schimd, 1987), melihat biaya transaksi atas tiga hal yakni :

1. Biaya informasi,
2. Biaya melakukan kontrak, dan
3. Biaya pengawasan atau penegakan hukum.

Dimana Schimd menjelaskan, biasanya disini selalu sering terjadi pemahaman yang keliru mengenai apa yang dimaksud dengan *transaction cost*.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan *transaction cost* tersebut bukan hanya terdiri dari biaya pertukaran (*cost of exchange*) atau atau biaya lainnya seperti biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan jual beli barang dan jasa (termasuk pelayanan), namun lebih dari itu, dimana *transaction cost* mempunyai pengertian lebih sebagai "*the cost of establishing and maintaining right*" (biaya membangun dan mempertahankan hak), dimana dalam hal ini biaya yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan hak kepemilikan (Allen, 1991).

Dalam pendapatnya yang lain (Williamson, 2010) menyatakan, bahwa konsep biaya transaksi terdiri dari :

- a. Perilaku oportunistik
- b. Rasionalitas terbatas;
- c. Ketidakpastian;
- d. Spesifisitas aset dan ;
- e. Frekuensi.

Dilain pihak menurut (Hobbs, 1996) pendekatan biaya transaksi di dasari pada ada empat konsep yakni :

1. Rasionalitas terbatas,
2. Informasi asimetris
3. Kekhususan asset
4. Oportunism

2.1.3. Biaya Transaksi dalam Pasar Input Output

Biaya transaksi di dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu :

- biaya *ex ante* yaitu biaya transaksi sebelum kontrak
- dan biaya *ex post* yaitu biaya transaksi setelah kontrak

Jadi Definisi di dalam biaya transaksi dalam penelitian ini mengikuti definisi dari (Arrow, 1969) dalam (Williamson, 1985), biaya transaksi yang dikeluarkan dalam rangka menjalankan sistem ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut tersiri dari sebelum dilakukan kontrak (*ex ante*) dan biaya transaksi setelah kontrak dilakukan. Atau biaya transaksi pada pasar input dapat juga dianalogkan dengan *ex ante* dan biaya transaksi di pasar output dianalogkan dengan *ex post*.

Biaya transaksi petani yang terjadi terjadi pada pasar input dan pasar output menurut (Williamson dalam Frank dan Henderson, 1992) akan berakibat dapat meningkatkan kompleksitas, frekuensi dan ketidakpastian dalam melakukan transaksi dimana di dalamnya juga disertai dengan investasi idiosinkratik yang akan menghasilkan sebuah perubahan dalam struktur koordinasi yang semula dengan sistem klasik ke neo-klasik lalu berubah menjadi bilateral, dan pada akhirnya menuju, kontrak relasi unilateral.

Dalam suatu sistem biaya transaksi, satu pihak terkadang lebih menonjol, dimana ketika biaya transaksi mengalami suatu peningkatan, pengaturan pemasaran dapat menjadi kurang diformulasikan, dan/atau para petani dapat saja beralih ke pengaturan institusi lainnya, jika dipandang salah satu institusi lainnya yang terlibat dalam transaksi menjadi lebih dominan.

(Holden, 1997). Jadi pada akhirnya pada biaya transaksi, akan selalu terdapat sejumlah biaya yang melekat pada transaksi penjualan ataupun transaksi pembelian, dimana apa bila semakin besar tingkatan pengorganisasian di dalam pasar, maka akan semakin kecil biaya transaksi yang akan muncul dan

akan semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan dari peluang pertukaran (Campbell, 1978).

2.1.4 Biaya Resiko Usaha

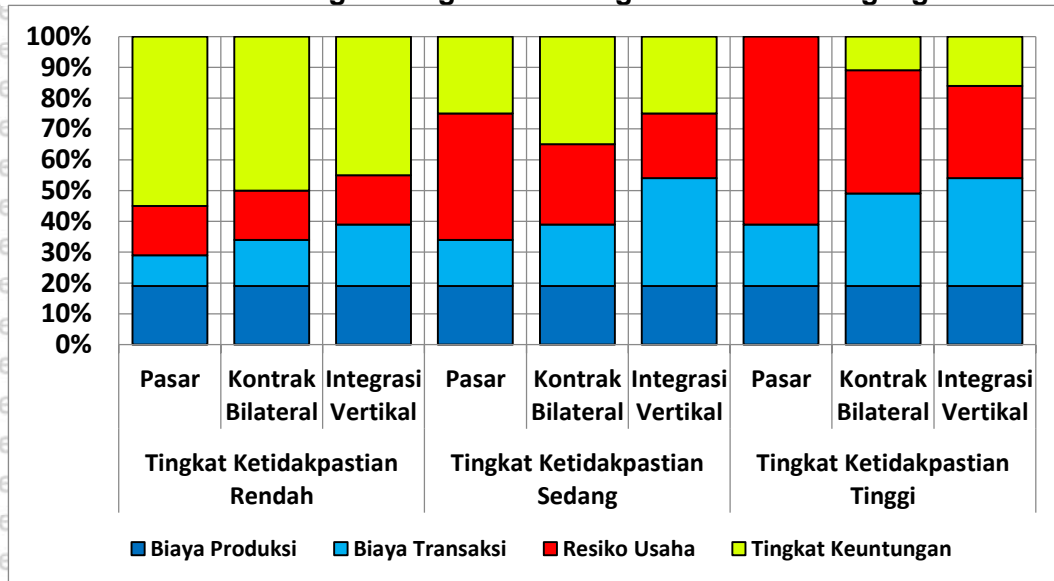
Di dalam berusaha, petani juga dihadapkan kepada resiko, dimana Resiko dapat didefinisikan sebagai usaha segala biaya yang harus dihadapi oleh petani akibat adanya iklim ketidakpastian di dalam perdagangan. Menurut (Dorward, 2001) petani akan dihadapkan kepada tiga biaya transaksi timbul di dalam system pengelolaan pertanian. Ketiga bentuk sistem pengelolaan yang ditawarkan berdasarkan teori dari Coase dan Williamson, yaitu :

- *spot market*,
- Kontrak Bilateral, dan
- Integrasi vertikal.

Dimana masing-masing dari sistim pengelolaan pertanian tersebut mempunyai resiko yang berbeda-beda pula, hal tersebut tergantung kondisi perekonomian yang dihadapi pada saat itu. Kondisi tersebut dapat diamati berdasarkan gambar

2.8 beriku ini :

Gambar 2.8: Pengembangan Kelembagaan Dalam Perdagangan



Sumber: Dorward, 2001

Petani senantiasa akan dihadapkan pada : Biaya produksi, Biaya transaksi, Resiko usaha dan Tingkat keuntungan yang mencerminkan pengembangan kelembagaan dalam perdagangan. Untuk itu dikenal tiga bentuk pengelolaan yaitu Petani Mandiri (*Spot Market*) , Petani kontrak pemasaran (*Marketing Contract*), dan Integrasi vertikal (*Vertical Integration*). Dimana ketiganya di ilustrasikan dengan Perbandingan tingkat biaya dan profit dengan mengasumsikan bahwa iklim perdagangan dalam kondisi kondusif, moderat, dan melemah dan biaya produksi bersifat tetap (*given*).

Skenario pertama menunjukkan iklim perdagangan dalam kondisi kondusif yang mengakibatkan tingkat ketidakpastian rendah karena informasi di pasar diketahui dengan jelas oleh tiap pelaku usaha. Tata kelola *spot market* akan lebih menguntungkan bila diterapkan karena biaya produksi, transaksi, dan resiko paling minimum di antara tata kelola lainnya sehingga *spot market* memperoleh profit yang lebih besar akibat kemampuan meminimumkan biaya-biaya. Sedangkan petani kontrak dan integrasi vertikal membutuhkan tambahan

biaya seperti biaya kontrak dan biaya perjanjian sesuai dengan aturan perusahaan.

Skenario ke dua menunjukkan iklim perdagangan dalam kondisi sedang sehingga ketidakpastian usaha juga dalam kondisi sedang atau moderat. Maka petani dengan tingkat keuntungan tertinggi adalah petani kontrak. Petani kontrak terjamin dalam hal produksi dan pemasarannya sehingga terjadi efisiensi pada biaya yang dikeluarkan.

Skenario ke tiga mencerminkan iklim perdagangan dalam kondisi fluktuatif sehingga ketidakpastian usaha sangat tinggi. Harga-harga tidak dapat diprediksi sesuai perjanjian dan bersifat *asymetric information*. Petani yang berada dalam tata kelola integrasi vertikal lebih diuntungkan karena dijamin oleh perusahaan meskipun produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan. Perusahaan sebagai penjamin dalam kelangsungan produksi dan yang menanggung kerugian akibat ketidakpastian ekonomi. Sedangkan petani *spot market* hampir-hampir tidak memiliki keuntungan karena ada banyak resiko yang dihadapi. Biaya resiko seperti tidak terserap sepenuhnya hasil produksi yang dipasarkan karena permintaan produksi rendah. Hal ini berakibat juga pada harga penjualan produk yang fluktuatif dan cenderung menurun sehingga petani merugi. Petani yang memilih melakukan kontrak dan terlibat dalam integrasi vertikal lebih terselamatkan karena ada jaminan produk.

2.2 Bentuk Tata Kelola Sektor Pertanian

Tata kelola dapat dikatakan sebagai segala proses mengatur suatu hal, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pasar, atau jaringan. Baik yang dilakukan atas suatu keluarga kecil, daerah, maupun negara. Baik secara formal maupun informal melalui hukum resmi, norma, adat, maupun kebiasaan. Tata kelola mencakup proses interaksi dan membuat keputusan di antara para pelakunya, yang mengarah kepada norma-norma sosial yang diterima. Hampir semua

individu maupun organisasi dapat dan boleh memegang proses tata kelola.

Salah satu yang paling resmi adalah Pemerintah, yang mana tanggung jawab dan wewenangnya adalah membuat suatu keputusan yang mengikat pada suatu wilayah dengan cara menerapkannya melalui hukum dan undang-undang. Ada pula bentuk-bentuk lain organisasi yang dapat melakukan proses tata kelola, misalnya organisasi, perusahaan, atau kelompok-kelompok sosial seperti desa, grup, suku, keluarga, kelompok keagamaan, dan lain sebagainya.

Apapun bentuknya, suatu badan yang memegang tata kelola akan menentukan suatu peraturan yang dibentuk berdasarkan konsensus bersama, dipertahankan, dan dijadikan peraturan yang mengikat. Adapun tingkat formalitas masing-masing organisasi bisa bervariasi dan menyebabkan masing-masing badan yang memegang tata kelola memiliki berbagai bentuk. Misalnya, Pemerintahan suatu negara yang mengadopsi sistem demokrasi; anggotanya terdiri dari perwakilan-perwakilan yang dipilih sendiri oleh masyarakat sesuai dengan kapabilitas dan preferensi masing-masing. Sedangkan suatu perusahaan atau organisasi lain mungkin memiliki anggota yang memegang tata kelola berdasarkan pemegang saham, atau figur-figur yang memiliki pengaruh di badan organisasi tersebut.

Pada perusahaan, tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

Tata kelola perusahaan adalah suatu subjek yang memiliki banyak aspek.

Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Fokus utama lain adalah efisiensi ekonomi yang menyatakan bahwa sistem tata kelola perusahaan harus ditujukan untuk mengoptimalkan hasil ekonomi, dengan penekanan kuat pada kesejahteraan para pemegang saham. Ada pula sisi lain yang merupakan subjek dari tata kelola perusahaan, seperti sudut pandang pemangku kepentingan, yang menuntut perhatian dan akuntabilitas lebih terhadap pihak-pihak lain selain pemegang saham, misalnya karyawan atau lingkungan.

Demikian halnya pada sektor pertanian terdapat pula tata kelola. (Mac Donald et al., 2004, p.3) menjelaskan bahwa dalam pasar global, petani memiliki dua pilihan untuk memasarkan produksi sampai ke tangan pembeli (tengkulak, pengolah, pedagang perantara atau komisi, pengangkut atau ekspedisi, dan konsumen), yaitu:

1. Petani Mandiri atau disebut juga petani *spot markets*
2. Petani Non Mandiri atau disebut juga petani Marketing Contract, dimana petani tersebut melakukan kontrak dengan perusahaan berupa kontrak pemasaran, kontrak produksi, dan integrasi vertikal. Tabel 2.1 menunjukkan klasifikasi pertanian kontrak dalam empat tipe pengelolaan.

Tabel 2.1:
Klasifikasi Tata Kelola Usaha kelapa

Model Tata Kelola	Pengontrol Keputusan Produksi	Sistem Harga
Spot Market	Petani sebagai pengelola.	Petani bebas menentukan harga produk berdasarkan output dan melakukan negosiasi harga secara langsung ketika produk dikirim/ dipasarkan pada

		konsumen.
Kontrak Pemasaran	Petani sebagai pengelola yang menentukan jenis dan jumlah produk, waktu pengiriman produk, waktu dan cara pembayaran tanpa metode khusus yang harus diikuti dalam proses produksi.	Petani menerima harga dari produk yang dihasilkan melalui proses negosiasi sebelum dan selama produksi.
Kontrak Produksi	Perjanjian antara petani dan perusahaan (pengelola) yang menentukan jenis dan jumlah produk yang dihasilkan, menetapkan varietas bibit, kegiatan dalam proses produksi, serta bantuan teknis yang harus disediakan oleh perusahaan.	Produk dibeli dengan harga yang disepakati dalam kontrak.
Integrasi Vertikal	Hubungan vertikal meliputi pengadaan bahan baku dan sumber daya lain, proses produksi, hingga pemasaran ke konsumen.	Perusahaan mengadakan pasokan dan mengelola semua hasil pertanian dan menentukan harga produk. Petani hanya menjadi pemasok lahan dan tenaga kerja yang diupah oleh perusahaan.

Sumber: Mac Donald, 2004

Kontrak merupakan tindakan dukungan barang dan jasa yang disediakan oleh pembeli untuk beberapa atau semua pemasok sebagai bagian dari hubungan kontrak dibidang pertanian, umumnya ditemukan dukungan tindakan kontrak termasuk kredit, bantuan teknis dan penyediaan fisik input (Goodhue et al, 2003).

Pertanian kontrak didefinisikan sebagai suatu sistem untuk produksi dan pasokan lahan berbasis dan bersekutu yang dihasilkan oleh petani/ produsen yang berkomitmen untuk mengatur komoditi pertanian dari segi waktu, harga dan jumlah yang ditentukan oleh pembeli (Sukhpal Sing, 2002). Definisi lain mengatakan bahwa pertanian kontrak (Eaton dan Shepherd, 2001) sebagai suatu perjanjian antara satu atau lebih petani dan pengontrak untuk produksi dan pasokan produk pertanian dengan janji kedepan, untuk penetapan harga.

Menurut (Pratap S Birthal, 2003), kemitraan antara agribisnis/ pemasar perusahaan dan petani dalam sistem pertanian kontrak memiliki keuntungan dan

kerugian bagi kedua belah pihak. Bagi perusahaan agribisnis, pertanian kontrak merupakan sarana penting untuk menjamin akses terhadap produk yang diinginkan serta menjadi standar kuantitas dan kualitas pasokan bahan tanpa benar-benar terlibat dalam pertanian itu sendiri. Perusahaan dapat memberikan masukan, teknologi, dan layanan kepada petani sebagai bagian dari kontrak.

Bagi petani, pertanian kontrak berfungsi sebagai pasar penjamin untuk produk yang dihasilkan, mengurangi biaya transaksi dan resiko harga. Ketersediaan pasar yang terjamin juga menjadi inisiatif petani untuk menggunakan kualitas input, mengadopsi teknologi dan meningkatkan sistem produksi mereka.

Dengan sistem pertanian kontrak memungkinkan perusahaan agribisnis memanfaatkan dengan optimal kapasitas infrastruktur dan tenaga kerja serta mampu menanggapi keprihatinan keamanan pangan dan kualitas konsumen.

Meski demikian ada beberapa eksternalitas negatif dari adanya pertanian kontrak, antara lain:

1. Eksternalitas utama adalah resiko ekstra-kontrak penjualan oleh petani, pada saat harga dinegosiasikan adalah tetap atau sebelum ditentukan dan harga pasar pada saat pengiriman terutama saat harga dinegosiasikan.
2. Di bidang pertanian rakyat, biaya transaksi (biaya informasi terkait, pencarian, negosiasi, dan penekanan) dari kontrak dengan sejumlah besar petani kecil lebih tinggi, disamping itu adanya resiko yang lebih besar dengan adanya kontrak dengan produsen besar, terutama jika sumber alternatif pasokan terbatas dan tidak dapat diandalkan.
3. Dalam kontrak sumber daya, perusahaan juga mungkin menghadapi resiko penyalahgunaan/ pengalihan input dan kredit.

Peran Pertanian kontrak di negara berkembang menjadi topik yang menarik dan kontroversi setidaknya sejak tahun 1970an (Glover, 1984,

Minot, 1986; Morrisey, 1974). Kritik pertanian kontrak berpendapat bahwa perusahaan agribisnis besar menggunakan kontrak untuk mengambil keuntungan dari tenaga kerja murah dan transfer resiko produksi kepada petani. Kekhawatiran lain adalah bahwa petani kontrak kecil akan terpinggirkan karena perusahaan akan lebih suka bekerja dengan petani menengah dan besar-besaran, sehingga memperburuk ketidak setaraan pedesaan (Little & Watts, 1994); Singh, 2002).

Lainnya kurang pesimis melihat pertanian kontrak sebagai sarana untuk memasukkan petani kecil ke pasar berkembang untuk barang-barang olahan dan ekspor komoditas. Karena kontrak sering melibatkan penyediaan benih, pupuk, dan bantuan teknis pada kredit dan jaminan harga pada saat panen, ini bentuk koordinasi vertikal bersamaan memecahkan sejumlah kendala pada kecil produktivitas pertanian, termasuk resiko dan akses ke input, kredit, dan informasi. Dalam pandangan ini, pertanian kontrak adalah institusional solusi untuk masalah kegagalan pasar di pasar kredit, asuransi, dan informasi (Grosh, 1994; Key dan Rusten, 1999; Ashok Gulati, P.K. Joshi, Muarice lands, 2008).

Ada beberapa perkiraan prevalensi pertanian kontrak dan tidak ada perkiraan dari waktu ke waktu, tetapi perubahan global yang pasar pertanian memberikan beberapa petunjuk :

- *Pertama*, terkait pendapatan. Pertumbuhan yang cepat, khususnya di Asia menyebabkan konsumsi bergeser menjauh dari biji-bijian pokok dan arah tinggi nilai komoditas tersebut seperti daging, ikan, susu holtikultura, dan menuju makanan dalam proses (Minot & Roy, 2006).
- *Kedua*, pertumbuhan pendapatan, urbanisasi, dan investasi asing mengemudi konsolidasi dalam ritel gerai makanan, revolusi supermarket Reardon, Timmer, (Barrett & Berdegue, 2003).

Menurut (Ashok Gulati dkk, 2008), pada umumnya masalah-masalah yang akan timbul dalam pertanian kontrak prinsipnya akan dialami oleh petani maupun pengusaha/perusahaan. Industri skala kecil akan menghadapi lebih banyak kendala-kendala dari pada industri skala menengah dan besar (Tambunan, 1999). Sementara petani kecil berdasarkan tenaga kerja yang tersela dan praktek budidaya yang intensif, dapat menjadi sangat produktif, mereka biasanya memiliki surplus berharga kecil dan menghadapi biaya transaksi yang tinggi dalam memasarkan produk mereka. Diversifikasi tanaman tradisional menuju pertanian bernilai tinggi menimbulkan dua tantangan utama :

- *Pertama*, produksi yang lebih tinggi resiko (kerentanan terhadap serangan hama dan kemalangan iklim) dan resiko harga terkait dengan pertanian bernilai tinggi dibandingkan dengan biji-bijian yang sering menghalangi diversifikasi.
- *Kedua*, berkurangnya sumber daya (aset keuangan serta akses terhadap kredit) ditambah dengan pasar yang tidak memadai dan pengetahuan tanaman seringkali membatasi bergeser ke perusahaan baru dan investasi dalam input variabel dan tetap.

Petani kecil sering menemukan diri mereka terkunci dalam situasi ketidakpastian pendapatan dan kemampuan memiliki resiko rendah, sehingga menghambat pergeseran terhadap nilai yang lebih tinggi dan pendapatan kegiatan yang menghasilkan. Sekali lagi, model pertanian kontrak yang dapat berbagi resiko dan mengatasi kendala sumber daya muncul sebagai pendekatan mungkin untuk memfasilitasi transformasi pemegang kecil untuk pertanian bernilai tinggi.

Menurut (Grossman, 1998), keterlibatan modal bagi petani untuk memproduksi dengan cara tertentu dan standar tertentu, serta mendapatkan

tawaran dalam mengembalikan jaminan pasar jika mereka memenuhi standar.

Petani tidak berhubungan langsung dengan modal perusahaan, melainkan melalui hubungan hukum yang mengatur interaksi antara keduanya. Negosiasi harga dan produsen atas nama petani dan bangsa, dalam hal ini pulau St. Vincent. Sementara Negara dan modal bekerja sama untuk membentuk bagian utama dari sisi politik dalam konteks pertanian kontrak, termasuk yang paling penting adalah kepemilikan lahan.

Ditandai ketidaksetaraan dalam hal lahan yang memberikan perbedaan yang signifikan dalam sumber daya petani untuk tanaman pertanian, dan dalam strategi mengenai tenaga kerja. Akhirnya pada sisi lingkungan dari ketidaksamaan iklim, tanah, erosi, dan penurunan kesuburan. Karena dua faktor yang terakhir ketidaksetaraan pemilikan tanah, dan perbedaan dalam situasi lingkungan tidak seragam untuk seluruh populasi pertanian, meskipun keseragaman dalam kebutuhan modal dalam kontrak pertanian.

Literatur yang membahas tentang pertanian kontrak di negara berkembang menjelaskan bahwa sistem ini merupakan cara untuk mengalokasikan resiko antara produsen dan pengontrak, salah satu solusi mengatasi kegagalan pasar terutama dalam pasar input, dan pengaturan kelembagaan untuk mengurangi biaya transaksi (Dorward et al,1998; Key dan Runsten, 1999; Eaton dan Shepherd, 2001; Dorward, 2001; Kirsten dan Sartorius, 2002; Simmons, 2002; Masakure dan Henson, 2005; Da Silva,2005).

2.2.1 Keuntungan Pertanian Kontrak bagi Petani

Bagi produsen, pertanian kontrak dapat memecahkan permasalahan terkait resiko, biaya transaksi yang tinggi dan hilangnya pasar bila dibandingkan dengan tempat transaksi pasar.

- Akses pasar dapat ditingkatkan sedangkan resiko dan biaya terkait dengan akses pasar dapat berkurang. Pasar memiliki resiko dan biaya transaksi yang disebabkan oleh ketidakpastian tentang pengontrak dan pengurangan harga. Dalam kontrak, produk dijamin dan biasanya ditentukan pada awal siklus pertumbuhan harga yang harus dibayar pada saat pengiriman produk. Dengan demikian, stabilitas pendapatan diperoleh, terutama jika kontrak adalah kontrak jangka panjang atau dapat dengan mudah diperbaharui.
- Resiko produksi dapat dikurangi dalam kontrak dengan mencakup kesepakatan penyediaan sesuai masukan dan bantuan teknis.
- Perjanjian kontrak biasanya meliputi penyediaan input oleh pengontrak, sehingga mengurangi biaya transaksi yang disebabkan oleh ketidakpastian mengenai ketersediaan dan kualitas masukan. Kegagalan dipasar input dapat diminimalisir dengan ketentuan tersebut dan dalam skala ekonomi diperbolehkan oleh pembeli yang lebih besar dari input oleh pengontrak dapat diteruskan kepada petani melalui pengurangan biaya.
- Kontrak biasanya mencakup ketentuan mengenai bantuan teknis, seringkali untuk membantu petani meningkatkan kualitas produk dan dengan demikian memperoleh harga produk yang lebih tinggi. Tanpa bantuan tersebut, petani-petani mungkin tidak mau atau mampu untuk menjelajah ke tanaman yang inovatif dan ternak perusahaan seperti ini melibatkan resiko yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, bantuan teknis dapat meningkatkan produksi pertanian dan keterampilan manajemen dari petani, dan efek *spill-over* mungkin terjadi jika petani juga memiliki tanaman dan kegiatan peternakan non-kontrak.

- Akses terhadap kredit ditingkatkan. Di bawah pengontrak, sumber daya disediakan, modal kerja diberikan dalam bentuk natura, melalui penyediaan input oleh pengontrak. Transaksi tersebut dijamin oleh komitmen komersil antara petani dan pengontrak. Dengan cara yang sama, akses kredit baik untuk modal kerja dan modal tetap ditingkatkan dalam kasus spesifikasi kontrak pasar karena bank dapat menerima komitmen kontrak sebagai jaminan yang cukup untuk pemberian kredit.
- Keuntungan kontak sangat relevan ketika para petani memilih untuk menghasilkan spesialisasi, karena tanaman yang bernilai tinggi memerlukan produksi yang lebih tinggi dan resiko pemasaran serta investasi yang lebih tinggi.
- Kontrak dapat mengurangi resiko pemasaran karena mereka memberikan jaminan pasar dengan seringkali dengan harga minimum dan dapat mengurangi resiko produksi sebagai pengontrak karena menyediakan masukan dan bantuan teknis.

2.2.2 Keuntungan Pertanian Kontrak bagi Pengontrak

Keuntungan bagi pengontrak dijabarkan sebagai berikut :

- Kontak mengurangi biaya transaksi. Membeli di pasar *spot* memerlukan kecermatan yang lebih tinggi dan biaya pemilihan untuk pengontrak dari pada di bawah pertanian kontrak karena di bawah kedua pengontrak dapat mempengaruhi proses produksi (secara tidak langsung dengan memberikan masukan dan langsung oleh pengelola produksi), tetapi juga karena kontak memberikan kesempatan bagi diulangnya interaksi yang menghasilkan informasi tentang tindakan dan produk khusus produsen.

- Kontrak mengurangi biaya koordinasi untuk pengontrak sebagai keteraturan yang lebih besar dari pasokan produk pertanian yang memungkinkan koordinasi yang lebih baik dalam kegiatan pengelolaan dan yang lebih baik sejalan dengan ketentuan pelanggaran yang dibuat. Keuntungan ini terutama penting dalam perspektif *supply chain*, dimana transaksi hulu terkait dengan transaksi hilir.

- Dengan memberikan bantuan teknis kepada petani, pengontrak dapat memperoleh lebih seragam produk yang penting bagi industri pengolahan termasuk juga pemasok di pasar.

- Bantuan teknis membantu meningkatkan kualitas produk dan memperkuat kepatuhan terhadap kualitas dan persyaratan keselamatan.

- Kontrak mengurangi resiko memperoleh hasil yang cukup pada waktu yang tepat dan hak kualitas, yang memungkinkan kepentingan untuk pengolahan tetapi juga untuk para pedagang yang telah menjadi pemasok di pasar.

- Dengan memberikan masukan kepada semua petani kontrak, biaya input perunit dikurangi untuk petani, sehingga memungkinkan harga output yang lebih rendah.

- Dengan kontrak kepada petani kecil, pengontrak bisa mendapatkan keuntungan dari keuntungan dari keluarga peternakan, khususnya untuk tanaman padat karya dan sistem produk ternak.

- Akses terhadap kredit dan subsidi dapat difasilitasi untuk pengontrak sebagai pengurangan resiko dalam rantai pasokan perusahaan dan skala ekonomi yang berhubungan dengan kontrak operasi pada kondisi meningkatkan kemampuan sebuah lembaga pembiayaan untuk meminjamkan.

2.2.3 Kerugian Pertanian Kontrak

Di samping keuntungan terdapat juga kerugian dari pertanian kontrak yang dialami oleh petani. Petani dirugikan karena kehilangan hak otonominya (makin tingginya ketergantungan petani dan kesempatan untuk dieksploitasi) dan adanya resiko yang timbul seiring produksi ditingkatkan (Singh, 2002); (Kirsten dan Sartorius, 2002).

Sebagian besar efek negatif dari hasil pertanian kontrak menunjukkan adanya hubungan antara individu petani dan kontrak tidak merata, yang terakhir sering berada dalam posisi untuk menjalankan perilaku kekuasaan dan non-kompetitif dalam memaksakan ketentuan kontrak (Porter dan Phillips-Howard, 1977); Poulton et al, 1998).

- Pengontrak mungkin mengingkari istilah kontrak jika keadaan pasar berubah. Misalnya jika harga pasar pada saat pengiriman produk secara substansial berbeda dari harga disepakati dalam kontrak, pengontrak dapat memaksa negosiasi ulang atau menolak produk disampaikan.
- Pengontrak mungkin sengaja menghindari transparansi dalam mekanisme penentuan harga dari kontrak, sehingga sangat sulit bagi petani untuk menilai apakah ia telah menerima dengan tepat renumerasi.
- Petani kehilangan fleksibilitas dalam memilih kegiatan pertanian. Terikat dengan tanaman atau ternak perusahaan melalui kontrak menyebabkan petani tidak bisa menyesuaikan produksi campuran untuk memperoleh keuntungan dari peluang pasar.
- Pengontrak dapat mempengaruhi harga yang dibayarkan kepada petani dengan menetapkan jadwal pengiriman, terutama ketika harga berubah

sangat cepat dan pengontrak dapat mengatur jadwal pengiriman untuk mendapatkan keuntungan volatilitas pasar.

- Resiko biasanya terkait dengan praktik monokultur yang meningkat. Mengintensifkan produksi tanaman pertanian tunggal, konsentrasi ternak hewan, atau meningkatkan kemungkinan penyakit.
- Resiko uang tumbuh, kelemahan dari akses mudah ke kredit adalah kemungkinan untuk berhubungan dengan pemasaran. Pertanian kontrak juga membawa kerugian bagi perusahaan pembeli, karena kontrak dapat mengakibatkan resiko baru dan biaya transaksi.
- Pertanian kontrak memerlukan resiko kontrak oleh petani. Sama seperti perusahaan mungkin rentan terhadap mengingkari ketentuan kontrak ketika kondisi pasar berubah, petani dapat dipaksa untuk menjual semua atau sebagian dari produksinya kepada pihak ketiga ketika harga dianggap tinggi diluar ikatan kontrak. Hal ini menjadi permasalahan utama dimana alternatif kemudahan akses dan penegakan kontrak yang lemah.
- Kontrak menghadapi biaya transaksi yang tinggi karena berurusan dengan sejumlah besar petani. Mengelola hubungan komersil dengan segudang mitra merupakan tugas yang kompleks, membutuhkan investasi dalam personel, dalam kontrol dan sistem pemantauan.
- Petani dapat menyalahgunakan atau bahkan menjual kembali masukan yang diberikan oleh pengontrak. Dalam sumber daya kontrak penyediaan, masalah yang dikenal adalah potensi penggunaan input didistribusikan pada alternatif tanaman dan kegiatan peternakan.

- Internalisasi pengontrak membutuhkan biaya dukungan pelayanan, seperti penyuluhan, transportasi, pemantauan kualitas dan jasa keuangan, yang bersaing di daerah dengan diberikan gratis oleh lembaga-lembaga publik.
- Pertanian kontrak dapat menyebabkan hilangnya fleksibilitas untuk mencari sumber pasokan alternatif, terutama jika ada permasalahan kondisi ekonomi yang berubah dalam mendukung bahan baku alternatif.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dalam hasil penelitiannya menggunakan model *Ordinary Least Square* (OLS), pengujian menggunakan uji statistic regresi linear berganda, menemukan bahwa biaya pupuk berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani jagung. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien regresi biaya pupuk yaitu sebesar 0,058327. Artinya setiap kenaikan biaya pupuk satu persen maka pendapatan petani jagung berkurang sebesar 0,06 persen, ceteris paribus. Dalam makna ekonominya, semakin banyak pupuk yang digunakan, maka semakin besar pula hasil produksinya, namun tetap ada batasan maksimal penggunaan pupuk, jika tetap digunakan melewati batas tersebut, aka menjadi mengurangi hasil produksi. Hal ini dapat dilihat dalam teori *the low of diminishing return*. Tenaga kerja dan luas lahan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani jagung (Nababan, 2009).

Selanjutnya penelitan dari (Dulay, 2012), menggunakan analisis regresi linear berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Leasat Square* (OLS), menemukan bahwa curahan jam kerja total secara parsial berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani padi sawah. Eksploitasi harga dan eksploitasi tenaga kerja dimana eksploitasi harga secara parsial berpengaruh negative terhadap pendapatan petani padi sawah. Sedangkan eskploitasi tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif. Produktivitas tenaga kerja, luas lahan

secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan petani padi sawah.

Teknologi tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani padi sawah.

Penelitian dari (Sutrisno, 2009) dengan menggunakan model Linier Regresi

Berganda, menemukan bahwa Variates tebu, Pupuk, Rendemen dan biaya berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan nelayan dan petani tambak.

Berikutnya penelitian dari Syarifa Najib, dan Wahdiana (2009) dengan menggunakan model analisis regresi berganda, menemukan bahwa biaya saprodi berpengaruh nyata, sedangkan biaya berniaga kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelapa salak. Hasil penelitian dari (Widotono, 2011)

yang bertujuan mengetahui pengaruh tingkat efisiensi penggunaan tenaga kerja, pengaruh luas lahan, pengaruh modal terhadap peningkatan pendapatan petani pada usaha kelapa tembakau, menemukan bahwa biaya bibit, biaya obat-obatan dan biaya pupuk berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani. Sedangkan luas lahan tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Pengujian penelitian ini menggunakan uji statistic Regresi Linier Berganda.

Penelitian Sumiat dan (Damayanti, 2008) dengan menggunakan pendekatan regresi berganda, menemukan bahwa luas lahan dan jumlah produksi berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha kelapa sawit.

Penelitian dari (Husinsyah, 2007) menemukan bahwa adanya hubungan antara modal kerja biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, biaya penyusutan alat terhadap pendapatan usaha kelapa padi gogo. Secara parsial, hanya biaya bibit yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha kelapa padi gogo. Melalui uji terhadap penggunaan variabel biaya bibit, biaya pupuk, biaya pestisida, biaya tenaga kerja, biaya penyusun alat, semua variabel mempunyai hubungan yang erat dan positif.

Kebutuhan minyak nabati dan lemak dunia terus meningkat sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan peningkatan pendapatan domestik bruto. Jumlah

penduduk di negara-negara kawasan timur jauh sekitar 3,2 milyar atau 50% dari penduduk dunia. Di daerah inilah, tingkat pertumbuhan ekonomi pada saat ini hingga 2010 merupakan yang paling tinggi. Selain itu, konsumsi minyak per kapita penduduk dikawasan Asia Timur dan Asia Tenggara juga masih jauh di bawah rata-rata penggunaan minyak nabati dan lemak per kapita pertahun perpenduduk (Pahan, 2012).

Sebagai mana kita ketahui kelapa merupakan komoditas yang mempunyai nilai strategis karena merupakan bahan baku minyak goreng di samping komoditas lainnya seperti santan dalam kemasan, virgin oil, briket kelapa, dan berbagai macam turunan dari olahan yang berasal dari kelapa. Dan sementara itu minyak kelapa merupakan salah satu dari 9 kebutuhan pokok bangsa Indonesia, disisi lain kebutuhan permintaan akan minyak kelapa di dalam dan di luar negeri yang sangat kuat merupakan indikasi pentingnya peranan komoditas kelapa dalam perekonomian bangsa.

Penelitian ilmiah yang berhubungan dengan perkembangan kelapa nasional di Indonesia masih sangat terbatas, hal ini dikarenakan rendahnya minat peneliti untuk melakukan riset di bidang pertanian, sehingga dirasakan perkembangan dibidang pertanian itu sendiri dirasakan sangat lambat jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.

Beberapa peneltian ilmiah yang berhubungan dengan pertanian antara lain oleh (Syahza dan Khaswarina, 2005) yaitu penerimaan petani kelapa tergantung pada umur tanaman. Semakin tinggi umur tanaman (umur optimum) menunjukkan kandungan minyak semakin tinggi, dan ini akan berpengaruh terhadap harga buah segar yang akan diterima oleh petani.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tanaman kelapa juga mempunyai umur produkti, dimana di usia produktif tersebut tanaman kelapa akan menghasilkan buah kelapa yang lebat dan bila dipanen sesuai dengan tingkat

kematangan yang tepat, maka akan menghasilkan kelapa dengan kandungan minyak yang tinggi.

Seperti pada penelitian oleh Rumokoi, M. M. M.; Berlina, R.; Lay A, Dalam dinamika perkembangan kelapa nasional masalah utama yang dihadapi adalah rendahnya pendapatan petani. Rendahnya pendapatan tersebut merupakan resultante dari berbagai faktor penyebab teknis, ekonomis dan sosial budaya. Namun masalah yang dominan adalah ketergantungan yang sangat besar terhadap produk tradisional yaitu kopra dan minyak kelapa. Masalah ini dapat diatasi dengan memperluas spektrum produk kelapa. Untuk menunjang program penganeekaragaman produk kelapa berbagai kegiatan penelitian perlu dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang mengarah pada perbaikan mutu dan penganeekaragaman produk kelapa telah dilaksanakan secara intensif sejak Pelita IV. Dalam Pelita V penelitian diarahkan pada tiga aspek pokok yaitu (1) karakterisasi bahan baku kelapa, (2) perbaikan proses pengolahan, dan (3) penganeekaragaman produk. Hasil yang menonjol selama Pelita V adalah (1) karakterisasi daging buah dan nira untuk bahan pangandan non pangan, (2) karaterisasi dan pengawetan batang kelapa, (3) perbaikan mutu minyak kelapa dengan pemanasan bertahap, (4) pengolahan santan dan air kelapa untuk minumanringan, dan (5) pemanfaatan limbah pengolahan minyak kelapa dengan pemanasan bertahap. Dalam jangka panjang penelitian lebih diarahkan pada pengolahan produk non pangan.

Dalam penelitian yang lain yang dilakukan oleh Amrizal, Kelapa merupakan komoditas yang berperan penting dalam perekonomian Propinsi Riau, khususnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Sekitar 80% dari total luas areal kelapa Riau berada pada daerah ini, dengan luas areal 352.000 hektar dan merupakan perkebunan rakyat. Keberadaan perkebunan kelapa rakyat tersebut adalah sangat penting sebagai pemasok bahan baku industri kelapa yang berkembang pesat di daerah

ini. Pada tulisan ini dicoba untuk memaparkan beberapa aspek agribisnis kelapa yang terjadi di daerah Indragiri Hilir berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kaedah survei. Penuturan hasil kajian dikelompokkan berdasarkan sub sistem agribisnis yang ada, yakni sub sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran. Sub sistem produksi menunjukkan rendahnya tingkat produktivitas usaha kelapa rakyat dengan penerapan teknologi yang minim. Sedangkan sub sistem pengolahan menunjukkan masih dominannya pengolahan kelapa menjadi kopra serta industri minyak kelapa. Sub sistem pemasaran menunjukkan struktur pasar yang oligopoli dengan dominasi pasar dipegang oleh minyak kelapa. Regional Propinsi Riau berdasarkan jumlah pabrik pengolahan masih terdapat defisit suplai dibandingkan kebutuhan konsumsi

Di dalam penelitian Amrizal yang lainnya, tentang pertanian kelapa dikatakan bahwa penanganan usaha kelapa di lahan pasang surut memiliki karakter tersendiri bila dibandingkan dengan di lahan kering. Perbedaan ini selanjutnya akan memberikan warna tersendiri terhadap keragaan agribisnis kelapanya. Untuk mendukung pengembangan kelapa di lahan tersebut maka penyediaan informasi keragaan bisnis kelapa yang ada diperkirakan akan menjadi sumbangan yang berharga bagi pengambil kebijakan. Pada studi ini dikaji beberapa aspek dari subsistem agribisnis yang ada, seperti subsistem produksi, pengolahan dan distribusi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei di Propinsi Sumatera Selatan, dengan objek kajian meliputi petani, pedagang, pengolah dan institusi lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha kelapa di lahan pasang surut adalah menguntungkan, dan skala usaha kelapa yang ada berada pada kondisi increasing return to scale. Dilihat dari sudut kebutuhan konsumsi kelapa butiran lokal, maka daerah propinsi Sumatera Selatan kekurangan penawaran kelapa sebanyak 32,4 ribu ton setara kopra di

tahun 1994. Dengan demikian usaha kelapa pasang surut di daerah ini cukup prospektif.

Dalam penelitian Amrizal mengemukakan sebagai berikut : Pertanian Inti Rakyat (PIR) kelapa adalah merupakan pola ideal agribisnis karena dalam PIR sub sistem produksi, pengolahan, pemasaran sudah menyatu dan terkait satu sama lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaan keterkaitan subsistem-subsistem tersebut yang berlaku pada pola PIR PBSN, dan PIR PBN.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metoda survai pada kedua jenis PIR tersebut yang dilakukan di Propinsi Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterkaitan subsistem-subsistem agribisnis pada PIR PBN masih lemah, dan sedangkan pada PIR PBSN keterkaitannya cukup baik.

Penelitian pertanian kelapa lainnya yang dilakukan oleh Sulistyo. R. mengatakan sebagai berikut: Tanaman kelapa di Indonesia termasuk komoditas sosial mengingat produknya merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok masyarakat. Dari total luas areal 3,74 juta hektar, 96% merupakan tanaman rakyat diusahakan ± 7,0 juta kelapa keluarga petani kelapa yang meliputi tidak kurang dari 20,0 juta jiwa. Pengusahaannya sebagai perkebunan rakyat, dicirikan oleh: (1) luas pemilikan usaha kelapa yang sempit, (2) umumnya diusahakan dalam pola monokultur, (3) penerapan teknologi anjuran masih rendah, (4) hasil usaha kelapa masih bersifat tradisional yaitu berbentuk kelapa butiran dan kopra, (5) kepemilikan modal masih lemah dan (6) resultante dari faktor-faktor tersebut menyebabkan produktivitas usaha kelapa rendah sehingga pendapatan petani berada pada posisi yang tidak mendukung kehidupan dan kesejahteraan secara layak. Bertolak kepada keragaan dan masalah-masalah usaha kelapa yang dihadapi petani kelapa maka upaya-upaya kongkrit yang dapat dilaksanakan dalam pemberdayaan petani yaitu melalui pembinaan pengembangan kelapa

berdasarkan aspek keunggulan komperatif. Keunggulan komperatif tersebut dapat diraih dengan cara berproduksi yang efisien melalui penerapan teknologi anjuran, dibidang budidaya dan penerapan diversifikasi usaha kelapa baik horizontal maupun vertikal. Di dalam pelaksanaan program pemberdayaan petani kelapa tersebut, pembinaan petani dilakukan secara berkelompok, mengacu kepada aspek yang mendasar yakni (1) luasan usaha kelapa kelapa yang harus mencapai skala ekonomi, diperkirakan 300 hektar, karena pembinaan diarahkan kepada orientasi pasar, (2) penerapan diversifikasi usaha kelapa secara horisontal dan vertikal dan (3) pembinaan berdasarkan kemitraan yang saling menguntungkan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan di dalam satu sistem pembinaan sehingga menuntut pelaksanaannya secara simultan dan terpadu.

Sumato juga pernah melakukan penelitian tentang pertanian kelapa, adapun hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : Pendapatan petani pada lahan pasang surut masih tergolong rendah, karena pada umumnya tanaman kelapa kurang terpelihara sehingga produktivitasnya rendah. Hal ini karena disamping bertani, petani kelapa masih merangkap sebagai nelayan. Tetapi dengan semakin menipisnya populasi ikan di perairan pantai, pekerjaan sebagai nelayan kurang diminati lagi sehingga tenaga kerja dapat lebih difokuskan pada usahatani kelapa. Untuk meningkatkan pendapatan dari usahatani kelapa dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan diantara kelapa dengan tanaman sela antara lain nenas, diharapkan petani kelapa akan lebih terfokuskan kegiatannya pada tanaman kelapa. Tanaman nenas mempunyai kisaran pH yang cukup lebar yaitu antara 3,3-7,9 dan tanaman nenas cukup toleran terhadap pH yang rendah (tanah masam). Di Malaysia nenas ditanam pada pH berkisar antara 3-5 dan agak tahan terhadap naungan. Selain di konsumsi langsung buah nenas dapat dibuat sari nenas dan

dikalengkan. Dengan modifikasi peralatan prosesing kelapa dapat memproses buah nenas. Pemasaran nenas disekitar Riau dapat dipasarkan ke Batam. Secara nasional nenas dapat dipasarkan ke luar negeri, ekspor nenas Indonesia sampai tahun 1991 dalam berbagai bentuk tercatat sebesar 63.931.964 kg dengan nilai US\$ 22.471.944 dalam bentuk kemasan tanpa kedap udara, 197.563 kg dengan nilai US\$ 175,47, segar 191.320 kg dengan nilai US\$ 185.792 sedang dalam bentuk sari nenas pada tahun 1991 sebesar 17.768 kg dengan nilai US\$ 19.945. Sedang pangsa pasar luar Negeri seperti di Belanda sebesar 22,33% dengan nilai US\$ 11.752.687 dan 19,93% dengan nilai US\$ 9.062.771 di Amerika. Berbagai penelitian diperoleh bahwa dengan memanfaatkan lahan di antara tanaman kelapa pada lahan pasangsurut dapat meningkatkan pendapatan petani. Tanaman nenas merupakan tanaman sela yang menguntungkan untuk tanaman sela diantara tanaman kelapa produktif pada lahan pasangsurut bergambut. Dengan penanaman tanaman nenas diantara tanaman kelapa pada lahan pasang surut dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp 2.785.475,0 pada tahun kedua. Sedang pada tanaman muda dapat meningkatkan pendapatan petani sebesar Rp 2.600.000,00 pada tahun kedua dan Rp 2.400.000,00 pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya.

Sementara Suprpto A, dalam penelitiannya juga tentang kelapa mengatakan sebagai berikut: usaha kelapa kelapa yang selama 2-3 dekade terakhir mengalami pasang surut, harus dapat diberdayakan melalui pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis itu mencakup ke-5 subsistem :

1. Pelayanan input-output produksi,
2. Budidaya,
3. Pasca panen dan pengolahan hasil,
4. Pemasaran, dan

5. Distribusi hasil.

Strategi yang ditempuh adalah dengan :

1. Pengembangan informasi pasar,
2. Peningkatan citra dan pengembangan mututerpada,
3. Pengembangan usaha dan kelembagaan agribisnis,
4. Pengembangan investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta
5. Pengembangan sumberdaya manusia. Pengembangannya ditekankan kepada agroindustri dalam upaya meningkatkan pemanfaatan berbagai produk seperti: pengalengan kelapa muda, minyak kelapa, kelapa parut kering, tepung kelapa, santan awetan, nata de coco, alkohol, gula, minuman dan oleokimia

Suyatna juga pernah melakukan penelitian tentang pertanian kelapa, adapun hasil penelitiannya sebagai berikut: Indonesia memiliki areal tanaman kelapa seluas 3,7 juta hektar dengan produksi sekitar 2,7 juta ton setara kopra. Sebagian besar kelapa diolah menjadi kopra yang selanjutnya diproses menjadi minyak goreng. Posisi usaha ini dirasakan makin lemah dalam perdagangan dalam negeri maupun ekspor karena tersaingi oleh minyak sawit. Peluang untuk meningkatkan nilai tambah melalui diversifikasi produk kelapa masih terbuka, mengingat luas areal dan produksikelapa sebagai bahan baku industri, banyaknya industri dalam Negeri yang masih memerlukan bahan baku, harga ekspor produk kelapa yang semakin baik dan teknologi pengolahan yang telah tersedia. Upaya pengembangan berbagai produk kelapa tersebut agar dipacu, sehingga pendapatan masyarakat pedesaan di sentra industri kelapa dan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor dapat meningkat.

Serangkaian penelitian yang dilakukan oleh Syafaat dan Supena, Hendrayan tentang pertanian kelapa dengan hasil sebagai berikut: Salah satu upaya menuju efisiensi ekonomi pembangunan sektor pertanian dalam arti luas,

dapat ditempuh dengan mengembangkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif baik ditinjau dari sisi penawaran maupun permintaan.

Dari sisi penawaran komoditas unggulan dicirikan oleh superioritas dalam pertumbuhannya pada kondisi biofisik, teknologi dan kondisi sosial ekonomi petani di suatu wilayah. Sedangkan dari sisi permintaan, komoditas unggulan dicirikan oleh kuatnya permintaan di pasar baik pasar domestik maupun internasional

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa produk komoditi budidaya pertanian, cenderung mengalami permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya pendapatan petani
2. Sistem produksi, Pengolahan, dan Pemasaran.
3. Keterkaitan subsistem-subsistem agribisnis pada PIR PBN masih lemah, dan sedangkan pada PIR PBSN keterkaitannya cukup baik.
4. Luas pemilikan usaha kelapa yang sempit
5. Penerapan teknologi anjuran masih rendah
6. Hasil usaha kelapa masih bersifat tradisional
7. Kepemilikan modal masih lemah
8. Produktivitas usaha kelapa rendah sehingga tidak mendukung kehidupan dan kesejahteraan secara layak
9. Memanfaatkan lahan diantara kelapa dengan tanaman sela (nenas, pinang, dan lain-lain)
10. Pengembangan informasi pasar
11. Peningkatan citra dan pengembangan mutu terpadu
12. Pengembangan usaha dan kelembagaan agribisnis
13. Pengembangan investasi berkelanjutan dan ramah lingkungan
14. Pengembangan sumberdaya manusia
15. Diversifikasi Produk

Dari penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan permasalahan dari 1 sampai dengan 15 yang ada, pokok utamanya adalah terletak pada harga kelapa yang cenderung turun dari tahun ke tahun, sehingga berimbas terhadap kehidupan petani budidaya kelapa itu sendiri.



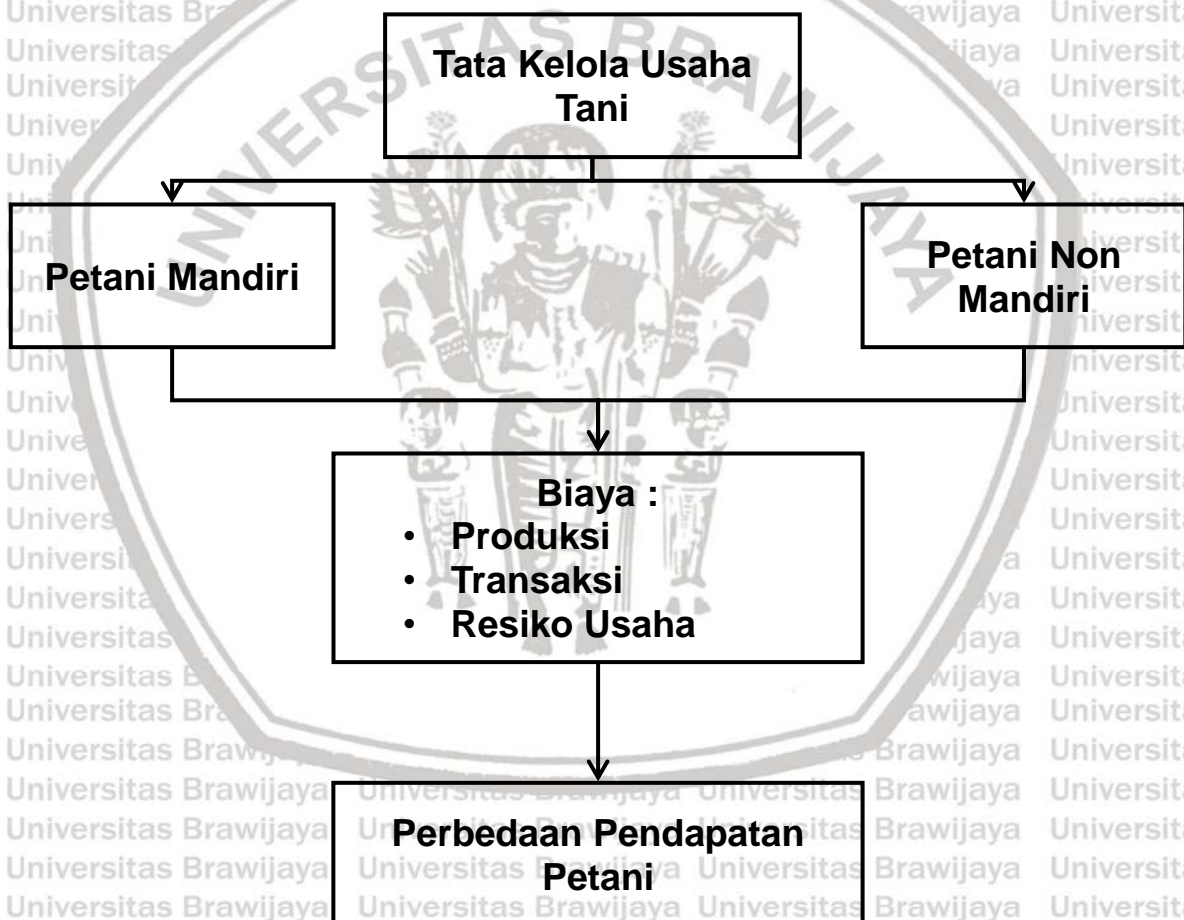
BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini dibangun berdasarkan pada latar belakang masalah serta di dukung oleh beberapa konsep teori untuk kemudian secara operasional dapat digambarkan berdasarkan kebutuhan penelitian. Gambar 3.1 berikut menjabarkan tentang kerangka pikir penelitian ini.

Gambar 3.1: Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Penulis, 2016

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang, pendapatan petani di Kabupaten Indragiri Hilir, diindikasikan tidak memberikan kesejahteraan bagi

petani meskipun Kabupaten ini berkontribusi cukup besar dalam produksi kelapa dalam skala regional. Penelitian ini berfokus pada identifikasi bentuk tata kelola budidaya perkebunan kelapa di Indragiri Hilir dengan mengkomparasikan pendapatan petani berdasarkan tata kelola budidayanya. Tabel 3.1 menunjukkan perbedaan Tata Kelola Petani Mandiri (*Spot Market*) dan Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*).

Tabel 3.1.

Perbedaan Tata Kelola Kelapa Mandiri dan Non-Mandiri

	Pentai Mandiri (<i>Spot Market</i>)		Petani Non Mandiri (<i>Marketing Contract</i>)
1.	Awal bertani semua biaya ditanggung sendiri	1	Awal bertani, mendapatkan bantuan berupa, pembuatan kanal (sarana transportasi), pembukaan lahan, bantuan bibit, bantuan pupuk, bantuan teknis, dan bantuan sarana produksi lainnya berupa mesin dan alat berat (cobelco), dll
2.	Petani Pemilik sekaligus pengelola	2	Petani sebagai pengelola, menentukan jenis dan jumlah produk, waktu pengiriman produk, waktu dan cara pembayaran tanpa metode khusus
3.	Menentukan sendiri jenis tanaman, umumnya jenis kelapa dalam (Kina)	3	Jenis tanaman ditentukan oleh Perusahaan, umumnya jenis kelapa hibrida
4.	Pemasaran hasil produksi mengikuti mekanisme pasar	4	Pemasaran hasil produksi sesuai kontrak, menjual hasil produksi ke perusahaan
5.	Salura distribusi pemasaran, ke pengepul, tokeh, Perusahaan, kapal-kapal asing, dll	5.	Saluran distribusi pemasaran hanya ke perusahaan yang telah ditunjuk (PT. RSUP-Industri)
7.	Biaya yang dikeluarkan : Biaya Produksi, Biaya Transportasi, dan Biaya Transaksi	7.	Biaya yang dikeluarkan : Biaya Produksi, Biaya Transportasi, dan Biaya Transaksi
8.	Biaya Transportasi ditanggung sendiri	8.	Sebagian biaya transportasi di subsidi oleh perusahaan (bantuan kapal motor)

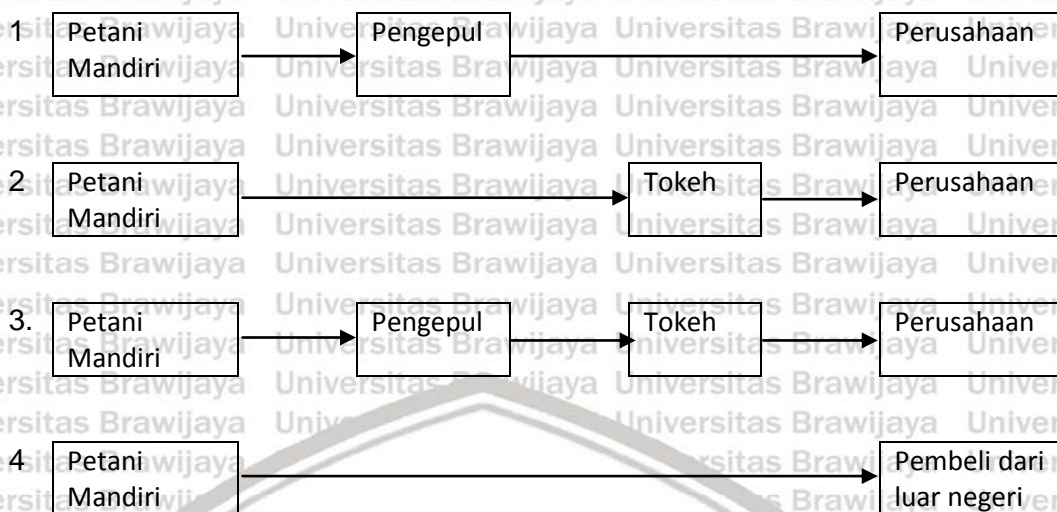
Penjelasan :

Petani Mandiri, adalah pemilik sekaligus pengelola perkebunan, pada saat pembukaan lahan, dilakukan dengan modal sendiri, baik pembukaan lahan, pembutan kanal, Pembelian Bibit, Pembelian Pupuk, dll. Semua dilakukan oleh petani dan keluarga. Pada umumnya petani mandiri menggunakan jenis bibit kelapa dalam (kina) hal tersebut dikarenakan jenis tanaman kelapa ini dikenal cocok pada lahan bergambut dan juga tahan terhadap serangan hama, jika dibandingkan dengan jenis tanaman kelapa lainnya, umur berbuahnya dimulai pada saat berumur 6-7 tahun, namun produksinya dapat bertahan sampai umur 60 tahun.

Biaya Produksi pada Petani Mandiri ditanggung sendiri, dimana biaya Bibit, Pupuk, Penyiangan, dan biaya produksi lainnya, ditanggung oleh petani secara mandiri. Hal tersebut juga sama terjadi pada Petani Non Mandiri (Marketing Contract), hanya saja pada Petani PIR-Trans, sarana dan prasarana, seperti Kapal Motor untuk mengangkut hasil produksi ke perusahaan, dibantu oleh PT. RSUP-Industri. Dalam hal keperluan petani lainnya seperti pupuk, dan lainnya, sudah ada koperasi yang menyiapkan pupuk perkebunannya, walaupun terkadang jumlah yang diperlukan tidak mencukupi kebutuhan petani, dan terkadang harganya relatif lebih mahal dari harga pasar.

Pada saat memasarkan hasil dari pertaniannya petani memasarkan cenderung mengikuti mekanisme pasar, dimana harga ditentukan oleh kekuatan pasar, petani dalam hal ini cenderung mengikuti pergerakan harga dari informasi perusahaan, Tokoh dan teman sesama petani. Petani Mandiri di dalam memasarkan hasil produksinya mempunyai saluran distribusi yang berbeda dengan Petani Non-Mandiri, dimana saluran distribusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Gambar : 3.2. Saluran Distribusi Petani Kelapa Mandiri



Petani Tata Kelola Mandiri dan Non-Mandiri di dalam memproduksi di hadapkan pada biaya-biaya sebagai berikut :

1. Biaya Produksi.

Biaya Produksi adalah sebagian atau keseluruhan faktor produksi yang dikorbankan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, dan digolongkan menjadi beberapa kategori :

f. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Merupakan biaya yang dalam periode waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah, serta tidak tergantung pada banyak sedikitnya jumlah produksi yang berhasil di produksi. Contohnya Biaya penyusutan mesin, biaya penyusutan nilai gedung, pajak perusahaan, serta biaya administrasi

g. Biaya Variabel (Variable Cost)

Biaya yang jumlahnya dapat berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi yang berhasil di produksi. Kaitannya semakin banyak jumlah produksi yang dihasilkan, maka akan semakin besar pula jumlah biaya

variabel yang dibutuhkan. Contoh : Biaya bahan Baku, upah tenaga kerja, dll

2. Transaksi

Biaya Transaksi menurut Furubot dan Richter (2002) adalah sebagai biaya dari sistem jalannya ekonomi. Biaya transaksi termasuk biaya rutin, biaya pendirian, pemeliharaan ataupun perubahan desain suatu sistem dasar dari model kelembagaan.

Tipe biaya transaksi ada 3 yaitu :

- A. Biaya Penggunaan Pasar (*Market Transaction Cost*), seluruh biaya yang dikeluarkan agar barang/jasa bisa sampai kepasar : Biaya persiapan kontrak, Biaya memutuskan kontrak
- B. Biaya Manajerial (*manajerial Transaction Cost*), Biaya pengawasan (*monitoring*), pemaksaan kewajiban yang ada dalam kontrak, dll
- C. Political Transaction Cost, rangkaian biaya yang diasosiasikan untuk menggerakkan dan menyesuaikan dengan kerangka politik kelembagaan

3. Risiko Usaha

Risiko Usaha adalah suatu tindakan yang selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak terduga dan tidak diharapkan.

Biaya Produksi, Biaya Variabel dan Risiko Usaha, dimana masing-masing

Petani, baik Petani Mandiri, maupun Petani Non Mandiri akan berhadapan pada biaya dan risiko usaha tersebut, dan dari hal tersebut petani akan memperoleh pendapatan. Besar kecilnya pendapatan dari masing-masing petani tersebut tentu berkaitan dengan bagaimana petani tersebut memanfaatkan biaya-biaya tersebut dengan efisien.

Tingkat kesejahteraan petani yang diukur berdasarkan pendapatan bersih yang diterima ditentukan dari selisih biaya yang dikeluarkan dengan penerimaan yang diperoleh. Tiga komponen biaya meliputi biaya produksi yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel, biaya transaksi merupakan biaya yang timbul dari adanya negosiasi atau kontrak, serta biaya resiko usaha yang berkaitan dengan ketidakpastian iklim perdagangan. Biaya produksi bersifat *given* artinya bahwa biaya yang dikeluarkan cenderung tetap dan tidak bisa diubah-ubah nilainya karena berhubungan dengan proses produksi. Oleh karena itu, untuk dapat mengefisiensi produksi, maka petani sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi.

Biaya transaksi dan resiko usaha bersifat lebih fleksibel mengikuti situasi dan iklim perdagangan. Idealnya, biaya transaksi adalah nol dimana dalam fungsi produksi dihitung berdasarkan biaya input sehingga keuntungan petani sepenuhnya dari hasil penjualan dikurangi dengan biaya produksi. Kenyataannya, ada biaya-biaya lain yang tidak ada kaitannya dengan produksi yang menyerap penerimaan semestinya. Biaya transaksi dan resiko usaha meliputi biaya menggunakan pasar (*market transaction cost*), biaya pengawasan (*managerial transaction cost*) dan biaya transaksi politik (*political transaction cost*).

Penelitian ini berfokus pada biaya transaksi yang dihadapi pada petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu biaya menggunakan pasar yang merupakan seluruh pengeluaran biaya agar barang dapat sampai ke pasar contohnya biaya persiapan kontrak, pencarian dan informasi pasar, biaya negosiasi dan keputusan/mengeksekusi kontrak, biaya transportasi, bahkan biaya resiko usaha seperti resiko produksi yang tidak terjual ataupun naiknya turunya harga produk karena ketidakpastian iklim perdagangan. Komponen

biaya yang harus dikeluarkan ini sangat membebani dan mengurangi kesejahteraan petani. Dalam meminimumkan biaya transaksi dan resiko, petani bergantung pada bentuk tata kelola mampu mengangkat pendapatannya. Berdasarkan kajian, tata kelola pertanian di Kabupaten Inhil digolongkan dalam dua karakteristik :

- (i) Petani Mandiri (Non-Kontrak) atau dikenal dengan *Spot Market*, petani yang sangat bergantung pada mekanisme pasar dengan karakter memiliki lahan perkebunan dan mengolah produksi secara mandiri, bebas melakukan penjualan tanpa campur tangan perusahaan atau pihak lain, umumnya setelah masa panen produk kelapa dipasarkan langsung ke konsumen atau ke pengepul / tokeh.
- (ii) Pertanian Kontrak atau *Contract Farming*, yaitu petani PIR – Trans dengan karakter para transmigran yang menerima bantuan lahan dari pemerintah sebagai sarana mencari penghidupan di tanah transmigrasi. Bantuan dari pemerintah termasuk bibit, pupuk, dan sarana penunjang produksi lainnya yang akan dihentikan jika para pekebun ini sudah mandiri. Proses pembukaan lahan petani PIR-trans dibantu oleh PT. RSUP-Perkebunan dengan kontrak perjanjian bahwa seluruh hasil panen petani akan dibeli oleh PT. RSUP-Industri. Cara ini dikenal dengan tata kelola kontrak pemasaran (*Marketing Contract*). Adapun bentuk kontrak lain dapat berupa Kontrak Produksi (*Production Contract*).
- (iii) Bentuk kontrak pertanian lainnya adalah Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*). Petani menjadi pekerja yang diupah oleh perusahaan tersebut. Perusahaan menanggung semua biaya produksi termasuk pembukaan lahan, bibit, pupuk, dan sebagainya. Hasil perkebunan dipasarkan ke industri untuk kemudian diolah. Proses integrasi dari hulu

sampai ke hilir produk kelapa dikenal dengan tata kelola integrasi vertikal. Di Inhil, PT RSUP Perkebunan dan Industri menyewa lahan perkebunan dari pihak pemerintah.

Biaya transaksi untuk masing-masing tata kelola budidaya yang dihadapi petani tentu berbeda-beda bergantung pada kondisi yang dihadapi petani di lapangan. Misalnya, petani *spot market* akan dihadapkan pada biaya transaksi dan resiko usaha berupa tidak ada jaminan produknya akan laku semua di pasar serta mahal biaya transportasi untuk mengirimkan produk ke pasar. Sedangkan petani kontrak akan menghadapi bentuk biaya transaksi berupa biaya negosiasi kontrak sebelum dipasarkan atau setelah diputuskannya kontrak, sementara petani tidak mempunyai kekuatan tawar (*bargaining power*) yang cukup kuat. Hal ini mengakibatkan pendapatan petani terserap untuk membiayai biaya-biaya karena keterbatasan informasi terkait produk yang dipasarkan (*asymmetric information*). Lain halnya dalam integrasi vertikal, petani akan dibebankan biaya-biaya apabila memutuskan kontrak karena sistem hirarki perusahaan yang terstruktur. Masing-masing bentuk tata kelola memiliki dampak yang berbeda terhadap pendapatan petani.

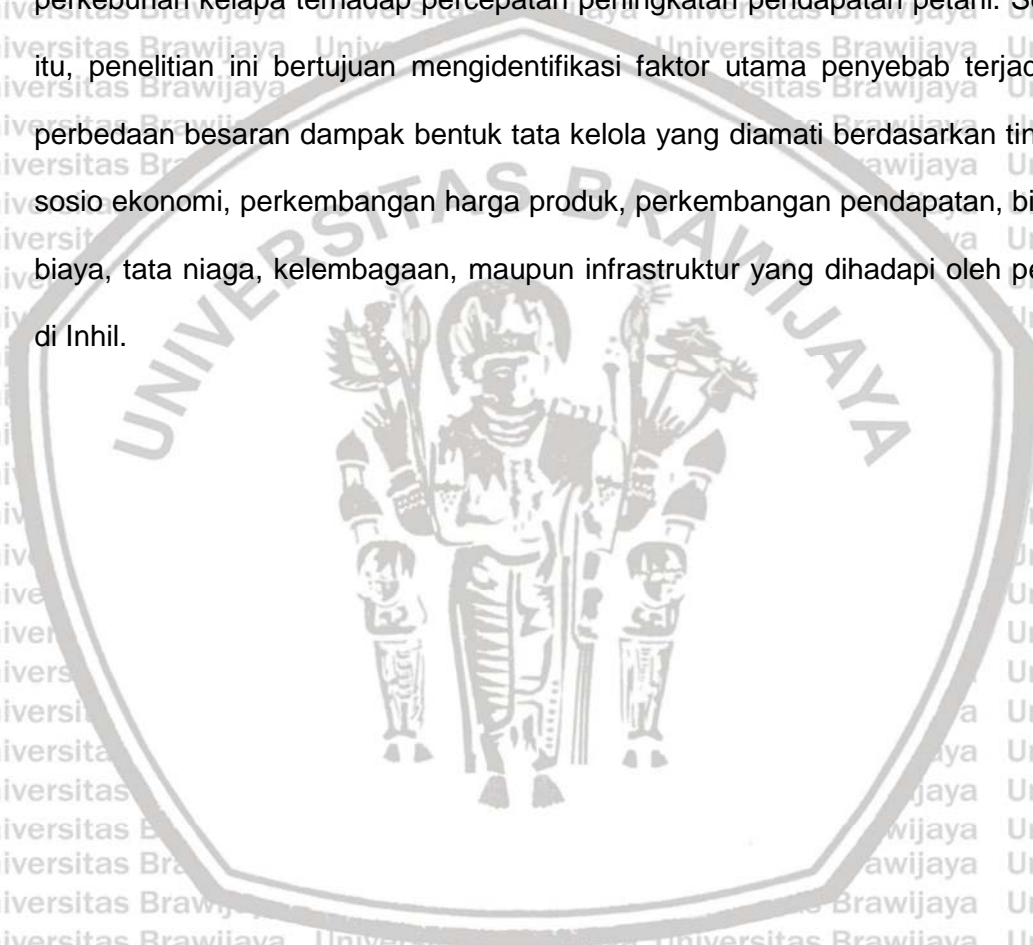
Secara umum biaya transaksi dapat dihitung melalui persamaan berikut:

- Biaya transaksi = biaya tetap + biaya variabel
- Biaya tetap (*fixed transaction costs*) : yaitu investasi spesifik yang dibuat di dalam menyusun kesepakatan kelembagaan (*institutional arrangements*) contohnya komisi + *transfer fee* + pajak
- Biaya transaksi variabel (*variable transaction cost*) : yaitu biaya yang tergantung pada jumlah dan volume transaksi contohnya biaya eksekusi + biaya oportunitas

- Biaya transaksi pasar (*market Transaction Cost*) : yaitu *price impact* + *market timing cost*. Contohnya biaya menyiapkan kontrak (biaya pencarian dan informasi), biaya mengeksekusi kontrak (biaya negosiasi dan pengambilan keputusan), biaya pengawasan dan pemaksaan yang tertuang dalam kontrak
- Biaya transaksi manajerial (*Managerial Transaction Cost*) = adalah biaya terkait dengan upaya menciptakan keteraturan yang meliputi: (1) biaya penyusunan (*setting up*), pemeliharaan, atau perubahan desain organisasi. Ongkos ini juga berhubungan dengan biaya operasional yang lebih luas, yang biasanya secara tipikal masuk dalam *fixed transaction cost*; dan (2) biaya menjalankan organisasi, yang kemudian dapat dipilah dalam dua sub kategori : (a) biaya informasi; dan (b) biaya yang diasosiasikan dengan transfer fisik barang dan jasa yang divisinya terpisah (*across a separable interface*).
- Biaya Transaksi Politik (*Political Transaction Cost*) = adalah biaya terkait pembuatan tata aturan/kelembagaan (*public goods*) sehingga transaksi pasar dan manajerial bisa berlangsung dengan baik. Meliputi: (1) biaya pembuatan (*setting up*), pemeliharaan, pengubahan organisasi politik formal dan informal, seperti: biaya penetapan kerangka hukum, struktur administrasi pemerintahan, militer, sistem pendidikan, pengadilan dll; biaya legislasi, pertahanan, administrasi hukum, pendidikan, termasuk didalamnya semua biaya pencarian/pengumpulan dan pengolahan informasi yang diperlukan agar tata pemerintah dapat berjalan; biaya upaya pelibatan masyarakat dalam proses politik termasuk ke dalam transaksi politik; (2) Biaya menjalankan bentuk pemerintahan peraturan pemerintah atau masyarakat yang bertata negara, seperti: biaya legislasi,

pertahanan, administrasi hukum, pendidikan, termasuk didalamnya semua biaya pencarian/pengumpulan dan pengolahan informasi yang diperlukan agar tata pemerintahan dapat berjalan; Biaya upaya pelibatan masyarakat dalam proses politik termasuk ke dalam transaksi politik.

Seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi besarnya dampak pada masing-masing bentuk tata kelola perkebunan kelapa terhadap percepatan peningkatan pendapatan petani. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor utama penyebab terjadinya perbedaan besaran dampak bentuk tata kelola yang diamati berdasarkan tingkat sosio ekonomi, perkembangan harga produk, perkembangan pendapatan, biaya-biaya, tata niaga, kelembagaan, maupun infrastruktur yang dihadapi oleh petani di Inhil.



BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei kepada sejumlah petani kepala di Kabupaten Inhil dengan disertai *in-depth interview* untuk mempertajam temuan penelitian. Penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan ilmiah yang runtut dan sistematis, maksudnya langkah-langkah yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan dimulai dari persiapan pelaksanaan sampai pada penyelesaian laporan penelitian.

4.2 Ruang Lingkup Penelitian

4.2.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka memenuhi kelengkapan data penelitian, maka dapat dikumpulkan melalui dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer.

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari kuesioner yang disampaikan kepada responden dan dilakukan wawancara langsung oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diambil dari dinas/instansi yang terkait dengan penelitian ini di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain Disperindag, Bappeda, Dinas Koperasi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir-Riau.

4.2.2 Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 kecamatan, dimana kabupaten yang penduduknya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani kelapa.

Alasan ditetapkannya Kecamatan Pulauburung sebagai lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Di pesisir pantai Pulau Burung banyak ditemukan Petani Mandiri (*Spot Market*) yang menjalankan perkebunannya secara mandiri, mulai dari menanam, penyiangan, pemberian pupuk, sampai saat panen dan menjualnya kepasar, semua dilakukan secara mandiri.
- b. Terdapat Pertanian Inti Rakyat (PIR) yang dikenal dengan Pertanian Kontrak (*Marketing Contract*), dimana menjalankan perkebunannya diikat oleh kontrak dengan PT. RSUP-Perkebunan, terutama pada saat mulai dari penanaman, penyiangan, pemberian pupuk, dibantu oleh perusahaan, lalu pada saat panen petani harus menjualnya keperusahaan, sesuai dengan kontrak yang dilakukan dengan perusahaan. Tata Kelola Pertanian Inti Rakyat (PIR-Trans), dengan komoditas kelapa, di Indonesia hanya ditemui di Kecamatan Pulau Burung, dan tidak ditemui di kecamatan lainnya di Indonesia.
- c. Terdapat juga Anak perusahaan Sambu Group, PT. Riau Sakti United Plantation Perkebunan (PT. RSUP-Perkebunan) sebagai jenis Tata Kelola Pertanian Integrasi Vertikal (*Vertical Integration*) yang terintegrasi juga dengan PT. RSUP-Industri untuk mengolah dan memasarkan produk kelapa. PT. RSUP-Perkebunan di dalam mengusahakan perkebunan menggunakan sistem Kontrak Pertanian (*Contract Farming*), dimana segala sesuatu bentuk perkebunan di usahakan oleh PT. RSUP-Perkebuna, sementara petani hanya sebatas karyawan perusahaan, yang diberi gaji perbulannya, bonus, dll sesuai dengan kesepakatan kontrak antara petani dengan perusahaan.

Ketiga Tata Kelola kelapa tersebut tidak ditemui di 19 kecamatan lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan sifat keunikan dari kelengkapan jenis perkebunan kelapa tersebut dan tidak ditemukan di kecamatan lain yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis tertarik untuk menetapkan Kecamatan Pulau Burung sebagai tempat riset penelitian

4.2.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan selama kurun waktu 2 tahun, dimulai bulan Mei 2012 sampai dengan Juni 2015.

4.3 Metode Pengolahan Data

4.3.1 Populasi

Populasi menunjukkan keadaan dan jumlah objek penelitian secara keseluruhan yang memiliki karakteristik tertentu. Dalam populasi ataupun jumlah bagian-bagian populasi (Teguh, 2001). Sementara Bingkai populasi adalah sebuah daftar dari semua elemen dalam populasi, dimana sampel akan ditarik (Ferdinand, 2006).

Masalah pembatasan populasi dan cara penentuan sampel (*sampling*) menjadi sangat penting dalam penelitian survei. Penelitian survei bertujuan memperoleh diskripsi objektif mengenai keadaan populasi. Oleh karena itu, batasan dan karakteristik populasi harus jelas dan tegas (Anwar Sanusi, 2004).

Untuk mengetahui keadaan dan kondisi populasi yang nantinya sebagai objek penelitian, maka dapat diketahui berdasarkan jumlah petani kelapa yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Burung. Jumlah petani kelapa yg berada di Kecamatan Pulau Burung sebanyak 6.312 petani (Data Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, 2013).

4.3.2 Penarikan Sampel

Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, peneliti tertarik untuk mendapatkan data-data tentang karakteristik dari populasi dengan

mengelompokkan fakta-fakta dari seluruh anggota populasi. Namun dalam penelitian survei tidak semua data pada populasi diambil tetapi sebagian saja yang dapat mewakili (representatif) dari keseluruhan populasi.

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita meneliti seluruh anggota populasi. Oleh karena itu kita membentuk sebuah perwakilan dari populasi yang disebut sampel (Ferdinand, 2006). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, Sugiyono (2003). Menurut (Sugiyono, 2003) dan (Ferdinand, 2006), teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat beberapa teknik sampling yang sering digunakan.

Dalam kaitannya dengan penentuan besarnya sampel yang harus diambil, banyak para ahli memberikan formulasi yang berbeda-beda (Karlingger, 1992) misalnya menyarankan besarnya sampel agar lebih besar dari 30 kasus. Berbeda dengan (Ferdinan, 2002) ukuran sampel responden harus disesuaikan dengan alat analisisnya, sedangkan yang sesuai dalam Analisis Faktor dan Analisis Muple Regeresion adalah sekitar 100-200 responden atau minimal sebanyak 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator dalam variabel laten.

Sedangkan (Arikunto, 1995), membedakan untuk subyek yang kurang dari 100 dengan yang lebih dari 100, menyatakan sebagai berikut, apabila subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10%-15%, atau 20%-25% atau lebih tergantung pada kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek dan besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti.

Pengambilan sampel berstrata merupakan teknik pengambilan sampel dimana populasi dikelompokkan dalam strata tertentu, kemudian diambil sampel secara random dengan proporsi yang seimbang sesuai dengan posisi dalam populasi. Apabila jumlah sampel disamakan untuk tiap strata cara ini disebut penarikan sampel strata tak proporsional (*Disproportional Stratified Sampling*).

Diketahui jumlah populasi petani kelapa di Kecamatan Pulauburung adalah 6.312 petani, dan dengan menggunakan metode slopin dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e = Toleransi

Dalam penelitian ini mengingat luasnya medan, dan keterbatasan penulis dari segi waktu, biaya dan tenaga, maka penulis menetapkan tingkat toleransi 10%, dengan hasil 98,44 orang sampel dan dibulatkan menjadi 100 orang petani yang dibagi 50 orang Petani Mandiri (*Spot Market*) dan 50 orang Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*). Dari masing-masing kelompok tersebut, diambil anggota sampel 10 orang untuk masing-masing kelompok petani, dimana kelompok yang lokasinya berdekatan dengan pasar (PT. RSUP-Industri). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Sebaran Responden Petani Kelapa di Kec. Pulauburung, Kab. Indragiri Hilir

Desa Mandiri		Desa Non Mandiri	
Desa Pulau Burung	10 orang	Desa SP I Mayang Sari Jaya	10 orang
Desa Teluk Nibung	10 orang	Desa SP II Bukit Sari Intan Jaya	10 orang
Desa Sungai Danai	10 orang	Desa SP III Manunggal Jaya	10 orang
Desa Mayang Sari	10 orang	Desa SP IV Bangun Harjo Jaya	10 orang
Desa Intan Sari	10 orang	Desa SP V Ringin Jaya	10 orang

JUMLAH	50 orang	JUMLAH	50 orang
---------------	-----------------	---------------	-----------------

Data yang diolah oleh penulis

Adapun kriteria penetapan sampel sebagai berikut :

1. Petani yang terlibat langsung di dalam Tata Kelola Petani Mandiri (*Spot Market*) dan Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*)
2. Petani sekaligus pemilik lahan
3. Yang memiliki lahan 1 hektar atau lebih
4. Petani yang langsung terlibat dalam proses produksi
5. Petani yang memiliki informasi tentang tata kelola kelapa yang lebih luas
6. Petani yang mau dijadikan sampel di dalam penelitian ini

4.4 Instrumen Penelitian

Dalam rangka untuk mendapatkan informasi/data dari responden penelitian, maka peneliti menggunakan alat yang dipakai untuk mengumpulkan data melalui pengamatan, wawancara, kuisioner, dokumenter.

Agar instrumen ini dapat berfungsi secara efektif, maka syarat validitas dan reliabilitas harus diperhatikan. Pada suatu kegiatan penelitian dapat dipergunakan lebih dari satu metode pengumpulan data, berarti ada satu atau beberapa variabel yang diteliti melalui dua metode (kuisioner dan pengamatan).

Untuk itu disusun dua instrument (Gulo, 1978), yaitu:

1. Untuk Instrumen Pengamatan
2. Untuk Instrumen Wawancara

Titik tolak dari penyusunan instrumen penelitian ini adalah variabel penelitian sendiri. Kembali kepada pemahaman kita, bahwa konsep adalah abstraksi dari fenomena yang sifatnya masih abstrak, sehingga bisa diukur. Agar bisa diukur, harus dioperasionisasikan menjadi variabel dengan cara memberikan nilai terhadap konsep atau konstruk. Dari variabel dicari dimensinya,

kemudian ditentukan indikator-indikatornya sehingga dapat disusun pertanyaan yang berfungsi sebagai alat atau instrument pengumpul data (Anwar, 2003).

Peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui secara rinci tata kelola perkebunan kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, khususnya di Pulau Burung. Dengan demikian, informan akan mampu memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing kelompok petani terkait dengan kontrak pertanian yang dijalankan.

Pihak-pihak yang dianggap mampu memberikan informasi yang dibutuhkan antara lain: (i) Kepala Desa Pulau Burung; (ii) Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir; dan (iii) Perwakilan dari PT RSUPP, Pengurus Kopersi, Petani Mandiri (*Spot Market*) dan Petani Non Mandiri

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menyebarakan kuisioner kepada para responden yaitu petani untuk menjawab dan memberikan persepsi mereka tentang pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Kuisioner merupakan daftar pertanyaan (*question list*) tertulis guna mendapatkan informasi dari responden berdasarkan masalah atau hal-hal yang diketahuinya. Dengan kuisioner dan hasil wawancara tersebut selanjutnya dilakukan evaluasi dan tabulasi untuk memperoleh gambaran mengenai setiap sampel yang diamati.
2. Melakukan wawancara baik terstruktur maupun tidak terstruktur (*in-depth interview*) dari respon dengan mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari variabel-variabel penelitian yang dapat mendukung hasil analisis kuantitatif dengan cara menggali informasi secara kualitatif dari responden terpilih. Wawancara terstruktur dilakukan dengan tujuan untuk menggali informasi yang bersumber dari responden petani. Sedangkan wawancara tidak terstruktur dipergunakan juga untuk menggali informasi yang bersumber dari informan kunci agar penelitian ini mengeksplorasi

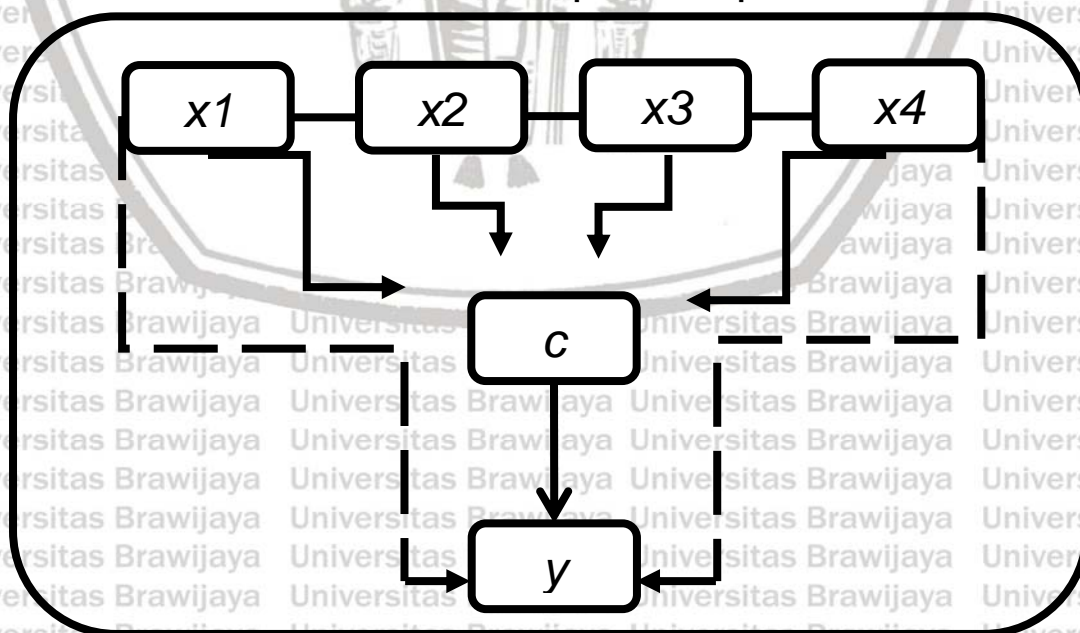
alasan petani memilih Pertanian Mandiri (*Spot Market*) atau Petani Non Mandiri (*Marketing contract*).

3. Pengamatan jarak dekat dengan mengamati kegiatan petani kelapa di dalam mengelola perkebunannya,
4. Dokumentasi, mengambil data sekunder pada instansi-instansi terkait, berupa dokumen jumlah petani kelapa, luas area kelapa, dll.

4.5 Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonometri metode *treatment effect* yang membandingkan perlakuan (intervensi) dalam percobaan acak, preferensi, atau evaluasi intervensi kebijakan. Metode ini mengukur perbedaan nilai rata-rata (*mean*) unit yang ditentukan sebagai variabel *treatment* dan variabel kontrol. Pada percobaan acak, *treatment effect* dapat mengestimasi sampel dengan membandingkan nilai rata-rata untuk *treated* dan *untreated units* yang diamati (Holland, 1986). Gambar 4.1 memberikan gambaran model *treatment effect*.

Gambar 4.1: *Treatment Effect* pada Pendapatan Petani



Sumber: Penulis, 2016

Dalam penelitian ini, variabel x (bias berupa X_1, X_2, X_3, \dots dst) merupakan variabel *treatment* yang meliputi: X_1 = sosio-ekonomi, X_2 = perkembangan pendapatan, X_3 = biaya produksi, X_4 = biaya transaksi (tata niaga kelapa), X_5 = mekanisme pemasaran, X_6 = kelembagaan, serta X_7 = infrastruktur yang dihadapi petani. Variabel C merupakan variabel tidak langsung untuk menentukan bentuk tata kelola yang dipilih oleh petani, dimana ditandai dengan 1 dan 0. Tujuannya adalah untuk mengetahui bentuk tata kelola yang dipilih petani yaitu Petani Mandiri (*Spot Market*) dan Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*). Sementara Variabel y adalah untuk mengetahui pendapatan petani. Dalam metode *treatment* ini akan mengamati dampak tata kelola pertanian kelapa terhadap peningkatan pendapatan petani melalui hubungan langsung dan tidak langsung.

Hubungan tidak langsung menunjukkan bahwa variabel *treatment* akan berpengaruh terhadap pendapatan yang ditentukan oleh keputusan petani memilih bentuk tata kelolanya yaitu melalui tata kelola Petani Mandiri (*Spot Market*) atau Non Mandiri (*Marketing Contract*). Sedangkan hubungan langsung menunjukkan bahwa variabel *treatment* berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan petani kelapa. Hal ini mencerminkan bahwa ada faktor utama dan faktor pendukung yang berpengaruh dalam peningkatan pendapatan petani.

Penelitian ini tidak menggunakan metode simultan dikarenakan salah satu persamaan pada bersifat binomial, maka harus diselesaikan dengan menggunakan probit atau logit. Maka persamaan ini disebut persamaan *treatment effect*.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Profil Petani Kelapa Indragiri Hilir

5.1.1 Karakter Petani Kelapa

Tabel 5.1 berikut mengilustrasikan kondisi petani kelapa di kabupaten Indragiri Hilir secara umum.

Tabel 5.1
Gambaran Umum Petani Kelapa Kabupaten Indragiri Hilir

Indikator	rata-rata	st. Dev	Minimum	Maksimum
Kontrak	0.37	0.49	0.00	1.00
Pendapatan(ribuan)	15,837.58	17,041.17	560.00	99,000.00
biaya tetap u/ produksi (ribuan)	848.63	2,261.87	0.00	13,500.00
biaya variabel u/ produksi (ribuan)	4,668.60	6,613.38	43.00	25,120.00
total biaya produksi (ribuan)	5,517.23	8,311.43	43.00	38,380.00
biaya transaksi organisasi (ribuan)	190.84	366.35	0.00	1,200.00
biaya transaksi angkut (ribuan)	573.21	1,124.85	0.00	6,500.00
total biaya transaksi (ribuan)	764.05	1,091.52	30.00	6,500.00
usia kepala rumah tangga	48.28	10.01	25.00	70.00
lama pendidikan kepala rumah tangga	7.77	2.63	6.00	16.00
jumlah tanggungan keluarga	4.28	1.80	0.00	8.00
tingkat resiko usaha kelapa kelapa	0.86	0.35	0.00	1.00
tingkat keluasan jejaring sosial petani	0.33	0.47	0.00	1.00

Sumber: Penulis, data diolah (2016)

Sebagian besar petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir memilih untuk mengerjakan lahannya secara mandiri. Kurang lebih hanya 30% dari petani yang melakukan kontrak penjualan dengan perusahaan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah jumlah keluarga petani yang cukup besar, rata-rata setiap kepala keluarga menanggung 4,28 jiwa. Dengan demikian tersedia tenaga kerja yang cukup untuk mengerjakan lahan secara mandiri. Dan walaupun petani pada saat panen memerlukan tenaga tambahan, maka petani dapat meminta tolong kepada petani lainnya dengan biaya upah yang cukup terjangkau. Pada sistem

Pertanian Mandiri dan Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) juga mengenal upah tenaga kerja untuk mengelola perkebunannya.

Pada Tata Kelola Petani Mandiri (*Spot Market*), pada saat panen kelapa, dimana petani tidak mempunyai tenaga kerja yang cukup untuk memanen hasil produksi kelapanya sendiri, petani dapat meminta bantuan dengan menggunakan tenaga kerja dari petani tetangga lainnya, untuk membantu memanen hasil produksi perkebunannya. Adapun upah yang dikenal pada sistem panen tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Sistem bagi bagi 2 (dua)
- B. Sistem 3 (tiga) dan
- C. Sistem bagi 5 (lima).

Dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Sistem Bagi Dua

Sistem bagi 2 (dua) adalah, perjanjian dimana petani tidak ikut bekerja lagi di perkebunan, segala sesuatunya, mulai dari merawat pohon kelapa, memupuk kelapa, membersihkan rumput, mengait kelapa, mengupas kelapa, membawa kelapa sampai ke perusahaan, dilakukan oleh pekerja (buruh), termasuk biaya transportasi membawa hasil produksi kepasar (perusahaan). Dan apa bila sudah menghasilkan, maka hasilnya di bagi dua antara petani dengan pekerja (buruh).

B. Sistem Bagi Tiga

Sistem bagi 3 (tiga), yaitu petani tetap ikut merawat tanamannya, seperti menebas rumput, memberi pupuk, dan lainnya. Namun pada saat akan panen dimana pemilik kebun tidak memiliki tenaga kerja yang cukup, maka dapat mengupahkan kepada petani lain, dengan sistem upah bagi tiga.

Adapun sistem bagi tiga yaitu persentase pembagian hasil yaitu sebagai berikut :

Bila penghasilan kelapa sebesar Rp 3.000.000,- maka petani pemilik mendapatkan Rp 2.000.000,- (66,7%) dan petani pekerja perkebunan mendapatkan upah Rp 1.000.000,- (33,3%) ini sudah termasuk menanggung biaya transportasi membawa hasil produksi ke perusahaan, ditanggung oleh pekerja.

C. Sistem Bagi Lima

Praktik pengupahan dengan sistem bagi lima adalah perbaikan dari sistem bagi tiga, dimana dengan sistem bagi tiga tersebut, pekerja (buruh) merasa sangat sedikit mendapatkan upah. Maka dari perbaikan tersebut dikenal dengan sistem upah bagi lima. Dengan sistem upah bagi 5 (lima) ini sudah lama berjalan, dan dengan sistem bagi hasil ini, merupakan yang lebih menguntungkan bila dilihat dari sisi pekerja dan banyak digunakan saat ini, dan dapat digambarkan sebagai berikut :

Bila produksi kelapa menghasilkan Rp 5.000.000,- maka sistem pembagiannya sebagai berikut : Rp 3.000.000,- (60%) untuk petani pemilik lahan, dan Rp 2.000.000,- untuk petani pekerja perkebunan, pendapatan Rp 2.000.000,- (40%) sudah termasuk juga biaya transportasi membawa hasil produksi ke perusahaan industri.

Pada sistem Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) juga mengenal upah tenaga kerja dengan sistem bagi dua, seperti di atas, dan tidak mengenal sistem upah bagi tiga dan sistem upah bagi lima

Faktor lain yang mendorong petani tidak melakukan kontrak dalam mengerjakan lahannya adalah tidak luasnya jejaring sosial yang dimiliki oleh

petani. Hanya sebagian kecil petani yang mengaku memiliki jejaring sosial yang cukup bagus yang mendukung kegiatan pertaniannya.

Usia kepala keluarga petani kelapa tidak terlalu bervariasi. Rata-rata kepala keluarga berumur 48,2 tahun dengan kepala keluarga yang termuda masih berusia 25 tahun sedangkan yang tertua berumur 70 tahun. Pendidikan kepala keluarga petani tergolong cukup rendah, rata-rata hanya bersekolah selama 7,7 tahun atau hanya di tingkat SD dan SMP. Hanya sedikit petani yang mampu menamatkan pendidikan hingga SMA, bahkan hanya satu atau dua orang saja kepala keluarga petani yang menamatkan hingga jenjang Strata-1 (S1).

Pertanian kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong cukup beresiko. Sebanyak 86% responden menyatakan menghadapi resiko-resiko yang cukup banyak dalam kegiatan pertanian. Resiko-resiko yang dihadapi antara lain kesulitan dalam menjual, serangan hama, penolakan produk akibat kualitas yang tidak standard, serta harga jual kelapa yang cenderung kurang stabil.

Pendapatan rata-rata petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 15,8 juta Rupiah. Namun bila melihat besaran standar deviasi yang lebih tinggi dari nilai rata-ratanya, dapat disimpulkan bahwa pendapatan petani kelapa tidak merata. Pendapatan terkecil tercatat hanya sebesar 560 ribu rupiah sedangkan pendapatan terbesar mencapai 99 juta rupiah. Bila melihat struktur biaya produksi petani kelapa, diketahui bahwa porsi terbesar biaya produksi digunakan untuk biaya variabel yang meliputi perawatan pohon kelapa, penggunaan pupuk, dan penggunaan obat pembasmi hama/rumput. Sedangkan biaya tetap yang harus dikeluarkan oleh petani untuk bibit dan membuka lahan tidak terlalu besar karena pohon kelapa tidak perlu sering diganti dengan pohon baru. Pohon

kelapa dapat dimanfaatkan hasilnya mulai berumur 6-7 tahun dengan sistem tebang pilih.

Rata-rata dalam setahun petani mengeluarkan biaya sebesar 5,5 juta untuk perawatan lahannya, biaya ini digunakan untuk pembelian pupuk, penyiangan dan racun rumput. Total biaya terkecil yang dikeluarkan petani hanya sebesar 43 ribu rupiah, sedangkan yang tertinggi mencapai 38 juta rupiah, dengan standard deviasi sebesar 8 juta, lebih tinggi dari rata-ratanya. Biaya yang dikeluarkan petani tidak merata dikarenakan luasnya lahan yang berbeda-beda, serta tidak ada standar baku di antara petani dalam merawat kebunnya. Kebanyakan petani menentukan sendiri kualitas dan kuantitas pupuk dan obat hama yang digunakan, kecuali bagi yang mengikuti kontrak dengan perusahaan maka kualitas dan kuantitasnya ditentukan oleh perusahaan.

Permasalahan lainnya yang dihadapi petani Tata Kelola Pertanian Kelapa adalah sulitnya petani di dalam memperoleh pupuk. Apalagi pada Pertanian Non Mandiri (*Marketing Contract*), dimana jenis kelapa yang ditanam adalah jenis kelapa Hibrida, dimana hasil produksinya jika ingin bagus tergantung kepada perawatan (penyiangan) dan pemberian pupuk yang tepat dan teratur, jika tanaman kelapa tidak diberi pupuk, maka produksinya tidak akan menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan (meningkat).

Namun pada kenyataannya petani sangat sulit sekali memperoleh pupuk hal ini karena ketersediaan pupuk yang tidak selalu ada sepanjang periode, contohnya bila periode ini petani memerlukan pupuk sekitar 100 ton, namun pupuk yang tersedia paling banyak sekitar 40 ton. Dan pupuk yang masuk ke daerah Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) dalam hal ini Petani PIR Trans melalui Koperasi, itu adalah pupuk yang di datangkan entah dari mana. Karena Koperasi yang berada disekitar Kecamatan Pulau burung ini tidak ada yang

memiliki Delivery Order (DO). Sehingga mendatangkan pupuk tersebut dengan biaya yang tinggi, dan akibatnya pupuk yang sampai ke tingkat petani harganya akan menjadi lebih tinggi lagi.

Walaupun harga pupuk tinggi pada Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) namun petani tetap harus membeli pupuk. Karena jenis kelapa yang ditanam oleh Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) adalah jenis kelapa Hibrida, dimana jenis kelapa ini harus terus dilakukan pemupukan dan perawatan.

Karena, walau tanaman kelapa Hibrida ini dirawat sebaik apapun, namun kalau tidak di pupuk, maka pohon kelapa tersebut tidak akan mungkin menghasilkan produksi sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut berbeda dengan jenis Kelapa Dalam, yang ditanam oleh Petani Mandiri, dimana walaupun pohon kelapanya tidak di beri pupuk, maka pohon kelapa petani tetap dapat berproduksi, namun hasilnya tidak sebaik bila di rawat (penyiangan rumput) dan diberi pupuk dengan takaran yang tepat, maka akan menghasilkan produksi kelapa yang baik sesuai dengan yang diharapkan.

Sebenarnya Petani Kelapa sudah merasa bersyukur dalam kurun waktu 20 tahun ini di Kabupaten Indragiri Hilir, dimana Tim TP3D Pemerintah Daerah Tingkat II dan Tim TP3D Provinsi Tingkat I sudah betul mewakili petani memfasilitasi untuk persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani. Namun setelah reformasi akhirnya petani merasa sendiri lagi, karena program tersebut sudah tidak ada lagi. Dimana Tim TP3D Provinsi tingkat I dan Kabupaten Tingkat II sudah tidak ada. Kalaupun nyatanya ada namun sudah tidak berjalan dan tidak ada fungsinya lagi, dimana dulu tim ini sudah sampai ke Jakarta (pusat), namun akhirnya keputusan, pusat menyerahkan hal tersebut kepada TP3D Provinsi Tim Tingkat I, dan Tim TP3D Tim Provinsi tingkat I menyerahkan kembali ke Tim TP3D Kabupaten tingkat II, untuk membuat proteksi tentang harga yang dapat

dituangkan dalam sebuah payung hukum yang jelas, namun sampai saat ini di tingkat II tidak ada tindak lanjutnya. Yaitu masalah proteksi pada di tingkat petani di Kabupaten Indragiri Hilir.

Karena selama tidak adanya Tim TP3D Tingkat I dan Tingkat II, harga lebih ditetapkan oleh sepihak, yaitu oleh perusahaan, bahwa harga yang ditentukan saat ini tidak ada lagi negosiasi antara Perusahaan, Pemerintah dan Petani. (Tripartit). Dimana dulu ada forumnya, namun saat ini forum sudah tidak berjalan.

Saat ini perusahaan menetapkan harga berdasarkan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya, namun akhir-akhir ini perusahaan cenderung sudah tidak mengikuti ketentuan yang sudah disepakati bersama, dimana harga cenderung ditetapkan sendiri, karena perusahaan sudah mempunyai rumus harga, dan ini diberlakukan perusahaan, tapi pada saat rumus harga itu merugikan perusahaan, rumus tersebut tidak lagi dipakai oleh perusahaan, maka cenderung membuat rumus baru lagi yang cenderung menguntungkan perusahaan, yang tidak dimengerti oleh petani.

Jadi yang diinginkan oleh petani kelapa saat ini adalah proteksi harga, Karena menurut petani harga yang ditetapkan oleh perusahaan pada saat ini adalah harga yang masih jauh dari harga yang ada di pasaran. Karena menurut petani bahwa kapal-kapal dari Malaysia, Thailan, Singapura, mampu membeli produksi hasil kelapa di atas harga perusahaan. Bagi Petani Kontrak, hal tersebut tidak mungkin dilakukan, karena sudah terikat dengan kontrak yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana hasil produksi kelapanya petani PIR-Trans harus dijual ke perusahaan yang sudah ditunjuk.

Pola yang sama juga nampak pada biaya transaksi yang dihadapi petani. Antara satu petani dan yang lain menghadapi biaya transaksi yang berbeda.

Rata-rata petani menghadapi biaya transaksi sebesar Rp 700.000,- akan tetapi jika melihat standard deviasi yang cukup besar sebesar 1,1 juta rupiah maka dapat diketahui bahwa sebenarnya biaya transaksi yang dihadapi oleh para petani cukup bervariasi. Biaya transaksi terkecil yang dihadapi petani hanya sebesar 30 ribu rupiah, sedangkan yang terbesar mencapai 6 juta rupiah.

Pengeluaran biaya transaksi secara umum terbagi menjadi dua yaitu biaya transaksi untuk organisasi dan biaya angkut. Biaya angkut yang dihadapi petani bervariasi mengingat luas lahan yang berbeda serta jarak antara lahan dengan tempat penjualan yang juga berbeda-beda. Ada petani yang hanya mengeluarkan sedikit biaya untuk mengangkut hasil panennya karena pengepul sendiri yang menjemput hasil panen tersebut, namun ada juga petani yang harus menyewa kapal motor untuk mengangkut hasil panennya menuju ke tempat penjualan. Biasanya petani dipotong untuk biaya angkut (transportasi) sekitar Rp 50 s.d. Rp 100 rupiah perbutir kelapa, tergantung jauh atau dekatnya lokasi antara perkebunan kelapa dengan perusahaan.

Tata Kelola Petani Mandiri (*Spot Market*)

Kelebihan :

1. Petani Mandiri (*Spot Market*) menggunakan jenis Bibit Kelapa Dalam
2. Umur kelapa 50 s.d. 60 tahun
3. Tidak perlu perawatan khusus, bila dilakukan perawatan yang khusus, pemberian pupuk yang cukup, dan penyiangan rumput yang tepat, hasil produksi dapat lebih baik.
4. Buah kelapa relatif baik. Ukuran besar (Kina) 30-40 persen, ukuran sedang 40-60 persen, dan ukuran kecil hanya sekitar 10 persen

Kekurangan :

1. Tidak ada perbaikan dan perawatan Parit sebagai sarana untuk mengairi perkebunan kelapa dan sekaligus untuk sarana transportasi mengangkut hasil produksi.
2. Parit yang ada adalah sarana untuk pengairan ke kebun petani, namun pada musim pasang tinggi dapat berakibat air pasang (air asin) dapat masuk ke perkebunan petani, dan terkadang tergenang, dikarenakan sistem pengairan perkebunan petani yang tidak baik (tradisional), dan ini dapat berakibat menurunnya hasil produksi.
3. Jenis Kelapa Dalam, mulai berproduksinya agak lama, dimulai umur kelapa 7 tahun dan baru belajar berbuah.

Tata Kelola Non Mandiri (*Marketing Contract*)

Pada Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) dimana biaya-biaya mempengaruhi pendapatan. Pada sistem Pertanian Kontrak ini mempunyai kelebihan dan kekurangan antara lain :

Kelebihan :

1. Sistem Perairan yang senantiasa terjaga, dimana tinggi dan rendahnya permukaan air pada perkebunan kelapa Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*), senantiasa dijaga oleh pihak perusahaan PT. RSUP-Perkebunan, jadi tidak terjadi lahan yang kekurangan air atau sebaliknya lahan terendam karena banjir. Hal ini dikarenakan perusahaan senantiasa menjaga tinggi-rendahnya permukaan air yang ideal untuk perkebunan kelapa.
2. Adanya kepastian pemasaran, bahwa petani Non Mandiri sudah ada kepastian pemasaram, walaupun sampai saat ini petani masih mengeluh

tentang harga kelapa yang masih turun-naik, terkadang masih terjadi harga di bawah standar seperti yang diinginkan petani.

3. Bantuan pupuk, bibit dan sarana produksi pada awal penanaman (pembukaan lahan). Pada Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*), pada saat pembukaan lahan, petani dibantu oleh Perusahaan dari segi Kanal, pembukaan lahan, Pupuk, Bibit, dan sarana produksi lainnya. Ini terus dilakukan sampai petani sanggup berdiri sendiri, dimana kebun petani sudah dapat berproduksi/menghasilkan.

4. Bantuan biaya transportasi. Pada saat petani ingin memasarkan hasil produksinya, Perusahaan meminjamkan kapal (pompong) untuk mengangkut produksi kelapa ke PT. RSUP-industri, petani hanya mengeluarkan biaya Juru Mudi Kapal, Kernet Kapal dan Bensin saja.

5. Umur produksi lebih singkat, dimana jenis hibrida ini masa panennya dapat lebih cepat, sekitar umur sekitar 5 tahun, sudah dapat berproduksi (panen). Namun Umur produktifnya lebih singkat yaitu berkisar antara 25 s.d. 30 tahun

Kekurangan :

1. Karena terikat kontrak Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) tetap harus menjual hasil produksinya ke perusahaan dalam hal ini PT. RSUP-Industri, dimana lokasi perusahaan cukup jauh dari lokasi perkebunan. Sehingga walaupun Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) pada saat memasarkan hasil produksinya dibantu dengan transportasi berupa kapal/pompong oleh PT RSUP-Industri, namun petani Non Mandiri tetap harus mengeluarkan biaya bensin, juru mudi dan kernet kapal. Jadi tetap harus mengeluarkan biaya transportasi ekstra.

2. Jenis tanaman, pada Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*), jenis tanaman sudah ditetapkan di dalam kontrak, jenis kelapa yang ditanam adalah Kelapa Hibrida, jenis tanaman ini agak manja, dimana harus terus di pupuk dan dilakukan perawatan (penyiangan rumput), karena bila tidak dilakukan perawatan tersebut, mengakibatkan produksi kelapanya bisa turun drastis, sehingga akan mengeluarkan biaya produksi yang jauh lebih besar.
3. Umur kelapa hibrida hanya bertahan sekitar 25 s.d 30 tahun
4. Buah kelapa berukuran besar hanya berkisar 10-15 persen, Kelapa ukuran sedang berkisar 40-50 persen, dan kelapa ukuran kecil berkisar 20-35 persen

5.1.2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam meningkatkan taraf hidup petani kelapa di Kab. Indragiri Hilir, pemerintah juga sudah melakukan usaha-usaha antara lain :

1. Membantu penyediaan Sarana dan Prasarana.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, senantiasa membantu petani kelapa antara lain dengan cara menjaga dari kerusakan perkebunan yang semakin parah, dikarenakan kurangnya pengetahuan petani dalam mengelola perkebunan, berupa penyuluhan-penyuluhan terkait pengelolaan kelapa kepada para petani. Juga memberikan bantuan berupa perbaikan kebun kelapa yang rusak, melalui pihak kecamatan, bantuan yang diberikan berupa penyediaan alat berat untuk menggarap lahan yang rusak dan memperbaiki kanal-kanal yang ada di perkebunan tersebut, walaupun bantuan tersebut dirasakan petani belum maksimal dan merata kesemua kecamatan.
2. Mengupayakan bantuan dari tingkat provinsi dan pusat
3. Melakukan Forum Group Discution (FDG)
4. Melalui Sistem Resi Gudang (SRG).

SRG merupakan kebijakan stabilisasi harga komoditi pertanian, baik itu yang berasal dari subsektor tanaman pangan maupun perkebunan yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI, dengan pengendalian tata niaga.

Pemerintah Indragiri Hilir saat ini sedang melakukan pengurusan Sistem Resi Gudang ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia sejak tahun 2015 yang lalu, dan sampai saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak kementerian.

Sistem Resi Gudang adalah cara perdagangan suatu komoditas melalui suatu penampungan komoditas sebelum dilakukan pemasaran. Dimana dengan cara seperti ini, maka harga komoditas akan menjadi lebih stabil dan komoditi kelapa dapat masuk ke pasar internasional.

Dengan SRG ini kelapa dan kopra, nantinya akan memiliki patokan harga yang jelas sesuai dengan harga yang berlaku saat itu, selain itu petani juga dapat mengontrol atas harga kelapa yang mereka inginkan. Karena kelapa yang sudah mereka antar gudang bisa langsung dijual atau menunggu terlebih dahulu hingga harga naik. Selanjutnya petani diberikan waktu paling lama 3 bulan, dan setelah penjualan petani dapat resi dan dapat langsung dicairkan di Bank BRI atau BNI.

5.1.3. Profil Petani Sampel

Petani non-mandiri yaitu petani yang memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan pengolah hasil kelapa yang ada di sekitar Indragiri Hilir. Kontrak yang dijalankan berupa kepastian membeli hasil panen kelapa petani oleh perusahaan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. Tabel 5.2 menyajikan gambaran perbedaan karakteristik petani non-mandiri dan mandiri.

Tabel 5.2
Profil Petani Sampel

Variabel		Jenis Tata Kelola Usaha Kelapa		Selisih Non-Mandiri dan Mandiri
		Non-Mandiri	Mandiri	
Pendapatan(ribuan)	rata-rata	21,815.25	12,295.26	9,519.99
	st deviasi	(24,216.14)	(9,786.22)	-14,429.92
total biaya produksi (ribuan)	rata-rata	10,904.69	2,324.67	8,580.02
	st deviasi	(10,861.35)	(3,884.04)	-6,977.32
total biaya transaksi (ribuan)	rata-rata	645.75	834.15	-188.40
	st deviasi	(463.27)	(1,336.82)	873.55
usia kepala rumah tangga	rata-rata	47.38	48.81	-1.44
	st deviasi	(8.95)	(10.71)	1.76
lama pendidikan kepala rumah tangga	rata-rata	8.63	4.59	4.03
	st deviasi	(2.66)	(2.52)	-0.13
jumlah tanggungan keluarga	rata-rata	3.75	4.59	-0.84
	st deviasi	(1.44)	(1.95)	0.51
tingkat resiko usaha kelapa kelapa	rata-rata	0.94	0.81	0.12
	st deviasi	(0.25)	(0.40)	0.15
tingkat keluasaan jejaring sosial petani	rata-rata	0.25	0.37	-0.12
	st deviasi	(0.45)	(0.49)	0.04

Sumber: Penulis, data diolah (2016)

Dari tabel 5.2. dapat dijelaskan bahwa secara rata-rata pendapatan Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) lebih tinggi daripada Petani Mandiri (*Spot Market*). Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) rata-rata mendapat penghasilan sebesar 21,8 juta rupiah per tahun, sedangkan petani mandiri rata-rata mendapat lebih kecil hanya sebesar 12,2 juta rupiah per tahun. Namun bila melihat standar deviasi dari pendapatan masing-masing kelompok, Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) memiliki deviasi yang lebih tinggi daripada pendapatan rata-ratanya yaitu sebesar 24,2 juta rupiah sedangkan Petani Mandiri (*Spot Market*) deviasinya lebih rendah dari rata-ratanya yaitu sebesar 9,7 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan kelompok Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) lebih bervariasi, terindikasi dari standar deviasinya

yang lebih besar dari nilai rata-ratanya, sebaliknya pendapatan Petani Mandiri (*Spot Market*) relatif sama antara satu petani dengan petani lainnya.

Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi daripada petani mandiri. Selisih rata-rata antara kedua kelompok petani ini cukup besar yaitu sekitar 8,5 juta. Biaya produksi kelompok petani non mandiri lebih seragam, terindikasi dari standar deviasinya yang jumlahnya lebih kecil dari rata-ratanya. Sedangkan biaya produksi kelompok Petani Mandiri (*Spot Market*) lebih rendah namun variasinya cukup besar.

Berbeda dengan komponen biaya transaksi, Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) secara rata-rata menghadapi biaya transaksi yang lebih rendah dari pada Petani Mandiri (*Spot Market*). Namun demikian variasi biaya transaksi pada kedua kelompok ini sama dengan variasi biaya produksinya, dimana variasi biaya transaksi pada kelompok Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) lebih merata sedangkan pada kelompok Petani Mandiri (*Spot Market*) lebih variatif.

Rata-rata usia kepala rumah tangga baik pada kelompok Petani Non Mandiri maupun kelompok Petani Mandiri relatif sama. Kepala rumah tangga pada kelompok Petani Non Mandiri rata-rata berumur 47 tahun, sedangkan pada kelompok Petani Mandiri rata-rata berumur 48 tahun. Standard deviasi pada kedua kelompok ini juga tidak ada yang lebih besar dari rata-ratanya, hal ini mengindikasikan pada kedua kelompok petani usia kepala rumah tangga tidak terlalu bervariasi.

Secara umum kepala rumah tangga pada kelompok Petani Non Mandiri lebih terdidik daripada kepala rumah tangga pada kelompok Petani Mandiri.

Kepala keluarga kelompok Petani Non Mandiri rata-rata mengenyam pendidikan selama 8 tahun atau mencapai jenjang SMP sedangkan kepala keluarga kelompok petani mandiri rata-rata hanya menjalani pendidikan formal 4 tahun.

atau setingkat SD. Di kedua kelompok ini variasi pendidikan kepala keluarganya relatif merata dan tidak berfluktuasi.

Jumlah keluarga yang ditanggung oleh kepala keluarga pada kelompok Petani Mandiri secara rata-rata lebih tinggi daripada yang ditanggung oleh kepala keluarga pada kelompok Petani Non Mandiri. Rata-rata tiap kepala keluarga pada kelompok Petani Mandiri menanggung 4,5 jiwa sedangkan kepala keluarga kelompok Petani Non Mandiri rata-rata menanggung 3,7 jiwa.

Karakteristik resiko dan tingkat keluasan jejaring sosial petani baik pada kelompok Petani Mandiri dan Non Mandiri cenderung sama. Tingkat resiko yang dihadapi kedua kelompok ini sama-sama tinggi dan tingkat keluasan jejaring sosial petaninya sama-sama rendah. Sedikit perbedaan yang nampak adalah kelompok Petani Non Mandiri menghadapi resiko yang sedikit lebih tinggi namun tidak terlalu bervariasi di dalam kelompoknya jika dilihat dari nilai standar deviasinya yang lebih kecil. Sedangkan petani mandiri menghadapi resiko yang cenderung lebih rendah namun lebih bervariasi. Tingkat jejaring sosial petani secara rata-rata kurang bagus namun tidak merata. Jika melihat standar deviasi di kedua kelompok yang lebih tinggi dari rata-ratanya, dapat dikatakan bahwa ada sedikit petani yang memiliki jejaring sosial yang lebih bagus dari yang lain.

Jadi bila dianalisa terdapat pengaruh yang positif dan negatif untuk masing-masing Tata Kelola kelapa Petani Mandiri dan Non Mandiri. Seperti terlihat pada tabel 5.3. :

Tabel 5.3
Perbedaan Petani Mandiri dan Non Mandiri

Kelebihannya :

No	PETANI MANDIR	No.	PETANI NON MANDIRI
Kebaikan Petani Mandiri :		Kebaikan Petani Non Mandiri :	
1.	Biaya Produksi Petani Mandiri lebih kecil 18,9% dari total	1	Biaya produksi cukup tinggi

	pendapatan yang diterima		
2	Periode Produksi 3 bulan	2	Periode Produksi 3 bulan
3	Mandiri, tidak ada campur tangan pemerintah, bantuan pupuk, dll, jika ada belum merata.	3	Adanya Bantuan perusahaan, dan dilindungi perjanjian kontrak
4	Penjualan hasil produksi mengikuti Mekanisme pasar	4	Adanya kepastian pasar atas hasil produksi, hasil produksi ditampung oleh perusahaan
5	Proses produksi cenderung sendiri (bebas), kapan menanam, produksi, dan menjual	5	Proses Produksi masih diawasi oleh Perusahaan (perjanjian kontrak), jenis kelapa yang ditanam, kualitas, dll
6	Modal usaha sendiri, memungkinkan dibantu oleh Tokeh (tengkulak)	6	Modal Usaha sendiri dan memungkinkan bantuan dari perusahaan dan koperasi
	Parit yang sudah ada, sebagai sarana irigasi ke perkebunan dan sarana transportasi petani untuk menjual hasil produksinya ke perusahaan, dll	7	Kanal dikelola oleh perusahaan. Tinggi rendahnya permukaan air dan debit air di atur oleh perusahaan, dan adanya bantuan alat keruk (cobelco), bagi kelompok tani yang memerlukan, dll

Kekurangannya

No	PETANI MANDIRI	No.	PETANI NON MANDIRI
Kekurangan Petani Mandiri :		Kekurangan Petani Non Mandiri :	
1.	Pengetahuan yang sangat minim tentang tata kelola kelapa, tidak pernah ada penyuluhan dari pemerintah	1	Lokasi Jauh dari Perusahaan Industri, sehingga biaya transaksi menjadi cukup tinggi
2	Parit sebagai sarana transportasi cenderung tidak terawat, hanya bisa dilewati pada saat air pasang,	2	Harus menjual produksinya ke perusahaan PT. RSUP-Industri karena sudah terikat kontrak
3	Belum mempunyai kelompok-kelompok Tani (koperasi), sehingga tidak mempunyai kekuatan di dalam pemasaran, memperoleh pupuk, dan bibit. Bantuan dan campur tangan pemerintah sangat minim	3	Tidak dapat keluar dari perjanjian kontrak untuk kurun waktu 25 tahun
4	Rendahnya pengetahuan petani, tidak dapat mengolah turunan kelapa, seperti, gula kelapa, minyak kelapa, nata de coco, dll.	4	Hasil produksi hanya berupa kelapa jambul (kelapa bulat), karena terikat kontrak dengan perusahaan, danyang ditanam jenis kelapa hibrida yang harus terus di pupuk (manja)
5	Penjualan hasil produksi mengikuti Mekanisme pasar		
6	Minimnya Sarana dan Prasanan, seperti alat keruk (cobelco),		

	sehingga parit dan waduk tidak terawat, masuknya air pasang (asin) dan terendam pohon kelapa, akibatnya menurunnya hasil produksi	
7	Masih minimnya bantuan dari pemerintah, dari segi Pupuk, Bibit, Penyuluhan, Pemasaran, Modal Usaha, Sarana Produksi, dll	

5.1.4. Klasifikasi Pendapatan Petani Sampel

Secara umum petani kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dibagi menjadi tiga kategori yaitu kelompok pendapatan rendah, pendapatan sedang, dan pendapatan tinggi. Berdasarkan sampel yang telah dikumpulkan kelompok pendapatan rendah adalah petani yang memiliki pendapatan kurang dari 10 juta rupiah per tahun, kelompok pendapatan sedang adalah petani yang memiliki pendapatan antara 10 hingga 20 juta per tahun, dan kelompok pendapatan tinggi adalah petani yang memiliki pendapatan lebih dari 20 juta per tahun. Kelompok petani pendapatan rendah proporsinya mencapai 49% dari sampel, kelompok pendapatan sedang 21% dari sampel, sedangkan pendapatan tinggi sebanyak 30% dari sampel. Pada masing-masing kelompok pendapatan standar deviasinya lebih rendah dari rata-ratanya, hal ini menunjukkan variasi yang cenderung sama pada masing-masing kelompok pendapatan.

Dari ketiga kategori, kelompok pendapatan tinggi memiliki rata-rata biaya produksi yang paling tinggi. Pada kelompok pendapatan tinggi, standar deviasinya melebihi rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya variasi yang cukup besar di dalam kelompok tersebut. Hal tersebut juga nampak pada kelompok pendapatan rendah. Sedangkan pada kelompok pendapatan sedang standar deviasinya lebih rendah daripada rata-ratanya menunjukkan variasi yang lebih merata. Biaya transaksi menunjukkan pola yang sama dimana variasi biaya transaksi di kelompok pendapatan rendah dan tinggi cukup beragam, sedangkan pada kelompok pendapatan sedang variasi biaya transaksinya lebih merata.

Rata-rata usia kepala keluarga kelompok pendapatan rendah adalah yang terbesar diantara ketiga kelompok pendapatan, yaitu 49,43 tahun.

Sedangkan yang terendah adalah rata-rata usia kepala keluarga kelompok pendapatan sedang. Ketiga kelompok memiliki variasi yang cenderung merata karena standar deviasi ketiganya berada di bawah rata-rata kelompok masing-

masing. Lama pendidikan kepala keluarga pada ketiga kelompok tidak jauh berbeda. Masing-masing sebesar 7,86 untuk kelompok pendapatan rendah, 7,4 untuk kelompok pendapatan sedang, dan 7,85 untuk kelompok pendapatan tinggi. Dengan standard deviasi masing-masing juga di bawah rata-ratanya.

Pada tiap kelompok, rata-rata memiliki tanggungan keluarga sebanyak 4 orang dengan yang tertinggi pada kelompok pendapatan sedang rata-rata seorang kepala keluarga menanggung 4,6 jiwa.

Tabel 5.4
Klasifikasi Pendapatan Petani

Keterangan		Karakteristik		
		Pendapatan Rendah	Pendapatan Sedang	Pendapatan Tinggi
Proporsi Sampel (%)		49	21	30
Pendapatan (ribuan)	Rata-rata	5,085.05	13,708.33	34,681.15
	St Deviasi	2,538.46	2,707.34	20,257.81
	Minimum	560.00	10,500.00	20,475.00
	Maksimum	9,660.00	18,000.00	99,000.00
Biaya Produksi (Ribuan)	Rata-rata	4,521.62	5,372.78	7,225.54
	St Deviasi	6,000.02	4,900.42	12,682.98
Biaya Transaksi (Ribuan)	Rata-rata	464.38	460.00	1,458.62
	St Deviasi	548.22	444.72	1,669.76
Usia Kepala Keluarga	Rata-rata	49.43	44.67	48.92
	St Deviasi	9.07	11.73	10.45
Lama Pendidikan Kepala Keluarga	Rata-rata	7.86	7.44	7.85
	St Deviasi	2.41	3.36	2.61
Jumlah Tanggungan Keluarga	Rata-rata	4.05	4.67	4.38
	St Deviasi	2.01	1.80	1.50
Tingkat Resiko	Rata-rata	0.86	0.78	0.92
	St Deviasi	0.36	0.44	0.28
Tingkat jejaring	Rata-rata	0.29	0.22	0.46

	St Deviasi	0.46	0.44	0.52
--	------------	------	------	------

Sumber: Penulis, data diolah (2016)

5.2 Pembahasan Hasil Statistik

Model yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah *treatment effect model* yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian suatu *treatment* atau perlakuan terhadap subjek penelitian. Model ini melihat pengaruh rata-rata dari variabel biner (0-1) terhadap variabel yang memperoleh perlakuan (*outcome variable*) (Heckman and Robb, 1985). Dalam model efek perlakuan diasumsikan ada dua hasil, yaitu variabel yang mendapat perlakuan sebagai y_1 dan variabel lain yang tidak mendapat perlakuan sebagai y_0 . Sehingga terdapat alternatif hasil perlakuan (kausal) yang berbeda antara 2 kuantitas: $y_1 - y_0$. (Soderbom, 2009).

Dalam penelitian ini, pengembangan model *treatment effect* digunakan untuk melihat pengaruh keputusan petani untuk mengikuti kontrak pertanian atau tidak terhadap pendapatan petani kelapa di Kabupaten Inhil. Pada dasarnya, terdapat dua jenis variabel dalam persamaan *treatment effect*. yaitu:

- (i) Variabel biner (0-1) yang merupakan keputusan pengelolaan usaha kelapa dimana nilai 1 berarti mengikuti kontrak pertanian dan nilai 0 berarti pengelolaan usaha kelapa mandiri (non kontrak) dan
- (ii) Variabel yang mendapat perlakuan (*outcome variable*) yaitu pendapatan petani kelapa.

Dalam menentukan estimator parameternya digunakan tahapan *Maximum Likelihood Estimator* (MLE) dalam model logistik untuk menguji keputusan pengelolaan usaha kelapa dengan kontrak ($cf=1$) dan usaha kelapa non kontrak ($cf=0$). Adapun variabel yang mempengaruhi keputusan pengelolaan usaha kelapa antara lain biaya produksi variabel (*bpv*), biaya organisasi (*bto*), dan

tanggungan keluarga (*rt3*). Sedangkan persamaan *treatment* diregresi dengan Ordinary Least Square (OLS) dimana perbedaan pendapatan (*y*) dipengaruhi oleh biaya transportasi (*bta*), biaya tetap produksi (*bpt*), biaya variabel produksi (*bpv*), tingkat resiko (*d1*), dan pengelolaan usaha kelapa (*cf*).

Tabel 5.5 :
Estimasi Parameter model *Treatment Effect* Usaha Kelapa

Variabel	Koefisien	Standar Error	Alfa
Pendapatan Petani Kelapa			
biaya transportasi	4.1048	1.89	***
biaya produksi tetap	4.9755	1.27	***
biaya produksi variabel	0.5145	0.48	0.287
adanya resiko usaha	-258.96	6015.07	0.966
keputusan non-mandiri	-13397.55	4710.19	***
Keputusan non-Mandiri (Kontrak)			
biaya produksi variabel	0.0002	0.00	***
biaya transaksi organisasi	0.0014	0.00	***
tanggungan keluarga	-0.3885	0.12	***

Sumber: Hasil Estimasi STATA, 2016

***) signifikan pada tingkat kesalahan kurang dari 5%

Berdasarkan tabel 5.5, pengujian Chi-Kuadrat persamaan *treatment effect* secara keseluruhan memiliki probabilitas $\chi^2 = 0,00$ (kurang dari tingkat alpha 10%) yang berarti persamaan ini memenuhi uji *goodness of fit* dan uji interdependensi. Dengan demikian persamaan ini dianggap valid untuk menjelaskan adanya perbedaan pendapatan petani yang dipengaruhi oleh keputusan pengelolaan usaha kelapa.

Adapun persamaan pengelolaan usaha kelapa Non Mandiri (*cf*) masing-masing memiliki tingkat signifikansi kurang dari 10%. Baik biaya produksi variabel, biaya transaksi organisasi dan tanggungan keluarga berpengaruh terhadap keputusan pengelolaan usaha kelapa secara kontrak. Secara parsial, makin besar biaya produksi variabel dan biaya transaksi organisasi yang dikeluarkan oleh petani maka peluang petani untuk mengikuti kontrak pertanian

akan makin tinggi. Sebaliknya, makin banyak tanggungan anak (-38%), petani cenderung memilih untuk mengolah lahan kelapanya secara mandiri.

Adanya perbedaan pendapatan usaha kelapa dipengaruhi oleh keputusan pengelolaan usaha kelapa, besarnya biaya transportasi, serta biaya produksi tetap. Sedangkan besarnya biaya produksi variabel (pupuk, pestisida dan lain-lain) serta tingkat resiko tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani. Usaha kelapa cenderung memiliki tingkat resiko yang tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan karena berapapun kelapa yang dipanen akan selalu terserap di pasar.

Dari hasil estimasi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan seorang petani untuk mengikuti kontrak, secara rata-rata akan mengakibatkan pendapatannya menurun sebesar 13 juta rupiah. Faktor yang mempengaruhinya di duga adalah biaya transportasi dan biaya produksi tetap. Menurut teori, seharusnya hubungan biaya dan pendapatan adalah negatif. Namun temuan pada penelitian ini menunjukkan hubungan positif.

5.3 Pembahasan Hasil

5.3.1. Dampak Pengelolaan Usaha Petani Non Mandiri

Berdasarkan hasil estimasi, pengelolaan usaha kelapa menunjukkan nilai koefisien negatif terhadap pendapatan petani kelapa. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan pengelolaan usaha kelapa dengan melakukan kontrak justru menyebabkan penurunan pendapatan petani kelapa. Bagi petani, keputusan memilih mengelola lahan dengan kontrak pertanian ditentukan oleh besarnya biaya produksi dan biaya transaksi sedangkan tingkat resiko tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan memilih kontrak pertanian.

Biaya produksi variabel dan biaya transaksi organisasi, keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan seorang kepala keluarga petani untuk ikut bergabung ke dalam kontrak pertanian. Signifikan artinya

secara statistik memang benar dan dapat dipercaya bahwa perubahan pada biaya produksi variabel dan biaya transaksi organisasi akan mampu mempengaruhi keputusan seorang petani dalam mengikuti kontrak pertanian, sedangkan positif artinya terjadinya peningkatan pada biaya produksi variabel dan biaya transaksi organisasi akan meningkatkan kecenderungan seorang petani dalam mengikuti kontrak pertanian.

Biaya produksi variabel yang tinggi akan membebani petani, sehingga petani akan mencari cara untuk menekan biaya variabelnya. Salah satunya adalah dengan mengikuti kontrak pertanian. Dengan mengikuti kontrak pertanian, akan ada bantuan dari perusahaan yang melakukan kontrak berupa pupuk dan pestisida disebabkan hasil produksi kelapa petani yang mengikuti kontrak harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya transaksi organisasi misalnya biaya untuk iuran KUD, iuran kelompok tani dan lain sebagainya. Semakin tinggi biaya-biaya ini maka semakin meningkat kecenderungan seorang petani untuk mengikuti kontrak pertanian disebabkan dengan mengikuti kontrak dengan perusahaan maka sebagian biaya transaksi akan hilang atau ditanggung oleh perusahaan. Misalnya iuran kelompok tani. Petani yang mengikuti kontrak pertanian akan terbebas dari iuran kelompok tani sebab kebutuhan kelompok tani yang mengikuti kontrak sudah dipenuhi oleh perusahaan.

Jumlah tanggungan keluarga berpengaruh negatif terhadap keputusan mengikuti kontrak. Hal ini dapat dimaklumi bahwa dengan tanggungan keluarga yang banyak, sebenarnya petani juga memiliki keuntungan yaitu ada tambahan tenaga kerja yang tidak harus dibayar. Akan menjadi kewajiban bagi istri dan anak-anak petani dalam membantu kepala keluarga melakukan usahanya, misalnya dengan membantu saat panen, menjaga perkebunan, dan lain sebagainya. Bila tanggungan keluarga lebih sedikit, petani harus membayar

tenaga kerja tambahan untuk membantunya mengerjakan pekerjaannya. Ini berarti ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani.

5.3.2. Faktor Utama Perbedaan Pendapatan

Keputusan mengikuti kontrak berpengaruh negatif dan signifikan artinya memang benar secara statistik keputusan mengikuti kontrak akan menyebabkan pendapatan petani menurun. Dari tabel 5.2, dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani yang mengikuti kontrak nominalnya lebih besar dari rata-rata pendapatan Petani Mandiri (*Sport Market*). Namun rata-rata biaya produksi petani yang mengikuti kontrak mencapai 50% dari pendapatannya, sedangkan rata-rata biaya produksi petani yang tidak mengikuti kontrak hanya sekitar 15-18% dari pendapatannya.

Walaupun telah jelas bahwa pendapatan petani Non Mandiri (*Makreting Contract*) cenderung lebih kecil sekitar – 13.397,55 juta. Namun demikian Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) tidak dapat secara otomatis beralih ke Petani Mandiri. Dimana dia harus menjual hasil produksinya ke perusahaan yang telah di tunjuk, adapun alasannya adalah bahwa Petani Non Mandiri telah terikat kontrak pertanian dengan PT. Riau Sakti United Plantation Perkebunan (PT. RSUP-Perkebunan) dalam kurun waktu selama 25 tahun, hal tersebut dikarenakan PT. RSUP-Perkebunan telah menjalin kontrak kepada petani, mengenai pembukaan lahan, pembuatan kanal-kanal, pemberian bantuan berupa sarana produksi seperti : (i) Bibit Kelapa Hibrida, (ii) Pemberian Pupuk, (iii) Alat keruk (cobelco), dan sarana produksi lainnya. Atas kontrak tersebut, dan sampai saat ini petani sudah memiliki lahan yang di olah untuk perkebunan, namun sertifikat tanah (girik), belum diserahkan kepada petani sampai perjanjian kontrak tersebut berakhir.

Hasil estimasi menunjukan dapat bahwa terdapat tiga variabel yang **berpengaruh secara positif** terhadap pendapatan petani kelapa di Inhil, yaitu:

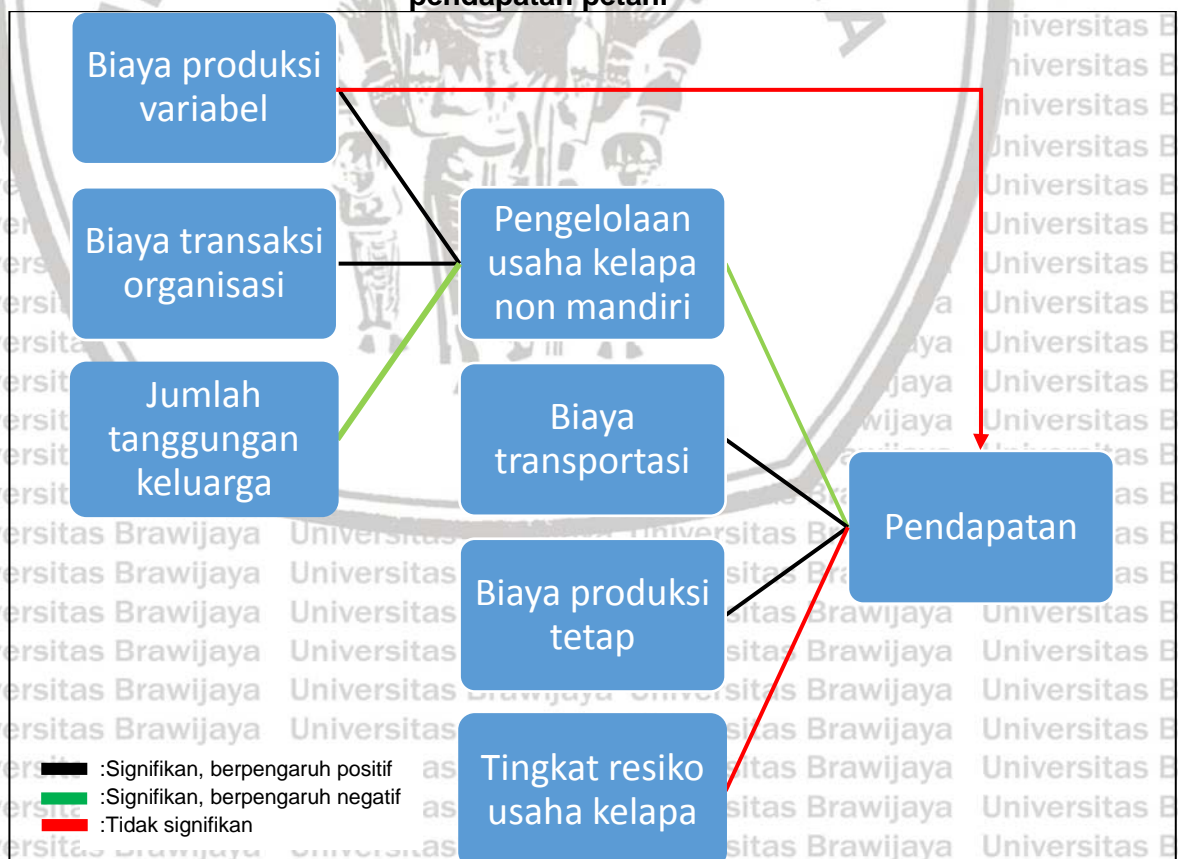
(i) biaya transaksi organisasi, (ii) biaya transportasi, dan (iii) biaya produksi tetap.

Terdapat dua variabel yang **berpengaruh secara negatif** terhadap pendapatan petani, yaitu: (i) jumlah tanggungan keluarga dan (ii) pengelolaan usaha kelapa

non mandiri. Disamping itu, terdapat dua variabel yang **tidak berpengaruh** terhadap perbedaan pendapatan petani, yaitu biaya produksi variabel dan tingkat resiko usaha. Secara parsial, biaya produksi variabel berpengaruh secara positif

terhadap pengelolaan usaha kelapa non mandiri namun tidak berpengaruh terhadap pendapatan petani. Alur hubungannya dapat diamati dalam gambar 5.1 berikut.

Gambar 5. 1.
Dampak keputusan kontrak pertanian terhadap perbedaan pendapatan petani



Sumber: Penulis, hasil estimasi STATA, 2016

Berdasarkan gambar 5.1, ada dua pembahasan utama yang sesuai dengan tujuan penelitian: **Pertama**, mengidentifikasi bentuk tata kelola yang berdampak terbesar bagi peningkatan pendapatan petani. **Kedua**, mengidentifikasi faktor utama yang menyebabkan terjadinya perbedaan besaran dampak tata kelola terhadap pendapatan petani kelapa.

Petani Kelapa Petani Non Mandiri secara rata-rata menghadapi biaya yang lebih tinggi dari Petani Mandiri (*Spot Market*). Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 5.2, diketahui bahwa proporsi biaya produksi Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*) mencakup hampir 50% dari pendapatan petani, sedangkan rata-rata biaya produksi Petani Mandiri (*Spot Market*) hanya sekitar 15-16% dari pendapatannya. Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan bahwa walaupun Petani Non Mandiri secara rata-rata menerima pendapatan yang lebih tinggi, namun biaya produksi yang ditanggung juga lebih tinggi. Adapun biaya transaksi yang ditanggung oleh Petani Non Mandiri rata-rata lebih rendah bila dibandingkan dengan yang ditanggung oleh Petani Mandiri.

Ada lima faktor yang diduga mempengaruhi pendapatan petani, yaitu biaya produksi variabel, keputusan mengikuti kontrak, biaya transaksi, biaya produksi tetap, dan tingkat resiko. Dari kelima faktor ini, secara statistik biaya produksi variabel dan tingkat resiko tidak berpengaruh signifikan terhadap perbedaan pendapatan petani. Biaya transportasi dan biaya produksi tetap berpengaruh positif dan signifikan terhadap perbedaan pendapatan petani. Sedangkan keputusan mengikuti kontrak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perbedaan pendapatan petani.

Biaya produksi tetap dan biaya transportasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perbedaan pendapatan petani artinya kedua biaya ini memang benar secara statistik mempengaruhi pendapatan petani yang diterima oleh petani. Semakin besar biaya produksi dan biaya transportasi, maka

pendapatan yang diterima petani juga akan semakin besar. Dengan biaya produksi tetap yang besar petani akan memiliki lahan yang lebih luas dan pohon kelapa yang lebih banyak, sehingga petani mampu memproduksi kelapa lebih banyak dan pendapatannya tentu akan lebih besar. Sedangkan biaya transportasi yang semakin besar mengindikasikan pasar yang dijangkau oleh petani juga semakin luas, hal ini juga akan menambah potensi penghasilan petani.

Keputusan mengikuti kontrak berpengaruh negatif dan signifikan artinya memang benar secara statistik keputusan mengikuti kontrak akan menyebabkan pendapatan petani menurun. Dari tabel 5.2, dapat diketahui bahwa rata-rata pendapatan petani yang mengikuti kontrak nominalnya lebih besar dari rata-rata pendapatan petani yang tidak mengikuti kontrak. Namun rata-rata biaya produksi petani yang mengikuti kontrak mencapai 50% dari pendapatannya, sedangkan rata-rata biaya produksi petani yang tidak mengikuti kontrak hanya sekitar 15-18% dari pendapatannya.

Dengan biaya produksi tetap yang besar petani akan mampu membeli bibit kelapa yang lebih unggul sehingga petani mampu memproduksi kelapa lebih banyak dan pendapatannya tentu akan lebih besar. Sedangkan biaya transportasi yang semakin besar mengindikasikan pasar yang dijangkau oleh petani juga semakin luas, hal ini juga akan menambah potensi penghasilan petani.

Biaya transaksi yang lebih tinggi mencerminkan pasar yang lebih luas. Petani yang mau mengeluarkan biaya transportasi yang lebih tinggi akan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Dampaknya, produk kelapanya akan terjual lebih banyak dan pendapatannya menjadi lebih tinggi.

Keterangan lebih lengkap sebagai berikut, diketahui bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa pendapatan petani mandiri dipengaruhi oleh :

- Biaya Transportasi (4,1%)
- Biaya Produksi Tetap (4,975 %).

Dan kedua variable tersebut berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan. Di dalam teori seharusnya kedua variabel tersebut berpengaruh negative terhadap pendapatan. Namun di dalam penelitian ini berbanding terbalik, kedua komponen tersebut bernilai positif. Adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Biaya Transportasi nilai koefisiennya 4,10 dapat dijelaskan sebagai bahwa biaya yang dikeluarkan oleh petani kelapa untuk biaya transportasi adalah dalam rangka untuk menjual hasil produksinya. Karena petani kelapa mandiri dapat menjual hasil produksinya kepada Tokeh, Perusahaan dan kepada pihak lain, seperti kapal-kapal dari Singapura, Malaysia dan Thailan, yang saat ini sudah mulai ramai masuk ke Kabupaten Indragiri Hilir. jadi Petani Kelapa Mandiri dapat menjual hasil kelapanya sesuai dengan mekanisme pasar. Kapal-kapal dari luar yang datang untuk membeli hasil produksi kelapa petani Indragiri Hilir, terkadang berlabuh cukup jauh dari perkebunan petani, sehingga Petani Kelapa Mandiri harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menjual hasil kelapanya berupa biaya transportasi untuk mengangkut hasil produksinya ke kapal-kapal tersebut. Dimana kapal-kapal tersebut biasanya mau menghargai produksi petani kelapa lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh tokeh dan perusahaan. Kemudahan lainnya bagi petani yang menjual hasil produksinya ke kapal-kapal asing tersebut adalah, Petani dapat menjual langsung ke pengepul dari kapal-kalap asing tanpa harus memiliki Delivery Order (DO), dan pembayarannya kepada petani dapat langsung dibayarkan pada saat itu juga, jika dibandingkan petani menjual hasil produksinya kepada perusahaan, harus lewat Tokoh yang telah memiliki DO yang dikeluarkan perusahaan, pembayaran

dibayarkan paling cepat 1 minggu setelah transaksi berjalan, dikarenakan perusahaan membayar transaksi via bank, dalam jumlah yang besar.

5.4. Saluran Distribusi

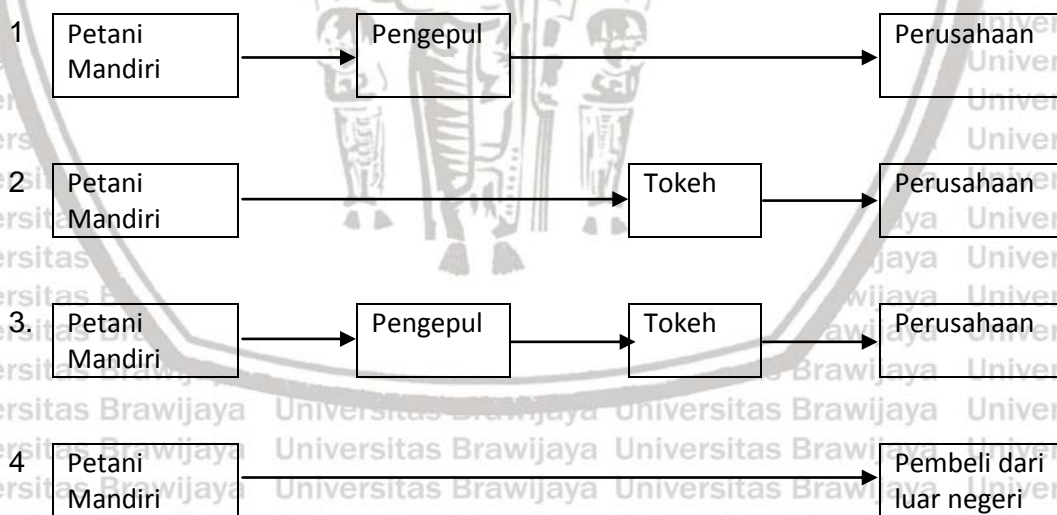
Tata Kelola Kelapa yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu Petani Mandiri (*Spot Market*) dan Petani Non Mandiri (*Marketing Contract*), mempunyai saluran distribusi yang berbeda-beda. Dimana Saluran distribusi tersebut ada yang pendek, namun ada pula yang panjang, sehingga ini pasti akan berdampak terhadap harga beli dan harga jual dimasing-masing saluran.

5.4.1. Saluran Distribusi Pada Petani Mandiri

Pada Saluran Distribusi Petani Mandiri ada 4 Macam saluran distribusi, seperti terlihat gambar dibawah ini :

Gambar : 5.2.

Saluran Distribusi I Petani Kelapa Mandiri



Penjelasan Petani Mandiri : mempunyai 4 macam saluran distribusi, dimana pada saluran distribusi tersebut :

Pertama, petani dapat menjual hasil produksinya langsung ke pengepul, lalu pengepul menjual langsung ke perusahaan. Dimana biasanya pada sistim saluran ini, petani mau menjual kepada pengepul bila jumlah kelapa yang dihasilkan tidak terlalu banyak karena akan berpengaruh terhadap biaya transportasi, sehingga petani lebih memilih menjual hasil produksinya langsung ke pengepul dan pengepul akan langsung menjemput hasil produksi petani ke lokasi perkebunan.

Kedua, Petani dapat menjual langsung ke tokeh, dan tokeh menjual langsung ke perusahaan. Pada umumnya sebahagian besar petani banyak menjual hasil kelapanya kepada Tokeh, hal ini dikarenakan kondisi finansial Petani Mandiri terkadang tidak selalu baik, maka biasanya Petani Mandiri dapat meminjam uang terlebih dahulu untuk keperluan : membeli bibit, pupuk, biaya sekolah anak, dan keperluan lainnya.

Walaupun tidak ada peraturan yang tertulis, tetapi cukup mengikat, bahwa Petani Mandiri yang meminjam uang kepada Tokeh, biasanya akan menjual hasil produksi kelapanya ke Tokeh langganannya. Dan ini sudah lumrah terjadi. Pada saat dilapangan dan menggali lebih dalam, rata-rata petani merasa diuntungkan oleh keberadaan tokeh tersebut. Karena Tokeh dapat membantu kebutuhan keuangan petani kapan saja saat dibutuhkan.

Ketiga, Petani dapat juga menjual hasil kelapanya ke Pengepul, lalu Pengepul menjualnya ke Tokeh, lalu Tokeh menjualnya kepada perusahaan. Pada posisi seperti ini, biasanya Pengepul tidak memiliki ijin dari perusahaan berupa Delivery Order (DO), jadi pengepul terpaksa harus menjualnya kembali kepada Tokeh, dimana Tokeh adalah kepanjangan tangan dari Perusahaan, dan sudah memiliki DO yang dikeluarkan perusahaan.

Keempat, Pada saluran distribusi yang terakhir ini, petani dapat menjual hasil produksinya langsung ke Kapal-kapal asing yang bersandar di tepi sungai Indragiri, dan petani dapat langsung menjual hasil produksi kelapa kepada kapal-kapal asing yang bersandar tersebut. Dalam hal ini petani kelapa selalu mengikuti perkembangan harga kelapa yang terbaik melalui informasi dari teman-teman yang menjual kelapa sebelumnya. Bila pembelian harga kelapa di kapal-kapal asing tersebut cukup baik, banyak juga petani mandiri yang menjual hasil produksinya ke kapal asing tersebut.

Dari saluran distribusi tersebut dapat juga digambarkan pergerakan harga jual dari petani ke Pengepul, Tokeh, Perusahaan. Pada umumnya harga yang disepakati dari pengepul ke Tokeh berisar Rp 50,- perbutir kelapa, dimana Pengepul maupun Tokeh juga tidak berani menetapkan harga terlalu rendah, hal tersebut dikarenakan petani juga memantau pergerakan harga dari teman-teman sesama petani yang telah menjual hasil kelapa terlebih dahulu. Jika Pengepul, Tokeh menetapkan harga terlalu tinggi, maka petani tidak akan mengantar kelapa untuk dijual kepada Pengepul, atau Tokeh tersebut. Dari wawancara yang dilakukan, umumnya Pengepul, Tokeh menetapkan harga beli kelapa dengan margin keuntungan antara Rp 50 s.d. Rp 100,- Namun demikian penetapan harga beli Rp 100,- perbutir sangat jarang dilakukan, mengingat semua Pengepul, Tokeh selalu menetapkan harga beli Rp 50,- perbutir sesuai dengan harga yang berlaku pada saat itu. Artinya pengepul dan tokeh juga selalu mengikuti harga yang ditetapkan oleh perusahaan.

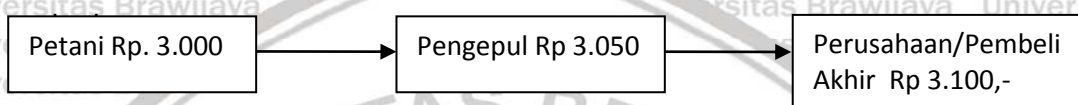
Adapun pergerakan harga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : 5.3.

Saluran Distribusi II Petani Kelapa Mandiri

Pada Saluran Distribusi I : Petani, Pengepul dan Langsung Ke perusahaan.

Dimana bila diilustrasikan harga beli yang berlaku pada tanggal 13 Desember 2016 adalah Rp 3.100,- ditingkat perusahaan, maka pada tingkatan pembeli kebawahnya hanya dapat mengambil keuntungan hanya Rp 50,-



Keuntungan bagi petani pada saluran distribusi ini :

Pada posisi seperti ini, biasanya dilakukan pada petani yang produksinya kecil. Antara 500 s.d. 100 butir, biasanya pada posisi ini adalah, pengepul langsung menjemput hasil kelapa petani di kebun, artinya petani tidak perlu lagi bersusah payah mengantar hasil panennya ke pengepul atau ke tokeh. Karena pengepul sudah langsung menjemput hasil panen kelapa ke perkebunan petani.

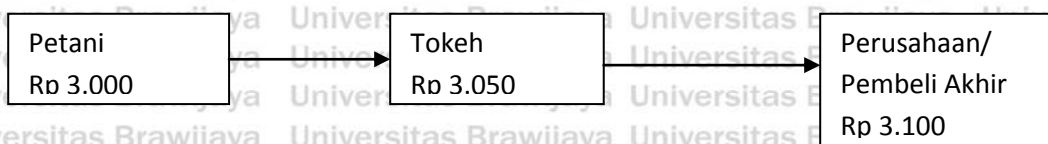
Bagi petani bila hasilnya produksinya sedikit ini akan dapat mengeluarkan biaya transportasi yang besar, jadi biasanya petani menjualnya langsung kepada pengepul yang langsung datang ke kebun petani untuk melakukan pembelian hasil produksi petani tersebut

Pengepul akan datang menjemput hasil kelapa ke perkebunan petani dengan harga jual yang disepakati (Rp 3.000 perbutir), tentu saja setelah dikurangi juga biaya transportasi, dimana besaran biaya transportasi berkisar antara Rp 50,- s.d. Rp 100,- perbutir tergantung jauh dekatnya lokasi (kebun petani tersebut) dengan pengepul.

Gambar : 5.4.

Saluran Distribusi III Petani Kelapa Mandiri

Pada Saluran Distribusi II : Petani, Tokeh dan Langsung Ke perusahaan.



Pada posisi saluran distribusi yang ke 2, ini petanilah yang datang membawa hasil kelapanya ke Tokeh, lalu menjual dengan harga yang disepakati.

Harga beli yang ditetapkan oleh Tokeh juga tidak berbeda jauh, berkisar antara Rp 3.050,- per butir. Namun biasanya tokeh dapat menerima kelapa dengan jumlah yang banyak.

Hal yang lainnya adalah biasanya petani adalah pelanggan dari tokeh yang bersangkutan, dimana biasanya petani selalu meminjam uang ke tokeh untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Modal usaha
- b. Biaya anak sekolah
- c. Kebutuhan hidup sehari hari.

Dan pada saat petani panen, terjadi kesepakatan yang tidak tertulis, petani harus menjual hasil panennya kepada Tokeh tersebut. Adapun harga jual yang disepakati biasanya berkisar Rp 50,- s.d. 100,- per butir.

Merupakan kesepakatan juga, apabila petani menjual hasil kelapanya, Tokeh akan memotong hasil jual panen kelapanya tersebut dengan jumlah hutang petani yang dilakukannya sepanjang satu periode panen (biasanya 3 bulan).

Besarnya pemotongan juga dilakukan kesepakatan antara Tokeh dengan Petani, biasanya petani meminta keringanan agar hutangnya tidak dipotong lunas, hasil panen petani biasanya tidak mencukupi untuk kebutuhan petani selama 3 bulan kedepan.

Ilustrasi sebagai berikut :

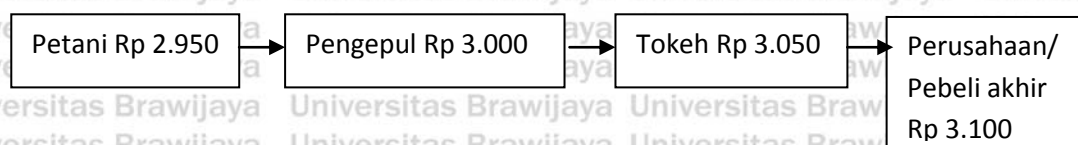
Bila hutang petani Rp 5.000.000,- dan hasil panen petani tersebut berkisar antara Rp 5.000.000,- biasanya petani akan memohon kepada Tokeh agar hutangnya tidak dipotong lunas. Petani minta agar hutangnya dapat diangsur atau dipotong berkisar Rp. 3.000.000,- maka sehingga sisa hutang petani berkisar Rp 2.000.000,- dan akan dilunasi pada periode panen yang akan datang

Untuk hal tersebut, biasanya Tokeh dapat memberikan keringanan, mengingat hasil yang diperoleh petani juga tidak terlalu besar, dan petani merupakan pelanggan tetap dari Tokeh tersebut. Disamping itu Tokeh juga mengatakan hal tersebut juga merupakan politik dagang yang diterapkan oleh Tokeh tersebut (jaga langganan), agar pada periode yang akan datang petani mau menjual hasil kelapanya tetap pada Tokeh yang bersangkutan.

Gambar : 5.5.

Saluran Distribusi IV Petani Kelapa Mandiri

Pada Saluran Distribusi III : Petani, Pengepul, Tokeh dan Langsung Ke Perusahaan (pembeli akhir).



Pada Posisi seperti ini saluran distribusi sedikit panjang, petani sedikit dirugikan karena harga jual yang rendah jika dibandingkan dengan saluran distribusi yang pertama, dimana pada saluran distribusi ini, biasanya pengepul tidak dapat menjual kelapa langsung ke perusahaan, biasanya pengepul dengan jumlah yang kecil, dimana pengepul akan menjualnya kembali ke tokeh. Dalam posisi seperti ini pengepul benar-benar hanya membeli dalam jumlah yg kecil dari petani, kemudian untuk seterusnya menjual ke Tokeh, hal tersebut karena pengepul tidak dapat menjual ke perusahaan karena tidak memiliki DO (Delivery Order) yang dikeluarkan perusahaan kepada pengepul tersebut.

Gambar : 5.6.

Saluran Distribusi IV Petani Kelapa Mandiri

Pada Saluran distribusi yang ke 4 ini : yaitu dari Petani langsung ke Pembeli Luar Negeri (Pembeli Akhir)

Pada Posisi ini, biasanya terjadi pada petani yang memiliki hasil produksi yang besar, dan memiliki modal yang besar untuk transportasi.



Dimana pada posisi saluran distribusi seperti ini petani harus cukup kuat di dalam hal biaya transportasi untuk menjual hasil kelapanya langsung ke pembeli luar negeri atau gudang agen yang ditunjuk. Petani harus mampu menyiapkan transportasi berupa sewa kapal/pompong dengan biaya yang cukup besar, hal tersebut dikarenakan kapal-kapal dari luar negeri tersebut bersandar di gudang agen yang ditunjuk dimana posisinya cukup jauh dari perkebunan petani. Sehingga petani harus memiliki biaya transportasi terlebih dahulu untuk mengantar hasil produksi kelapanya ke gudang pembeli luar negeri tersebut.

Namun demikian harga yang berlaku di pemeli luar negeri tersebut dapat lebih tinggi dari harga beli dari perusahaan. Sehingga sampai saat terkadang token juga dapat menjual kelapanya ke pembeli luar negeri tersebut, tergantung situasi harga yang berlaku pada saat itu.

5.4.2. Penjelasan Pada Petani Non Mandiri :

Petani Non Mandiri, adalah pemilik sekaligus pengelola perkebunan, dengan perjanjian kontrak dengan perusahaan, dalam hal ini PT. Riau Sakti United Platanation Perkebunan (PT. RSUP-Perkebunan). Pada saat pembukaan lahan, PT. RSUP-Perkebunan membantu dari segi : pembukaan lahan, pembutan kanal, bantuan Bibit, bantuan Pupuk, alat sarana produksi lainnya. Semua dilakukan oleh petani dan pihak PT. RSUP-Perkebunan. Jenis bibit kelapa yang ditanam adalah jenis hibrida, hal tersebut dikarenakan jenis ini cepat berproduksi, berkisar antara 5 tahun, dan bertahan sampai umur 25 s.d. 30 tahun.

Pada saat memasarkan hasil dari pertaniannya petani Non Mandiri tidak mempunyai kebebasan memasarkan seperti Petani Mandiri, dimana Petani Non-Mandiri harus menjual hasil produksinya keperusahaan yang telah ditunjuk (sesuai kontrak), dalam hal ini adalah PT. RSUP-Industri. Jadi saluran distribusi Petani Mandiri hanya satu yaitu langsung ke perusahaan.

Gambar : 5.6.

Saluran Distribusi Petani Kelapa Non Mandiri



Gambar 5.6. Pada Petani Non-Mandiri saat memasarkan hasil produksinya, petani mendapatkan bantuan berupa peminjaman kapal (pompong) dari

perusahaan, dalam hal ini perusahaan RSUP-Industri, untuk mengangkut hasil produksi kelapanya, namun demikian petani kelapa tetap harus mengeluarkan biaya bensin, upah juru mudi kapal dan kernet. Petani membawa hasil kelapanya ke perusahaan, dan dari hasil tersebut petani mendapatkan resi dari perusahaan untuk diuangkan ke koperasi. Biasanya koperasi akan memotong biaya administrasi sebesar Rp 5,- per butir kelapa yang dijual. Uang Rp 5,- tersebut digunakan oleh koperasi untuk keperluan anggota berupa pembelian pupuk, sarana prodi, honor petugas koperasi, dll

5.5. SUMBANGAN TEORITIS DAN PRAKTIS

5.5.1. Kontribusi Penelitian

5.5.2 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini mendasarkan pada Teori Pendapatan, Teori Produksi, Teori Biaya Transaksi dan Teori Kontrak Pertanian.

Menurut Soekartawi (2006), Pendapatan menurut, berbicara tentang pendapatan adalah selisih antara Total Penerimaan dan Total Biaya, atau $Pd = TR - TC$, sementara,

(Miller dan Meiners, 2000), Secara umum, istilah “produksi” diartikan sebagai penggunaan atau pemanfaatan sumber daya yang mengubah suatu komoditi menjadi komoditi lainnya yang sama sekali berbeda baik dalam pengertian apa dan dimana atau kapan komoditi-komoditi itu dilokasikan maupun dalam pengertian apa yang dapat dikerjakan oleh konsumen terhadap komoditi itu. Istilah produksi berlaku untuk barang maupun jasa, karena istilah “komoditi” memang mengacu pada barang dan jasa. Keduanya sama-sama dihasilkan dengan mengarahkan modal dan tenaga kerja.

Krismantoroadji, (1996), Kontrak Pertanian Adalah suatu kerja sama bisnis antara petani dengan pengusaha swasta/BUMN yang diikat dengan suatu kontrak yang memuat suatu ketentuan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan produksi, manajemen, dan komoditas tertentu

Furoboth dan Richter, (2002), Teori Biaya Transaksi sebagai biaya dari jalannya sistem ekonomi, termasuk di dalamnya biaya rutin, biaya pendirian, biaya pemeliharaan, ataupun perubahan desain sistem dasar dari model kelembagaan.

Temuan ini memperkuat tentang Teori Biaya Transaksi oleh Furoboth dan Richter, (2002), bahwa Tata Kelola Petani Kelapa sangat berpengaruh :

1. Market Transaction Cost : Ketepatan Tata Kelola Pertanian dalam hal ini perkebunan dari Teori Transaction Cost
2. Ketepatan Tata Kelola Kelapa dalam menghadapi situasi pasar yang berbeda
3. Tidak semua biaya yang cenderung menurun selalu menguntungkan, Petani Mandiri (*Spot Market*), Semakin besar biaya-biaya yang dikeluarkan berdampak semakin besar pula terhadap pendapatan petani kelapa Mandiri.

5.5.3. Kontribusi Praktis

Pada penelitian ini jelas tergambar, bahwa jenis Tata Kelola Petani Mandiri pendapatannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan Petani Non Mandiri, maka pada kontribusi praktis ini, penulis menyarankan agar, Petani Mandiri (*Spot Market*) dapat tetap diberikan keleluasaan memilih jenis pertanian yang diinginkannya.

Pada Kontribusi Praktis ini mendukung Teori Biaya Transaksi dimana :

1. Bagi Pemangku kebijakan, mengingatkan bahwa tidak selalu petani Non Mandiri (kontrak) lebih menguntungkan dari pada Petani Mandiri (*Spot Market*).
2. Temuan ini mendukung Teori Biaya Transaksi berkaitan dengan ketepatan memilih pasar, dimana pada kondisi pasar yang tingkat ketidak pastiannya rendah, maka kebijakan yang diambil adalah mendukung Petani Mandiri (*Spot Market*).

5.5.4. Keterbatasan Penelitian

1. Data Interviewnya menggunakan data persepsi, dimana sampel yang digunakan terlalu kecil, hal ini mengingat luas lokasi penelitian, sehingga keterbatasan dari peneliti baik dari segi waktu, biaya, dan tenaga.
2. Defenisi petani Mandiri dan Non Mandiri, tidak dapat dipisahkan secara konsep, kesulitan dalam memisahkan defenisi antara petani Mandiri dan Petani Non Mandiri menjadi lebih hambatan untuk memperoleh gambaran lebih akurat (terjadi bias)

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari analisa yang telah dilakukan terkait tata kelola perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir Riau, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola usaha pertanian yang berdampak terbesar terhadap peningkatan pendapatan petani kelapa adalah tata kelola petani mandiri. Pendapatan petani mandiri cenderung lebih besar dari pada petani yang mengikuti kontrak
2. Model tata kelola yang lebih baik adalah Tata Kelola Petani Mandiri (*Spot Market*), dimana dengan Tata Kelola *Sport Market* ini lebih cocok pada kondisi pasar dengan tingkat ketidak pastian rendah, walaupun biaya produksi tinggi seperti : Biaya Transportasi dan Biaya Produksi Tetap. Namun Tata Kelola Petani Mandiri tetap menguntungkan.

6.2 Saran

Diketahui bahwa pendapatan Petani Mandiri lebih baik dari Petani Kontrak, maka saran untuk pamangu kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan transportasi, agar petani dapat menjangkau pasar yang lebih luas, sehingga akan mendongkrak pendapatan petani mandiri.
2. Pemerintah dalam hal ini tidak perlu memaksa petani mandiri untuk mengikuti sistem pertanian kontrak, karena melalui penelitian ini jelas, petani mandiri pendapatannya lebih besar dibandingkan dengan petani kontrak
3. Pemerintah juga hendaknya menyediakan teknologi tepat, untuk menyediakan bibit unggul bagi petani, disamping perbaikan sarana produksi
4. lainnya : Kanal, pintu air, pupuk bersubsidi, dll

DAFTAR PUSTAKA

- Akuba, R.H. dan Mahmud, Z. 1996. Hasil-hasil Penelitian Balai Penelitian Kelapa di Kawasan Timur Indonesia. Balai Penelitian Kelapa, Manado.
- Amrizal, Agribusiness profile of smallscale coconut farm in tidal swamp area: case study at IndragiriHilir, Riau]. Profil agribisnis kelapa rakyat di daerah pasang surut: studi kasus di KabupatenIndragiri Hilir, Propinsi Riau/Amrizal; Djafar, M. (Balai Penelitian Tanaman Kelapa danPalma Lain, Manado). Prosiding seminar regional hasil-hasil penelitian tanaman kelapa dan palma lain. Buku II. Manado, 19-20 Maret 1996/Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan PalmaLain, Manado. Manado: Balitka, 1996: p. 38-59 1 ill., 9 tables; 3 ref.**AGROINDUSTRIAL SECTOR; SWAMP SOILS; TECHNOLOGY TRANSFER;ECONOMIC ANALYSIS; PROCESSED PLANT PRODUCTS; MARKETING;SUMATRA.**
- Amrizal, Smallholder coconut farming in the tidal swampy area of South Sumatera. Pengusahaankelapa rakyat lahan pasang surut di Sumatera Selatan/Amrizal (Balai Penelitian TanamanKelapa dan Palma Lain, Manado). Jurnal Penelitian Tanaman Industri. ISSN 0853-8212 1996v. 1(5) p. 207-218 2 ill., 10 tables; 6 ref. Appendix.**COCOS NUCIFERA; AGROINDUSTRIAL COMPLEXES; SWAMPS; SUMATRA.**
- Anderson E, 1995, The Salesperson As Outside Agen Or Employee. A Transaction Cost Analysis.,*Marketing Science* **Vol. 4** (3).
- Anggrainy E, 2005. *Analisis Biaya Transaksi Dan Penerimaan Nelayan Dan Petani di Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi*.Tesis Insitut Pertanian Bogor.
- Arancon Jr., R.N. 1999. Overview and Prospects of the Indonesian Coconut Industry in the World Perspective. *Asian and Pacific Coconut Community*. Makalah Seminar Perkelapaan Indonesia. Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 1999, Ekonomi pembangunan, Edisi dua, BPPS, Yogyakarta
- Asmara R dan Nurholifah R. 2010.Analisis Pendapatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Tebu dalam Keanggotaan Suatu Koperasi. Agrise, **Vol. X** No. 2, Mei 2010, ISSN: 1412 – 1425
- Baumol, W J. 1952. The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach', 66 *Quarterly Journal of Economics*, 545-556.
- Beydha I. 2001. Analisis Pendapatan Rumah Tangga (Studi Kaskus Pada Desa Kineppen Di Kecamatan Munthe). <http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234565789/3788/1/komunikasi-lnon.pdf> (Feb. 2012).
- Bhattarai M. , Sakthivadivel R, dan Hussain I. 2002. Irrigation impacts on income inequality and poverty allevation: Policy issues and options for improved management of irrigation systems, *Working Paper 39. Colombo, Sri Lanka: International Water Management Institute.*
- Boediono.2002, *Ekonomi Mikro*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.



BPS Provinsi Riau 2008, Riau dalam Angka 2008, Penerbit badan Pusat Statistik provinsi Riau, Pekanbaru

Brown T. L. dan Potoski M. 2005. Public Performance & Management Review, **Vol. 28** No. 3, March 2005, pp. 326-351.

Campbell R. 1978. People dan Markets: An Introduction to Economics. California, Benjamin Cumming Publishing Co. Inc.

Case, E. Carl dan Ray, C. Fair 2007. Prinsip-prinsip Ekonomi, Erlangga, Jakarta

Chandler, A. D. dan Hikono T. 1990. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Harvard University Press: Cambridge, MA.

Cheung dan Steven N.S. 1974. 'A Theory of Price Control', **17 Journal of Law and Economics**: 53-71.

Clague, C. 1997. The New Institutional Economics and Economic Development. In Clague, C (Ed). Institutions and Economics Development: Growth and Governance in Less-Developed and Post-Socialist Countries, *Baltimore: The John Hopkins University Press*.

Coase, 1937. The Nature of the Firm. *Economica, New Series*, **Vol. 4**, No. 16. (Nov., 1937), pp. 386-405.

Cramer, G. L., dan Jensen C.W. 1991. Study Guide for Agricultural Economics and Agribusiness, 5th Edition, Jan. 1991.

Damsetz H. 1964. 'The Exchange and Enforcement of Property Rights', **7 Journal of Law, Economics and Organization**, 141-161.

Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Rajawali pers, Yogyakarta

De Janvry, A., F. M. dann Sadoulet, E. 1991. Peasant Household Behaviour with Missing Markets: Some Paradoxes Explained. *The Economics Journal*. **Vol. 101**. November: 1400-1417.

Dernberg, Thomas F, 1992, *The Concept of Macroeconomics Theory dan Policy*, Karyaman, M. (penerjemah). Konsep Teori dan Kebijakan Makroekonomi, Erlangga, Jakarta.

Dietrich M. 1994. Transaction cost Economics and Beyond Towards a new Economics of the firm, London Routlage.

Dornbusch, Rudiger dan Stanley Fischer. 1997. *Macroeconomics*, Mulyadi J. A. (penerjemah). Makroekonomi, Erlangga, Jakarta.

Dorward, A. (2001). The Effects of Transaction Costs, Power and Risk on Contractual Arrangements: A Conceptual Framework for Quantitative Analysis. *Journal of Agricultural Economics*, 52(2), 59-73.

Drugger, W.M. 1983. The Transaction Cost Analysis of Oliver E. Williamson: A New Synthesis. *Journal of Economics Issues*. **Vol. XVII**, No. 1: 95-114.

- Dulay M. 2012. Analisis Pengaruh Curahan Jam Kerja Total dan Eksploitasi Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Petani Padi Sawah Di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7364/1/D0300252.pdf> (Feb. 2012).
- Dwyver, F. R., dan Welsh, M. A, 1986. Environmental Relationships of the Internal Political Economy of Marketing Channels. *Journal of Marketing Research* **22**(4), 397-414.
- Eggertson, T. 1990. *Economics Behaviour and Institutions. Cambridge Survey of Economic Literature*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Esmard M. 2004. Analisa Penerimaan Petani Plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Karet (Hevea brasiliensis) (Studi kasus di Desa Bilih, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Martapura, Kalimantan Selatan). Universitas Muhammadiyah Malang Department of Agribisnis – student – research.umm.ac.id http://student-research.umm.ac.id/index.php/dept_of_agribisnis/articel/view/2762 (Jan 2012).
- Fourie, F.C.N. 1989. The Nature of Firms and Markets: Do Transactions Approach Help? *The South African Journal Ef Economics*. Vol. **57** No. 2: 142-160.
- Furubotn, E dan Richter R. 2000. *Institutional And Economics Theory: The Conntribution Of The New Institutional Economics*. The University of Michigan Press. Ann Arbor, USA.
- Ghozali, Imam. 2002. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. BP Universitas Diponegoro, Semarang
- Goodhue, R.E., Heien, D.M., Lee, H. and Summer, D.A. (2003), *Contracts and Quality in The California Winegrape Industry, Review of Industrial Organization* , Vol. 23 (3-4) pp 267-282.
- Grossman Laurence, The Political of Bananas : Contract Farming, peasants, and Agrarian Change in the Easten Caribben, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1992.
- Grenne, W.H. 1990. *Econometric Analisis*. New York: Macmilian Publishing Company.
- Gujarati D. 2004. *Basic Econometrics*, Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies.
- Gulati, Ashok., Joshi PK., Landes Maurice,. Contract ***Farming in India : An Introduction*** 2008.
- Hair, J.F. Jr., R.E., Anderson, R.L., Tathan, dan W.C. Black. 2006. Mutivariate Data Analysis, 6 th, ed. Engelwood Cliffs, NJ : Prentice Hall
- Hardt L. 2009 The history of transaction cost economics and its recent development. *Erasmus journal of philosophy and economics*, Vol. **2**, issue 1, pp. 29-51.
- Hardt L. 2006. Transaction cost economics as a three dimensional externally driven research program. *Studia Ekonomiczne*, 2006 (1-2): 7-31.
- Hermanto R. 2007. Rancangan Kelembagaan Tani Dalam Implementasi Prima Tani Di Sumater Selatan. *Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol. **5** No. 2, Juni 2007 : 110-125.

Hicks J.R. 1935. Annual Survey of Economics Theory: The Theory of Monopoly, *Econometrica*, **Vol.3**, Issue (Jan., 1935), 1-20.

Holden, S.T. 1997. Adjustment Policies, Peasant Household Resources Allocation and Deforestation in Northern Zambia : An Overview and Some Policy Conclusions. Forum for Development Studies. No 1.

Hubbard, M. 1997 The "New Institutional Economics" in Agricultural Development: Insights and Challenges. *Journal of Agricultural Economics*. **Vol. 48**, 239-250.

Husinsyah, 2007. Hubungan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha tani Padi Gogo Di Desa Maridan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara. EPP. Vol 4 No. 2: 1-7.

Husodo, S. Y. 2002. Penataan Keagrarian dan Pertanahan Wujud Kesenambungan Pembangunan Pertanian dalam Menuju Keadilan Agraria. Bandung. Yayasan AKATIGA.

Jill E. Hobbs, 1996. A Transaction Cost Approach Supply Chain Management, *Supply chain Management Journal*, **Vol. 1** Number 2, Pp 15-27.

Key N. Sadoulet E, dan Alain de Janvry. 2000. Transactions Costs and Agricultural Household Supply Response. *Amer. J. Agr. Econ.* **82** (May 2000): 245-259. Copyright 2000 American Agricultural Economics Association.

Kirchner. C dan Picot. A. 1987. Transaction Cost Analysis of Structural Changes in the Distribution System: Reflections on Institutional Development in the Federal Republic of Germany. *Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)* *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, **143** (1987), 62-81.

Koh, S. dan Tan, K 2006. "Translating Knowledge of Uncertainty in ERP-Controlled Manufacturing Environments Into Business Strategy and Actions", *Journal of Manufacturing Technology Management*, **Vol. 17** (4), pp. 472-485.

Koutsoyiannis A. 1979. *Modern Microeconomics (second edition)*. London: The Macmillan Press.

Kusmantoro E. S, Widodo S dan Suratiyah K. 1992. Analisis Efisiensi Produksi Pada Usaha tani Nilam di Kabupaten Banyumas, Berkala Penelitian Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (BPPS-UGM) Jilid 5, No 2A, Edisi Mei 1992. Hlm 339-351.

Mardikanto T. 1994. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian. UNS Press. Surakarta.

Matthews R.C.O. 1986. The Economics of Institutions and the Sources of Growth. *The Economic Journal*. **Vol. 96**, December: 903-918.

Mburu J. 2002. Collaborative Management of Wildlife in Kenya: An Empirical Analysis of Stakeholders' Participation, Costs and Incentives. Socioeconomics Studies on Rural Development. **Vol. 130**, Wisseconomics, haftverlag Vauk Kiel KG.

Milgrom P. dan Robert. J. 1992. Economics, Organization and Manajemen, Prentice Hall, Engle wood.

Miller, R. L dan Meiners R. E., 2000, *Intermediate Microeconomics Theory*, Munandar H (penerjemah), Teori Mikroekonomi Intermediate, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mubyarto. 1977. *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES.

Nababan C. D. 2009. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Jagung Di Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Karo. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/10381/1/09E00909.pdf> (Feb. 2012).

Nabli, M. K. dan Nugent, J. B. 1989. The New Institutional Economics and its Applicability to Development *World Development*. Vol. 17, No. 9: 1333-1347.

Nasution R. 2008. Pengaruh Modal Kerja, Luas Lahan dan Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Petani Usaha Tani Nenas (Studi Kasus: Desa Purba Tua Baru, Kec. Simalakuta, Kab. Simalungun). <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7459/1/09E00479.pdf> (Feb. 2012).

Nazir Mo. 1999. *Metode Penelitian*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Nicholson W. 1995. *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*. Agus M. (penerjemah), Intermediate Microeconomics. Oleh. Bina Rupa Aksara. Jakarta.

Nicholson, Walter, 2002, *Mikroekonomi Intermediate dan Aplikasinya*, Edisi kedelapan, Erlangga, 2002.

Niehans, J. 1987. 'Transaction Costs', in Eatwell, John, Milgate, Murray dan Newman, Peter (eds), *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, London, Macmilan, 676-679.

Nielson A W. 2002. Institutional Adjustment and Transaction Cost: Product and Input Market in Tanzanian coffe system, *Journal of World Development*, Vol. 30 (4): 361-574.

North D. C. 1987. Institution, Transaction Cost and Economics Growth Economics Inquiry, Vol. 25, 1987.

North D. C. 2000. Revolution in Economics, dalam Menard C. Institutions, Contracts and Organisations: Perspectives from New Institutional Economics. Cheltenham: Edward Elgar.

Omamo, S. W. 1998. Transport Costs and Smallholder Cropping Choices: An Application to Siaya District, Kenya. *American Journal of Agricultural Economics*. Vol. 80, February: 116-123.

Paarlberg, D. 1993. The Case for Institutional Economics. *American Journal of Agricultural Economics*. Vol. 75, August: 823-827.

Pakpahan A. Badan Usaha Milik Petani Sebagai Sarana Gotong Royongan Usaha Untuk Kemajuan Petani. /var/www/apps/scribd/scribd/tmpt/scratch7/10267034.doc (Feb. 2012).

Poulton, C., Dorward, A., Kydd, J., Poole, N. dan Smith, L. 1998. A New Institutional Economics Perspective On Current Policy Debates. In Dorward, A., Kydd, J., And Poulton, C. (Eds.). *Smallholder Cash Crop Production Under Market Liberalisation: A New Institutional Economics Perspective*. Oxford: CAB International.

Prabowo, H. E. Penyusutan Lahan Isu Utama Ketahanan Pangan. *Kompas Cetak*. (<http://cetak.kompas.com/read/>) (Feb. 2012).

Prayitno, H dan Lincoln a. 1989. *Petani Desa Dan Kemiskinan*. BPFE Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

Priyadi U. 2008. Peranan Inovasi Kelembagaan Pabrik Gula Madukismo Terhadap Pelaksanaan Usaha Tani Tebu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEP/article/viewFile/226/222> (Jan. 2012).

Purwanti R. 2007. Pendapatan Petani Dataran Tinggi Sub Das Malino (Studi kasus: Kelurahan Gantarang, Kabupaten Gowa). *JURNAL Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* Vol. 4 No. 3 September 2007, Hal.257-269.

Rahman, H.M.Y. 1999. Potensi dan Peluang Pasar Produk-produk Kelapa. Direktorat Industri Agro. Departemen

Rachimyanti I. 2009. Analisis Perbandingan Usaha Tani Padi Organik Metode System Of Rice Intensification (SRI) Dengan Padi Konvensional (Kasus : Desa Bobojong, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat).

Rindfleisch, A dan Heide J. B.. 1997. Transaction cost analysis-past, present and future applications. *Journal of marketing*, **Volume 61**, No. 4, pg 30-54.

Rostow, Walt W., *Theories Of Economic Growth From David Hume to The next century*, Oxford University Press, 1990

Rotinsulu T. O. 2008. Revitalisasi Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani Dan Kesempatan Kerja Di Sulawesi Utara (Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa Dan Minahasa Utara). *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Daerah (PEPD)* Vol. 1 No. 3.

Rumokoi, M.M.M.; Berlina, R.; Lay A, Coconut processing for foods and non food materials]. Pengolahan kelapa untuk bahan pangan dan non pangan (Balai Penelitian Kelapa, Manado). Prosiding simposium II hasil penelitian dan pengembangan tanaman industri. Buku 3. Bogor, 21-23 Nop 1994/Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Bogor. Bogor: Puslitbangtri, 1994 p. 70-106 2 ill., 26 tables; 30 ref. *COCOS NUCIFERA; COCONUTS; SUGAR; FOOD TECHNOLOGY*.

Rued R, et.al., 2007. Vegetables Procurement by Asian supermarket: A Transaction cost Approach; *Chain Management: An International Journal*.

Sadoulet, E. dan de Janvry, A. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis*. Baltimore, John Hopkins University Press.

Savatore, Dominick, *Manajerial Economics In A Global Economy, Fourth Edition*, Harcourt College Publishers, Orlando, 2001

Salvatore D. 2006, *Schaum's Outlines: Microeconomics*, Sitompul R. (penerjemah), Fourth Edition, Jakarta, Penerbit Erlangga.

- Santoso S. (2004). *PSS Statistik Parametrik*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Sartorius, Kurt and Kirsten, Johann; *Contracts and Contract Farming As Potential Mechanism to Improve Market Access For Black Farmers In South Africa*, University of The Witwatersrand, Johannesburg, 2006
- Schramm M. 2002. Bounded Rationality and Opportunism – Behavior Assumption of TCA Revisited. Wintersemester.
- Schimid A. 1987. Property, Power, and An Inquiry into Law dan Economics. New York: Praeger.
- Sedarmayanti dan Hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Mandar Maju.
- Sekaran . U. 2003. Research Metode for Business ; Skill Wilding Aproach, Edition 5, Kundli. John Wilwy & Sons (Asia) Ptd, Ltd.
- Sesbany. 2012. Penguatan Kelembagaan Petani Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Petani. <http://www.info.stoppmedan.ac.id/pdf/jurnalesbany1.pdf> (Feb. 2012)
- Sevila C. G. .et. al. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta: UI Press.
- Shinta A. 2011. *Ilmu Usaha Tani*, Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Singh Sukhpal (2003), Memanfaatkan Kontrak Pertanian untuk Meningkatkan Efisiensi Supply Chain di India : Beberapa Inovatif dan Sukses Model Associate Professor Pusat Manajemen Pertanian (CMA) Indian Institute og Manajemen Ahmedabad-380015, Gujarat, India
- Sing, Sukhpal (2006), Supply Chains Organik Produce di India, Laporan tidak diterbitkan, CMA, Iim, Ahmedabad
- Soeharjo dan Patong D. 1977. *Sendi-sendi Pokok Usaha Tani*.LEPHAS. Universitas Hasanuddin (UNHAS).
- Soekartawi, Soehardjo A., Dillon J. L. dan Hardaker J. B..1986. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*.Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soekartawi.2003. *Teori Ekonomi Produksi dengan Pokok Bahasan Analisis Fungsi Cobb-Dougllass*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soetrisno, L, 1999, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Kanisius.
- Suryana, Achmad, 2006. Strategi Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Palawija, Prosiding Seminar nasional. Bogor, 13 Juli 2006. Penyunting : I Wayan Rusastra, Togar Alam Napitupulu, Made Oka A. Maikmas dan Firdaus Karim : CAPSA Monograph No. 49 Economic and Social Commission for Asia and The Pasifik, Hal 23 dan 54
- Sulistyo, R., Empowerment of farmers on coconut-based farming systems: partnership to empower coconut farmers. Pemberdayaan petani dalam usaha tani kelapa: pola kemitraan (kemitraanskala besar dan kecil) dalam rangka memberdayakan petani

kelapa/Sulistyo, R. (MasyarakatPerkelapaan Indonesia, Jakarta). Prosiding konferensi nasional kelapa IV. Modernisasi usaha pertanian berbasis kelapa. Bandar Lampung, 21-23 Apr 1998/Wahid, P. [et.al.] (eds.) PusatPenelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Bogor. Bogor: Puslitbangtri, 1998 p. 33-461 table; 21 ref.COCONUTS; FARMERS; AGRICULTURAL POLICIES; TECHNOLOGY TRANSFER;PROCESSING; FARM EQUIPMENT; DEVELOPMENT AIDS

Sumanto, Increasing of coconut farmer incomes by catch crops pineapple. Upaya meningkatkan pendapatan petani dengan tanaman sela nenas/Sumanto (Balai Penelitian Tanaman Rempahdan Obat, Bogor); Sriwulan, I. Prosiding konferensi nasional kelapa IV. Modernisasi usaha pertanian berbasis kelapa. Bandar Lampung, 21-23 Apr 1998/Wahid, P. [et.al.] (eds.) PusatPenelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Bogor. Bogor: Puslitbangtri, 1998 p. 583-588 3 tables; 9 ref.COCOS NUCIFERA; ANANAS COMOSUS; INTERCROPPING; FARM INCOME;EXPORTS; COST BENEFIT ANALYSIS.

Suprpto, A., Prospect of coconut agribusiness development toward globalization era]. Prospek pengembangan agribisnis kelapa dalam era globalisasi/Suprpto, A. (Departemen Pertanian,Jakarta. Badan Agribisnis). Prosiding konferensi nasional kelapa IV. Modernisasi usaha pertanian berbasis kelapa. Bandar Lampung, 21-23 Apr 1998/Wahid, P. [et.al.] (eds.) PusatPenelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, Bogor. Bogor: Puslitbangtri, 1998 p. 77-9512 tables; 9 ref, COCONUTS; AGRICULTURAL POLICIES; AGROINDUSTRIAL SECTOR;PRODUCTION DATA; PRODUCTION POSSIBILITIES; PRICES; FOREIGN TRADE;INVESTMENT.

Suyana, Market oppportunity and diversification of coconut products]. Peluang pasar dandiversifikasi produk kelapa/Suyata (Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta.Direktorat Jendral Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan); Yaman. Prosiding konferensinasional kelapa IV. Modernisasi usaha pertanian berbasis kelapa. Bandar Lampung 21-23Apr 1998/Wahid, P. [et.al.] (eds.) Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri,Bogor. Bogor: Puslitbangtri, 1998 p. 47-56 6 tables.COCONUTS; MARKET RESEARCH; INDUSTRIAL DEVELOPMENT; RAWMATERIALS; FOREIGN TRADE.

Soeharjo dan Patong D. 1977.*Sendi-sendi Pokok Usaha Tani*.LEPHAS. Universitas Hasanuddin (UNHAS).

Soetrisno, L, 1999, *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian: Sebuah Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Kanisius.

Strassman, P. A. 2002, Measuring Information Productivity. Goddard Information Science and Technology Colloquium. Internet Website: <http://isandtcollq.gsfc.nasa.gov/fall2002/presentations/strassmann.ppt> (Nov, 17, 2011).

Stigler G. J. 1961. The Economics of Information, *The Journal of Political Economy*, Vol. 69, No. 3 (Jun., 1961), 213-225.

Sudarsono, 1984.*Pengantar Ekonomi Mikro*. Modul 1-5, Jakarta: Universitas Terbuka.

Suematsu C dan Ikeda M. M. 2006. Interface From Transaction Cost Approach, *Working Paper No. 84*, Graduate School of Economics, Kyoto University. H. 1-53.

Sumaryanto dan Rusastra I W. 2000. Struktur Penguasaan Tanah dan Hubungannya dengan Kesejahteraan Petani. Prospektif Pembangunan Pertanian dan Pedesaan dalam Era Otonomi Daerah. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Sumiati T. dan Damayanti R. 2008. Analisis Pengaruh Luas Lahah, Biaya Produksi dan Jumlah Produksi Terhadap Pendapatan Petani Kelapa Sawit di Desa Bukit Berlian I Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara, http://isid.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/11081129_2085-5834.pdf (Feb. 2012).

Supriyati, Saptana dan Yana Supriyatna, Hubungan Penguasaan Lahan dan Pendapatan Rumah Tangga di Pedesaan (Kasus di Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat), Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor <http://ejournal.unund.ac.id/abstrak/%287%29%20soca-supriyati%20dkk-penguasaan%20lahan%281%29.pdf> (Feb. 2012)

Sutrisno B. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Petani Tebu Pabrik Gula Mojo Sragen. *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* Vol. 10, No. 2 (155-64) http://eprints.ums.ac.id/1670/1/daya_saing_10_2_2009_5_bambang_sutrisna.pdf (Feb. 2012).

Syafaat dan Supena, 2000 dalam Hendayana, 2003.

Syahza, Almasdi dan Khasmarina, Shorea, Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani di Derah Riau, Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Universitas Riau, 2006

Taufikkurahman, L. 1998. Coconut Statistical Yearbook 1977. APCC, Jakarta.

Teece D. J. 1986. Transaction Cost and The Multinational Enterprise. An Assesment, *Journal of Economic Behavior and Organization* 7 (1986) 21-45. North-Holland.

Tobin, J. 1956. 'The Interest-Elasticity of Transactions Demand for Cash', 38 (3) *Review of Economics and Statistics*, 241-247.

Toror DJ, Amrizal, Analysis of linkage of subsystems of production. processing and marketing of coconut Nucleus Estate smallholders in West Java, East Kalimantan and Riau]. Analisis keterkaitan subsistem produksi, pengolahan, dan pemasaran pada PIR kelapa di Jabar, Kaltim dan Riau

Toror, D.J., Amrizal (Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain, Manado); Mokodongan, M.N.; Djafar, M. Laporan Tahunan Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain. Terbitan khusus. ISSN 0215-1200 1996 (no. 455) p. 148-152 1 table; 4 ref. COCONUTS; SMALL FARMS; PROCESSING; MARKETING; JAVA; KALIMANTAN.

Tulus Tambunan, 2001, Industrialisasi di Negara Sedang Berkembang Kasus Indonesia, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

Tulus Tambunan, 2004, Globalisasi dan perdagangan Internasional, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta

Triuwono I dan Yustika A. E. 2003. Emansipasi Kebijakan Lokal: Ekonomi dan Bisnis Pasca Sentralisasi Pembangunan. Bayumedia, Malang Publishing, 2003, hal. 6

Verawati, Marsia, (2013), Analisis Perbandingan Pendapatan Petani antara Petani Perkebunan Kelapa Sawit Perorangan dengan Pola Kemitraan di Kab. Landak. Jurnal Curvanomic Volume. 2 No. 2

Williamson, Oliver E, 1998. Transaction Cost Economics : How it Works; Where It Is headed. De Economist 146, No. 1, 1998, Kluwer Academic

Williamson, Oliver E, 2000. The New Institutional Economics; Taking Stock, Looking Ahead. Journal of Economic Literatur, Vol. 38, September 2000, Hal 597.

Wallis, J. J dan North D. C.. 1986. "Measuring the transaction sector I the American economy, 1870-1970," with a Comment by Lance Davis. In Long-Term Factors in American Economic Growth, edited by Stanley L. Engerman and Robert E. Gallman. University of Chicago Press.

Widotono H. 2011. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Pada Usaha Tani Tembakau. <http://hendri-wd.blogspot.com/2011/10/faktor-faktor-yang-berpengaruh-terhadap.html> (Feb. 2012).

Wikipedia, 2010. *Transactio cost* http://en.Wikipedia.Org/wiki/Transaction_cost. 8 Desember 2010.

Williamson O E. 1985 *The Economic Institutions of Capitalism*, New York: The Free Press. (Reviewed by Alchian & Woodward, JEL 1988, see above).

Winters P, Phill S dan Ian P. 2005. Evaluation of A Hybrid Seed contrac Between small Holder and a Multinational company at East Java, *The Journal Of Development studies* Vol. 41 Number 1, p. 62-89.

Yustika, Ahmad Erani, Dari Krisis ke Krisis, " Potret Terkini Perekonomian Nasional" Cetakan pertama, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2011.

Yustika, Ahmad Erani. 2008, . *Ekonomi Kelembagaan. Definisi, Teori, dan Strategi*. Edisi Kedua Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing.

Yustika, Ahmad Erani. 2012. *Ekonomi Kelembagaan. Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga.

Zaibet, L. T. dan Dunn, E.G. 1998. Land Tenure, Farm Size, and Rural Market Participation in Developing Countries: The Case of the Tunisia Olive Sector *Economic Development and Cultural Change*. Vo. 46, No. 4: 831-848.

Lampiran

	Kontrak		Pendapatan (ribuan)	biaya tetap u/ produksi (ribuan)	biaya variabel u/ produksi (ribuan)	total biaya produksi (ribuan)	biaya transaksi organisasi (ribuan)	biaya transaksi angkut (ribuan)	total biaya transaksi (ribuan)	usia kepala rumah tangga	lama pendidikan kepala rumah tangga	jumlah tanggung jawab keluarga	tingkat resiko usaha tani kelapa	tingkat keluasan jejaring sosial petani	
resp	cf		y	bpf	bpv	bpt	bto	bta	btt	rt1	rt2	rt3	d1	d2	
2		1		8800	1200	4400	5600	250	0	250	54	6	4	1	0
3		1		13500	2100	14280	16380	840	0	840	52	6	6	1	0
4		1		6000	750	3550	4300	835	0	835	59	6	4	1	0
6		1		99000	13500	24880	38380	1170	0	1170	51	12	6	0	0
7		1		4824	525	5600	6125	800	0	800	40	9	4	1	0
8		0		4900	1200	18410	19610	0	1888	1888	53	6	6	1	0
12		1		2800	525	9900	10425	508	0	508	54	12	3	1	0
14		1		6000	840	20760	21600	800	0	800	42	6	4	1	0
15		1		33000	5700	25120	30820	1142	0	1142	44	12	5	1	0
17		1		7200	2250	2590	4840	72	0	72	50	12	0	1	0
18		1		6500	750	6120	6870	65	0	65	47	9	3	1	0
19		1		12500	375	6140	6515	30	0	30	50	6	3	1	0
27		1		12000	1800	6220	8020	120	0	120	30	9	4	1	0
32		0		5600	0	600	600	0	200	200	46	6	7	0	0
36		0		9450	0	1045	1045	0	160	160	52	12	7	0	1
38		0		12600	0	1860	1860	0	150	150	55	6	4	0	1
42		0		1540	1250	1385	2635	0	100	100	58	9	4	1	1

44	0	25760	0	6400	6400	0	800	800	55	6	4	1	1
45	0	560	0	315	315	0	100	100	50	6	6	1	0
47	0	5250	0	3390	3390	224	200	424	55	6	5	1	0
48	0	11025	3360	1300	4660	1200	200	1400	25	16	2	1	0
52	0	3500	0	1500	1500	0	150	150	46	9	0	0	0
53	0	16450	0	2440	2440	60	600	660	60	6	8	1	0
54	0	3080	366	1240	1606	0	150	150	70	6	3	1	0
55	0	4620	0	520	520	0	150	150	59	6	6	1	0
58	1	40320	0	11600	11600	0	1200	1200	66	6	3	1	1
60	0	10500	0	1380	1380	90	150	240	39	6	4	0	1
70	0	7500	0	800	800	0	2000	2000	30	12	2	1	1
71	0	23000	0	64	64	0	6500	6500	42	6	3	1	1
76	0	3822	0	2350	2350	0	150	150	44	6	7	1	1
78	0	28000	0	500	500	0	500	500	43	6	3	1	0
79	0	1680	0	300	300	0	400	400	41	6	4	1	0
80	0	18000	0	500	500	0	200	200	50	6	5	1	0
81	0	27300	0	1700	1700	0	600	600	46	6	5	1	0
82	0	21000	0	960	960	0	3000	3000	40	9	4	1	0
85	0	3500	0	43	43	0	250	250	35	9	3	1	1
87	0	36400	0	350	350	0	250	250	65	6	5	1	0
89	1	35000	0	250	250	0	500	500	42	6	3	1	1
90	1	28000	0	250	250	0	500	500	39	9	3	1	1
93	1	33600	0	2500	2500	0	1500	1500	38	12	5	1	1
96	0	20475	0	158	158	0	1300	1300	65	6	8	1	0
98	0	9660	0	480	480	0	300	300	53	6	3	1	1

101	0	16800	0	6600	6600	0	500	500	41	6	6	1	0
jumlah data	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
rata-rata	0.37	15,837.58	848.63	4,668.60	5,517.23	190.84	573.21	764.05	48.28	7.77	4.28	0.86	0.33
st. Dev	0.49	17,041.17	2,261.87	6,613.38	8,311.43	366.35	1,124.85	1,091.52	10.01	2.63	1.80	0.35	0.47
Minimum	0.00	560.00	0.00	43.00	43.00	0.00	0.00	30.00	25.00	6.00	0.00	0.00	0.00
Maksimum	1.00	99,000.00	13,500.00	25,120.00	38,380.00	1,200.00	6,500.00	6,500.00	70.00	16.00	8.00	1.00	1.00



	Coef.	Std. Err.	z	P> z	[95% Conf. Interval]
y					
bta	4.104872	1.893129	2.17	0.030	.3944079 7.815336
bpv	4.975588	1.276469	3.90	0.000	2.473755 7.477422
dl	-258.9667	6015.075	-0.04	0.966	-12048.3 11530.36
cf	-13397.55	4710.196	-2.84	0.004	-22629.37 -4165.736
_cons	12068.11	5584.579	2.16	0.031	1122.532 23013.68
cf					
bpv	.0002242	.0000514	4.36	0.000	.0001234 .0003249
bto	.0014456	.0004444	3.25	0.001	.0005745 .0023167
rt3	-.3885001	.1203809	-3.23	0.001	-.6244423 -.1525579
_cons	-.1123821	.4725332	-0.24	0.812	-1.03853 .813766
/athrho	1.946428	.671516	2.90	0.004	.630281 3.262575
/lnsigma	9.535024	.1332787	71.54	0.000	9.273803 9.796246
rho	.9600406	.0525945			.5582456 .9970721
sigma	13835.93	1844.036			10655.19 17966.17
lambda	13283.06	2266.531			8840.738 17725.38

LR test of indep. eqns. (rho = 0): chi2(1) = 10.60 Prob > chi2 = 0.0011